



KATALOG: 9502002

ISSN 0854-6967

NERACA ARUS DANA INDONESIA TAHUNAN

2020–2024

Volume 19, 2025



BADAN PUSAT STATISTIK

Katalog: 9502002

ISSN 0854-6967

NERACA ARUS DANA INDONESIA

TAHUNAN 2020–2024

Volume 19, 2025

<https://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

NERACA ARUS DANA INDONESIA TAHUNAN 2020–2024

Volume 19, 2025

Katalog: 9502002

ISSN: 0854-6967

Nomor Publikasi: 07200.25003

Ukuran Buku: 21 x 29,7 cm

Jumlah Halaman: xvi+110 halaman/pages

Penyusun Naskah:

Direktorat Neraca Pengeluaran

Penyunting:

Direktorat Neraca Pengeluaran

Pembuat Kover:

Direktorat Neraca Pengeluaran

Penerbit:

©Badan Pusat Statistik

Pencetak:

Badan Pusat Statistik

Sumber Ilustrasi: *freepik.com, flaticon.com, canva.com*

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

ISSN 0854-6967

TIM PENYUSUN

NERACA ARUS DANA INDONESIA TAHUNAN 2020–2024 Volume 19, 2025

PENGARAH

Moh Edy Mahmud

PENANGGUNG JAWAB

Pipit Helly Sorayan

PENYUNTING

Dyah Soendhari

PENGOLAH DATA DAN PENYUSUN NASKAH

Mutia Anggraini

Hana Dwi Kristianti

Syaikhul Ibad

Kadek Ari Pratiwi Kasuma

PENATA LETAK

Syaikhul Ibad

Kadek Ari Pratiwi Kasuma

<https://www.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Neraca Arus Dana Indonesia Tahunan 2020–2024 adalah publikasi yang menyajikan informasi mengenai data investasi finansial di Indonesia menurut sektor institusi. Sektor institusi yang tercakup dalam publikasi ini adalah Korporasi Nonfinansial, Korporasi Finansial, Pemerintahan Umum, Rumah Tangga, Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT), dan Luar Negeri. Beberapa angka dalam publikasi ini masih bersifat angka sementara dan akan direvisi pada penerbitan publikasi berikutnya apabila terdapat data terkini dan/atau penyempurnaan metodologi.

Semoga dengan terbitnya publikasi Neraca Arus Dana Indonesia Tahunan 2020–2024 dapat bermanfaat bagi semua pihak sebagai bahan analisis perekonomian, khususnya terkait dengan perkembangan investasi finansial. Saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan publikasi mendatang.

Jakarta, September 2025

Kepala Badan Pusat Statistik



Amalia Adininggar Widyasanti

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR ISI

NERACA ARUS DANA INDONESIA TAHUNAN 2020–2024

Volume 19, 2025

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
RINGKASAN EKSEKUTIF	xv
BAB I. PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.3 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II. KERANGKA TEORI NERACA ARUS DANA	9
2.1 Penjelasan Umum	9
2.2 Kerangka Teori NAD	10
2.3 Neraca Arus Dana dalam Sistem Neraca Nasional	10
2.4 Kegunaan Neraca Arus Dana	12
BAB III. KERANGKA DASAR DAN CAKUPAN NERACA ARUS DANA	17
3.1 Kerangka NAD Indonesia	17
3.2 Sumber Data dan Metodologi Penyusunan.....	28
BAB IV. KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA BERDASARKAN NAD	
INDONESIA, 2020–2024	41
4.1 Gambaran Umum Perekonomian Indonesia	41
4.2 Perkembangan Tabungan Bruto, Investasi Nonfinansial, Gap Tabungan dan Investasi (<i>S-I Gap</i>).....	43
4.3 Investasi Finansial	50
4.4 Kecepatan Uang Beredar (<i>Velocity of Money</i>) dan Pendalaman Sektor Keuangan (<i>Financial Deepening</i>).....	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Nilai (Triliun Rupiah) dan Strukur (Persen) Tabungan Bruto Menurut Sektor Tahun, 2020–2024.....	44
Tabel 4.2	Struktur Tabungan Bruto Menurut Sektor Terhadap PDB Tahun 2020–2024 (Persen).....	45
Tabel 4.3	Nilai (Triliun Rupiah) dan Strukur (Persen) Investasi Nonfinansial Menurut Sektor Tahun 2020–2024.....	47
Tabel 4.4	Struktur Investasi Nonfinansial Menurut Sektor Terhadap PDB Tahun 2020–2024 (persen).....	48
Tabel 4.5	<i>S-I Gap</i> Menurut Sektor Tahun 2020–2024 (Triliun Rupiah).....	49
Tabel 4.6	Nilai Investasi Finansial Menurut Jenis Instrumen Finansial Tahun 2020–2024 (Triliun Rupiah)	51
Tabel 4.7	Penambahan/Pengurangan Aset Finansial Menurut Sektor Tahun 2020–2024 (Triliun Rupiah)	51
Tabel 4.8	Penambahan/Pengurangan Liabilitas Finansial Menurut Sektor Tahun 2020–2024 (Triliun Rupiah)	52
Tabel 4.9	Uang Beredar dan Produk Domestik Bruto Tahun 2020–2024.....	53

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Kaitan antara Neraca Arus Dana dan Sistem Neraca Nasional	12
Gambar 3.1	Bagan Pembagian Sektor dalam Neraca Arus Dana.....	18
Gambar 4.1	Proporsi Investasi Indonesia (persen), 2023 dan 2024	46
Gambar 4.2	Perkembangan Investasi Indonesia (triliun rupiah), 2020–2024.....	46
Gambar 4.3	<i>Velocity of Money</i> , 2020–2024	53
Gambar 4.4	Rasio M1 dan M2 terhadap PDB (persen), 2020–2024.....	54

<https://www.bps.go.id>

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Definisi Sektor Neraca Arus Dana Indonesia	61
Lampiran 2.	Definisi Kategori Transaksi Neraca Arus Dana Indonesia	75
Lampiran 3.	Matriks Neraca Arus Dana Menurut Kategori Transaksi dan Sektor	85
Lampiran 4.	Matriks Neraca Arus Dana Indonesia Menurut Sektor.....	97

<https://www.bps.go.id>

<https://www.bps.go.id>

RINGKASAN EKSEKUTIF

Neraca Arus Dana (NAD) Indonesia merupakan sistem data finansial yang mencatat transaksi antar sektor institusi melalui instrumen keuangan tertentu pada periode tertentu. NAD berfungsi untuk menggambarkan keterkaitan antara tabungan dan investasi, baik di sektor riil maupun finansial, sehingga aliran dana dari sektor surplus ke sektor defisit dapat terlihat lebih jelas. Penyusunan NAD Indonesia mengacu pada *System of National Accounts* 2008 (SNA 2008) serta terkonsolidasi dengan Neraca Institusi Terintegrasi (NIT). NAD menyediakan basis data komprehensif yang bermanfaat untuk analisis makroekonomi, khususnya dalam melihat perilaku pinjaman, tabungan, investasi, intermediasi keuangan, hingga fenomena *financial deepening*.

Sejak diperkenalkan pertama kali oleh BPS bersama Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan lembaga terkait pada 1980-an, NAD terus berkembang dalam hal cakupan sektor, instrumen, serta metodologi. NAD membagi perekonomian ke dalam enam sektor utama: korporasi nonfinansial, korporasi finansial, pemerintah, rumah tangga, lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT), dan luar negeri. Instrumen finansial yang dicatat mencakup tabungan, simpanan, pinjaman, surat utang, ekuitas, asuransi, dana pensiun, hingga derivatif. Penyusunan NAD dilakukan dengan pendekatan *from-whom-to-whom*, sehingga memungkinkan analisis aliran dana secara detail lintas sektor. Konsistensi data dijaga melalui proses rekonsiliasi dengan neraca riil maupun sumber-sumber data, seperti BoP, GFS, SPI, SEKI, hingga laporan keuangan pemerintah.

Periode 2020–2024 memperlihatkan dinamika signifikan dalam perekonomian nasional. Pandemi COVID-19 pada awal periode memicu kontraksi ekonomi, namun pemulihan mulai terlihat pada 2021 dan berlanjut hingga 2024. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 mencapai 5,03 persen (*c-to-c*), didukung oleh peningkatan konsumsi rumah tangga. Pemilu 2024 turut memberi dorongan melalui peningkatan konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT) sebesar 12,48 persen. Dari sisi eksternal, neraca pembayaran mencatat surplus, cadangan devisa berada pada level yang sehat, dan nilai tukar rupiah relatif terjaga di tengah ketidakpastian global.

Tabungan bruto sepanjang periode menunjukkan tren peningkatan, meskipun distribusinya antar sektor tidak merata. Sektor korporasi nonfinansial memberikan kontribusi dominan terhadap total tabungan bruto nasional, yang diikuti oleh sektor rumah tangga, korporasi finansial, pemerintah umum, luar negeri, dan LNPRT. Investasi nonfinansial juga

tumbuh sejalan dengan pemulihan ekonomi, terutama pada sektor manufaktur, konstruksi, dan infrastruktur. Namun, terdapat celah tabungan-investasi (*S-I gap*) yang menunjukkan bahwa kebutuhan investasi nasional belum sepenuhnya dapat dibiayai oleh tabungan domestik. Kekurangan ini sebagian besar ditutup melalui penerbitan obligasi, pinjaman luar negeri, serta masuknya investasi portofolio.

Dari sisi instrumen, investasi finansial mengalami pergeseran. Ekuitas dan unit penyertaan investasi kolektif menunjukkan perkembangan positif, mencerminkan meningkatnya partisipasi pasar modal. Pinjaman dan surat utang pemerintah juga tumbuh, sejalan dengan kebijakan fiskal ekspansif untuk mendukung pemulihan ekonomi. Sementara itu, peran lembaga keuangan sebagai perantara semakin kuat, tercermin pada peningkatan simpanan masyarakat dan penyaluran kredit. Data NAD juga mengindikasikan meningkatnya keterkaitan antar sektor dalam transaksi finansial, memperlihatkan pendalaman pasar keuangan yang lebih baik.

Indikator lain yang dicermati adalah *velocity of money* dan tingkat *financial deepening*. Selama 2020–2024, *velocity of money* cenderung menurun, sejalan dengan pergeseran preferensi masyarakat dari transaksi tunai menuju instrumen simpanan dan investasi finansial jangka panjang. Hal ini menunjukkan berkembangnya intermediasi keuangan dan semakin dalamnya struktur pasar keuangan domestik. Rasio M2 terhadap PDB menurun, menandakan adanya penyesuaian struktur likuiditas dalam perekonomian, dimana pertumbuhan tabungan dan simpanan berjangka melambat dibandingkan dengan ekspansi PDB nominal..

Secara keseluruhan, NAD 2020–2024 menggambarkan proses transformasi ekonomi Indonesia yang ditopang oleh peningkatan tabungan rumah tangga, pertumbuhan investasi nonfinansial, dan semakin beragamnya instrumen pembiayaan. Kendati terdapat celah pembiayaan, kondisi makroekonomi tetap terkendali berkat peran aktif sektor finansial dan masuknya modal asing. Ke depan, penguatan tabungan domestik, peningkatan kualitas investasi, serta pengelolaan risiko eksternal menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Dengan NAD sebagai instrumen analisis, pengambil kebijakan dapat memperoleh gambaran komprehensif mengenai interaksi sektor riil dan finansial, sehingga arah kebijakan ekonomi dapat disusun lebih tepat sasaran.



BAB I

PENDAHULUAN

<https://www.kids.go.id>

<https://www.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan investasi dalam meningkatkan penciptaan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi dapat bersumber dari pinjaman dan hibah, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Proses pembiayaan investasi dalam pelaksanaannya memerlukan peran lembaga keuangan, seperti bank maupun lembaga keuangan lainnya sebagai perantara yang menghubungkan penyedia dana (selanjutnya disebut sebagai sektor surplus) dengan sektor yang membutuhkan dana (sektor defisit)¹. Pada masa lampau, eksistensi lembaga keuangan belum menunjukkan peran yang signifikan, dimana aktivitas investasi oleh para penyedia dana umumnya terbatas pada instrumen-instrumen keuangan konvensional, seperti tabungan dan deposito. Akibatnya, dana belum dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai investasi. Sementara itu, sektor produksi (investor) masih mengalami kesulitan dalam memperoleh sumber dananya.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah telah memulai pelaksanaan reformasi ekonomi sejak awal tahun 1980, dengan fokus pada sektor perbankan, yang diwujudkan antara lain melalui kebijakan deregulasi dalam penetapan suku bunga. Kebijakan ini memungkinkan para pemilik dana untuk melakukan investasi finansial dengan pilihan instrumen yang lebih beragam dan menarik. Selain itu, meningkatnya kegiatan pasar modal yang ditunjukkan oleh semakin banyaknya perusahaan yang "*go-public*", menyebabkan para pemilik dana mempunyai alternatif tambahan dalam berinvestasi finansial yang bersifat langsung, yaitu dengan cara membeli saham dan sertifikat keuangan lainnya di pasar modal. Sejalan dengan dinamika perkembangan ekonomi modern, mekanisme transfer dana dari sektor surplus ke sektor defisit melalui berbagai instrumen keuangan mengalami peningkatan kompleksitas, baik dari segi bentuk maupun proses intermediasinya. Perkembangan yang berlangsung pesat dalam sektor finansial menuntut pencatatan dan pemantauan yang dilakukan secara berkala melalui basis data yang terpadu, sistematis, komprehensif, dan konsisten, sehingga berguna sebagai masukan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi

¹ Dalam kaitan neraca arus dana, sektor surplus merupakan sektor yang memiliki tabungan lebih besar dari investasi riilnya, sebaliknya disebut sektor defisit. Investasi riil merupakan investasi dalam bentuk penambahan aset tetap yang dilakukan oleh masing-masing sektor.

dan moneter secara lebih tepat. Basis data tersebut selanjutnya disebut Neraca Arus Dana (NAD).

Selama ini, basis data mengenai statistik produksi dan distribusi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian nasional (sektor riil) telah disajikan secara berkala baik dalam Produk Domestik Bruto (PDB), Tabel Input- Output Indonesia, maupun dalam bentuk neraca-neraca lainnya². Sebagian besar neraca- neraca ini hanya menggambarkan besarnya produksi, nilai tambah, pengeluaran konsumsi, dan pembentukan modal yang terjadi di masing- masing sektor. Gambaran mengenai bagaimana sektor- sektor ini memperoleh dan memanfaatkan tabungannya, baik untuk membiayai investasi riil maupun investasi finansial belum tercakup di dalam sistem tersebut. Demikian halnya dengan informasi mengenai sektor- sektor yang harus melakukan pinjaman guna membiayai investasi riil akibat tidak mencukupinya tabungan, beserta jenis instrumen finansial yang digunakan dalam aktivitas pembiayaan tersebut, belum tercermin secara memadai dalam neraca-neraca yang tersebut. Neraca Arus Dana mencatat seluruh transaksi ini dari sisi finansial, sehingga arus finansial yang terjadi dari sektor surplus ke sektor defisit dapat tergambar secara lebih jelas. Arus finansial tersebut akan merefleksikan perubahan harta dan kewajiban finansial melalui perubahan instrumen-instrumen seperti tabungan, pembelian saham, penambahan surat utang, penambahan pinjaman, dan sebagainya.

Sebagai respon terhadap kondisi tersebut, pada tahun 1987, Badan Pusat Statistik telah membuat suatu studi mengenai Neraca Arus Dana Indonesia tahun 1980. Usaha ini merupakan langkah penting untuk mewujudkan NAD yang sebenarnya, walaupun data yang digunakan masih sangat terbatas. Pada tahun 1991, publikasi NAD Indonesia 1984-1988 telah berhasil disusun untuk pertama kalinya. Publikasi tersebut merupakan hasil kerja Tim Teknis yang terdiri dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan instansi terkait lainnya. Untuk menghasilkan publikasi tersebut, Tim Teknis telah bekerja selama lebih kurang dua tahun dengan dukungan biaya dan konsultan dari Bank Dunia.

Berdasarkan pengalaman penyusunan tersebut, saat ini Tim Teknis telah dapat menyusun NAD Indonesia secara berkala. Sejak tahun 2016, Publikasi NAD telah mengalami perubahan bentuk format dan jenis instrumen keuangan yang disajikannya. Perubahan ini mengacu pada sistem neraca nasional terbaru yang dikenal sebagai SNA 2008. Hingga saat ini, usaha untuk memperbaiki sistem NAD baik dari segi kualitas, penyajian, dan analisis terus

² Keseluruhan neraca tersebut dibuat berdasarkan Sistem Neraca Nasional (SNA), yang direkomendasikan oleh PBB, *System of National Accounts* 2008

dikembangkan. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah data yang disajikan dalam publikasi ini merupakan hasil konsolidasi Neraca Institusi Terintegrasi (NIT)³ Indonesia.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan NAD bertujuan untuk menyediakan data rinci mengenai kegiatan pinjam meminjam yang terjadi dari sektor surplus ke sektor defisit dalam pasar finansial. Dalam terminologi ekonomi, NAD didefinisikan sebagai suatu basis data yang menyajikan data keuangan yang rinci sekaligus konsisten dengan data dari neraca riil (tabungan dan investasi) yang berasal dari neraca pendapatan nasional. Terkait hal tersebut maka penerbitan publikasi Neraca Arus Dana Indonesia 2020–2024 bertujuan sebagai berikut:

- a. Memberikan gambaran umum perekonomian Indonesia.
- b. Menyajikan perkembangan tabungan bruto, investasi nonfinansial, *Gap* tabungan dan investasi (*S-I gap*) tahun 2020–2024.
- c. Menyajikan perkembangan investasi finansial Indonesia 2020–2024.
- d. Menyajikan analisis deskriptif yang berkaitan dengan neraca pembiayaan sektoral, keterkaitan finansial antar sektor, *velocity of money*, dan penyebab “*financial deepening*” berdasarkan data NAD 2020–2024.

1.3 Sistematika Penulisan

Penulisan publikasi Neraca Arus Dana Indonesia 2020–2024 ini disusun berdasarkan sistematika berikut:

- Bab I: Pendahuluan, menguraikan permasalahan yang melatarbelakangi tulisan ini, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
- Bab II: Kerangka Teori Neraca Arus Dana, menguraikan mengenai definisi dan kerangka teori yang mendasari NAD. Selain itu, dijelaskan pula hubungan NAD dengan sistem neraca nasional serta kegunaan NAD di dalam menganalisa kegiatan ekonomi nasional.

³ Neraca Institusi Terintegrasi (NIT) merupakan kerangka kerja statistik yang menyediakan rangkaian neraca makroekonomi yang komprehensif, konsisten, dan terintegrasi, yang dirancang untuk tujuan analisis, pengambilan keputusan, dan kebijakan ekonomi. NIT dirancang untuk menyediakan informasi tentang profil unit institusi serta aktivitas ekonominya yaitu produksi, konsumsi, dan akumulasi (transaksi finansial dan nonfinansial serta kekayaannya) (bps.go.id, 8 Agustus 2024).

Bab III: Kerangka Dasar dan Cakupan Neraca Arus Dana, membahas mengenai kerangka NAD Indonesia, sumber data, dan metode penyusunan.

Bab IV: Kondisi Perekonomian Indonesia, menguraikan secara deskriptif mengenai Gambaran Umum Perekonomian Indonesia Tahun 2024, Perkembangan Tabungan Bruto, Investasi, dan Percepatan Uang Beredar (*Velocity of Money*) serta Pendalaman Sektor Keuangan (*Financial Deepening*)

<https://www.bps.go.id>



BAB II

KERANGKA TEORI NERACA ARUS DANA

<https://www.bps.go.id>

<https://www.bps.go.id>

BAB II

KERANGKA TEORI NERACA ARUS DANA

2.1 Penjelasan Umum

Neraca Arus Dana (NAD) merupakan basis data yang dirancang untuk memperlihatkan transaksi finansial antar berbagai sektor ekonomi, seperti: korporasi nonfinansial, korporasi finansial, pemerintah, rumah tangga, dan Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (LNPRRT), serta pihak luar negeri. NAD adalah bagian dari sistem neraca nasional. Sistem ini mencakup semua neraca yang menggambarkan seluruh aspek kegiatan ekonomi dalam bentuk terpadu (*integrated accounts*). Termasuk dalam sistem ini adalah neraca produksi, neraca distribusi pendapatan, neraca penggunaan pendapatan, neraca kapital, neraca finansial/NAD dan neraca akhir tahun. Seluruh neraca tersebut menggambarkan berbagai aspek kegiatan ekonomi. Neraca produksi hingga neraca penggunaan pendapatan menggambarkan bagaimana suatu nilai tambah dihasilkan dan didistribusikan untuk kemudian digunakan dalam konsumsi oleh setiap sektor. Dana yang tersisa pada tiap sektor akan menjadi nilai tabungan masing-masing. Pada neraca kapital dan finansial, disajikan perubahan aset atau kekayaan yang terjadi pada tiap sektor baik dari sisi aset nonfinansial maupun aset finansial yang berasal dari kegiatan transaksi. Suatu sektor dapat mendanai investasi atau pembelian aset nonfinansial baru (penambahan modal tetap dan inventori) dengan dana tabungan yang dimiliki. Apabila tabungan yang dimiliki tidak mencukupi, maka peningkatan liabilitas/kewajiban finansial dapat dilakukan. Di sisi lain, sektor yang masih memiliki kelebihan nilai tabungan setelah pembentukan modal tetap akan memiliki tambahan aset finansial. Hal tersebut akan tercatat dalam neraca finansial/NAD.

NAD akan menangkap peningkatan aset maupun kewajiban finansial di tiap sektor menurut jenis instrumen finansial. Dalam pencatatan NAD, setiap pembelian instrumen finansial pada suatu sektor akan menjadi penjualan di sektor lain, sehingga NAD disebut sebagai sistem yang tertutup untuk setiap transaksi. NAD juga dapat dilihat sebagai suatu perangkat data yang dirancang untuk menggambarkan bagaimana tabungan dihubungkan dengan sektor-sektor surplus dan defisit.

2.2 Kerangka Teori NAD

Secara sederhana, NAD menggambarkan bagaimana tabungan dalam perekonomian digunakan untuk membiayai investasi. Dalam ekonomi makro, ada satu persamaan yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan tabungan sama dengan investasi, tetapi persamaan ini tidak berlaku untuk masing-masing sektor ekonomi secara terpisah. Untuk ekonomi secara keseluruhan, pendapatan (Y) sama dengan konsumsi (C) ditambah investasi (I) atau $Y = C + I$. Jika tabungan (S) didefinisikan sebagai $S = Y - C$, maka $S = I$. Umumnya, pendapatan sektor Rumah Tangga secara makro lebih besar dari pengeluaran. Sebaliknya, sektor Korporasi Nonfinansial biasanya merupakan sektor defisit yaitu sektor yang pendapatannya lebih kecil dari pengeluarannya. Dengan demikian, sektor Korporasi Nonfinansial harus meminjam dari sektor Rumah Tangga. Meskipun pada kondisi perekonomian tertentu, Korporasi Nonfinansial dapat menjadi sektor surplus. Sektor Korporasi Finansial, misalnya Bank, merupakan perantara keuangan yang menghimpun dana dari beberapa sektor dan menyalurkannya ke sektor lain. NAD menyediakan data keuangan secara rinci mengenai aktivitas tersebut melalui berbagai instrumen finansial.

Data NAD disajikan dalam bentuk matriks. Bagian kolom menggambarkan sektor dan bagian baris menggambarkan berbagai jenis instrumen finansial. Setiap sektor mempunyai dua kolom, kolom pertama menunjukkan perubahan harta (aset) dan kolom kedua menyatakan perubahan kewajiban (liabilitas). Kenaikan jumlah harta maupun kewajiban suatu sektor dicerminkan oleh arus finansial positif. Sebaliknya, penurunan harta atau kewajiban ditunjukkan oleh arus finansial negatif. Arus tersebut menunjukkan konsep "*net*", dalam pengertian bahwa suatu sektor dapat mempunyai arus yang berasal dari transaksi bulanan, harian, dan untuk instrumen finansial tertentu dapat terjadi setiap saat.

2.3 Neraca Arus Dana dalam Sistem Neraca Nasional

Dalam sistem neraca nasional (SNA 2008), neraca lengkap (Integrated System of National Accounts) secara garis besar terbagi dalam 3 (tiga) neraca pokok yaitu: neraca berjalan, neraca akumulasi dan neraca akhir tahun. Neraca berjalan mencatat kegiatan ekonomi di pasar riil dalam kurun waktu satu tahun. Neraca berjalan terdiri dari neraca produksi, neraca pendapatan yang dihasilkan, neraca distribusi pendapatan primer, neraca distribusi pendapatan sekunder dan neraca penggunaan pendapatan. Neraca akumulasi mencatat penambahan aset finansial/nonfinansial dalam kurun waktu tertentu. Neraca akumulasi terdiri dari neraca modal, neraca finansial, neraca perubahan volume, dan neraca perubahan harga (revaluasi). Neraca finansial dikenal sebagai Neraca Arus Dana (NAD).

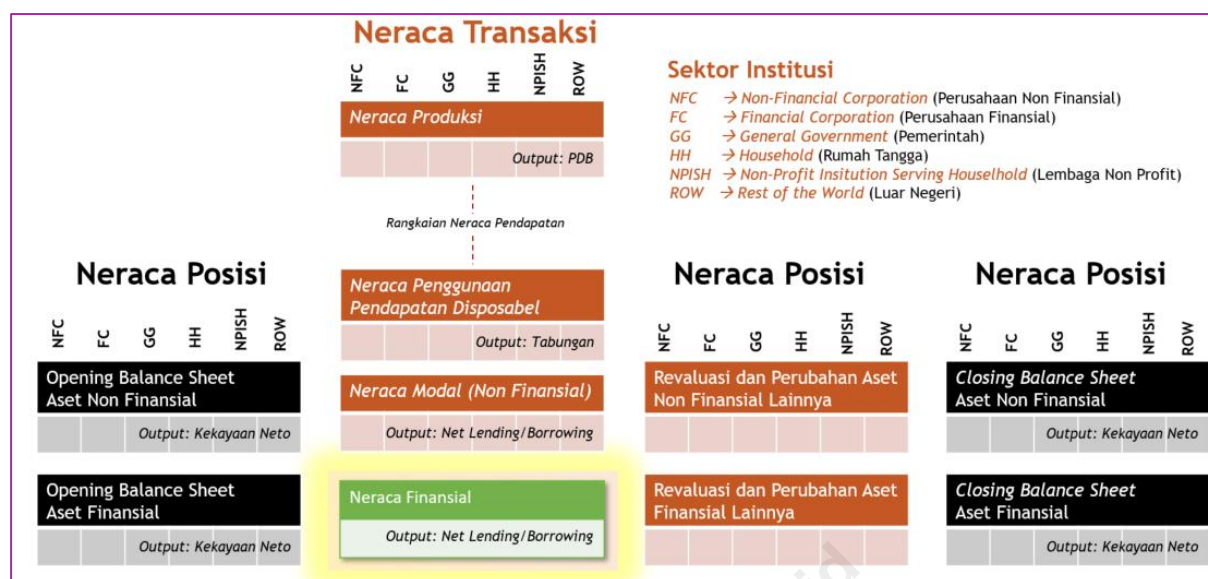
Sementara itu, balance sheet mencatat nilai awal dan akhir dari aset-aset, baik aset finansial maupun aset nonfinansial pada awal/akhir tahun.

Bila sistem neraca nasional dikaitkan dengan sistem neraca arus dana, maka terdapat dua neraca yang mempunyai hubungan erat, yaitu neraca penggunaan pendapatan dan neraca modal. Dari neraca penggunaan pendapatan dapat diturunkan Tabungan Bruto, sedangkan dari neraca modal dapat diturunkan Pembentukan Modal Tetap dan Pinjaman Neto. Dalam NAD, pinjaman neto ini kemudian diterjemahkan dalam bentuk perubahan instrumen finansial, baik di sisi penggunaan maupun sumber.

Neraca Penggunaan Pendapatan (*Use of Disposable Income Account*) merupakan salah satu dari neraca distribusi pendapatan yang menggambarkan tentang penggunaan pendapatan yang siap dibelanjakan (*disposable income*). Pendapatan yang siap dibelanjakan adalah total seluruh pendapatan yang berasal dari pendapatan faktor produksi (tenaga kerja dan modal) ditambah dengan pendapatan kepemilikan ditambah pendapatan dari transfer berjalan (*current transfer*) dikurangi seluruh total pengeluaran yaitu pembayaran kepemilikan dan pengeluaran transfer berjalan. Jadi pendapatan yang siap dibelanjakan merupakan pendapatan bersih sebelum dikurangi pengeluaran untuk konsumsi. Selisih pendapatan yang siap dibelanjakan dengan pengeluaran konsumsi disebut tabungan (*saving*). Neraca Penggunaan Pendapatan (*Use of Disposable Income Account*) merupakan neraca terakhir dalam kelompok neraca berjalan (*current accounts*). Angka tabungan yang berasal dari Neraca Penggunaan Pendapatan selanjutnya dicatat sebagai sumber pada Neraca Modal (*Capital Account*). Neraca Modal mencatat sumber dan penggunaan dana menurut rincian transaksi modal. Penggunaan dana untuk transaksi modal diantaranya adalah Pembentukan Modal Bruto yang terdiri dari Pembentukan Modal Tetap Bruto ditambah Perubahan Inventori.

Tujuan penyusunan NAD adalah menyediakan data rinci mengenai kegiatan pinjam-meminjam yang terjadi antara sektor surplus dan sektor defisit dalam pasar finansial. Dalam terminologi ekonomi, NAD didefinisikan sebagai suatu basis data yang menyajikan data keuangan yang rinci sekaligus konsisten dengan data dari neraca riil (tabungan dan investasi) yang berasal dari neraca pendapatan nasional. Kegiatan pasar finansial sebagian ditentukan oleh variabel-variabel dari sektor riil melalui keputusan atas besarnya tabungan dan investasi, dan sebagian lagi ditentukan oleh variabel-variabel finansial seperti tingkat suku bunga dan penawaran berbagai jenis instrumen finansial. NAD menyediakan data yang penting untuk melakukan analisis secara empiris, misalnya untuk melihat interaksi antara tabungan dan investasi, utang dan piutang, perilaku perantara finansial, dan penentuan tingkat suku bunga. Penjelasan lebih lanjut mengenai keterkaitan antara Neraca Pendapatan dan Pengeluaran,

serta Neraca Modal dengan Neraca Arus Dana dapat digambarkan dalam Gambar 2.1 berikut ini.



Gambar 2.1 Bagan Kaitan antara Neraca Arus Dana dan Sistem Neraca Nasional

2.4 Kegunaan Neraca Arus Dana

Salah satu manfaat penyusunan NAD adalah tersedianya suatu perangkat data keuangan makro dalam bentuk yang lengkap dan konsisten. Lengkap berarti bahwa NAD melibatkan seluruh instrumen finansial dan pelakunya, sedangkan konsisten berarti bahwa data keuangan yang disajikan harus mengikuti aturan tertentu, seperti jumlah sumber dan penggunaan setiap instrumen finansial untuk keseluruhan ekonomi harus sama besarnya, serta jumlah seluruh sumber dan penggunaan untuk setiap sektor harus sama besarnya. Dengan demikian, NAD dapat digunakan sebagai dasar analisis ekonomi makro, khususnya dalam bidang moneter.

2.4.1 Pangkalan Data

NAD merupakan suatu pangkalan data (*database*), yang menyediakan catatan-catatan transaksi keuangan secara lengkap dan konsisten. Berdasarkan informasi ini dapat dibuat analisis deskriptif mengenai kegiatan menyeluruh pasar uang dan modal.

2.4.2 Alat Analisis

NAD banyak dimanfaatkan oleh para pengguna data sebagai alat analisis. Para pengamat ekonomi makro yang tertarik untuk menganalisis kaitan antara sektor finansial dan riil dapat menggunakan informasi tabungan dan investasi riil. Pengamat lain yang tertarik untuk melihat secara lebih tajam perilaku keuangan sektor tertentu, misalnya sektor Korporasi Nonfinansial, dapat menggunakan data deret berkala untuk menghitung berbagai jenis rasio, seperti rasio dana yang berasal dari utang-utang terhadap modal saham, atau rasio pinjaman jangka pendek terhadap pinjaman jangka panjang. Terlebih lagi jika data yang tersedia tidak hanya dalam bentuk arus tetapi juga dalam bentuk level, maka pengamat dapat menggunakan keduanya secara bersamaan. Sektor Rumah Tangga merupakan sektor yang sering diminati para pengamat ekonomi. Jumlah perubahan harta dan kewajiban lancar seperti deposito dan kredit konsumen dapat digunakan untuk melihat hubungan antara tabungan dan pengeluaran rumah tangga.

2.4.3 Penerapan Teori Portofolio

Berdasarkan teori portofolio, pelaku ekonomi baik sebagai individu maupun perusahaan melakukan investasinya ke berbagai jenis instrumen finansial sesuai dengan hubungan antara hasil dan risiko yang ditawarkan oleh pasar. Jika biaya transaksi masing-masing jenis portofolio diabaikan, maka para pelaku ekonomi akan mengubah perilaku investasinya sesuai dengan perubahan rasio keuntungan masing-masing portofolio. Dalam konteks keseimbangan umum, perubahan relatif dari penawaran suatu aset hanya akan diterima pelaku ekonomi jika keuntungan relatif atas aset tersebut juga meningkat atau harganya lebih rendah. Dalam model portofolio yang lengkap, biaya transaksi juga diperhitungkan sehingga memberikan gambaran yang lebih realistis. Teori portofolio ini dapat diterapkan secara sederhana dengan menggunakan kerangka NAD.

2.4.4 Arus Penawaran dan Permintaan untuk Menentukan Suku Bunga

Pengamat ekonomi yang tertarik untuk meramalkan tingkat suku bunga dapat memanfaatkan arus finansial sebagai alat analisis. Prosedur sederhana yang dapat dilakukan adalah memperkirakan jumlah permintaan satu atau lebih instrumen finansial melalui tingkat pertumbuhan portofolio sektor-sektor yang biasanya memegang instrumen tersebut seperti bank dan perusahaan asuransi jiwa. Kemudian secara terpisah diperkirakan penawaran instrumen tersebut. Adanya kelebihan permintaan dibanding penawaran terhadap satu atau lebih instrumen, pada gilirannya akan menyebabkan peningkatan penawaran hingga

mencapai titik keseimbangan umum. Melalui proses iterasi dan penyesuaian untuk mencapai titik tersebut, dapat diperkirakan tingkat suku bunga dan arus finansial yang terjadi.

2.4.5 Penerapan untuk Perencanaan dan Proyeksi

NAD dapat digunakan untuk memperkirakan arus finansial, tabungan, dan investasi sektoral sebagai masukan bagi perencanaan sektoral dan nasional. Salah satu metode yang digunakan untuk memperkirakan variabel-variabel tersebut adalah menggunakan rasio pada tiap sektor. Prosedur sederhana ini harus dimodifikasi supaya mendapatkan hasil yang lebih mendekati kenyataan. Hal ini dilakukan karena dua hal yaitu, pertama, arus finansial biasanya berfluktuasi cukup besar dari tahun ke tahun. Untuk melakukan modifikasi dapat digunakan rasio rata-rata tiga sampai lima tahunan. Kedua, sebaiknya dibuat secara iteratif dan disesuaikan dengan memperhatikan konsistensi angka-angka dalam kerangka NAD, baik secara sektoral maupun keseluruhan. Terkadang, dalam proses penyesuaian ini didapatkan beberapa informasi tidak langsung. Dalam konteks menyusun perencanaan, dapat dimulai dengan memperkirakan investasi riil untuk masing-masing sektor, kemudian diikuti dengan memperkirakan besarnya tabungan yang dapat diciptakan masing-masing sektor dengan menggunakan rasio NAD. Berdasarkan perkiraan tersebut dapat diperkirakan nilai dari pinjaman neto dan variabel-variabel terkait lainnya.



BAB III

KERANGKA DASAR DAN CAKUPAN NERACA ARUS DANA

<https://www.bps.go.id>

BAB III

Kerangka Dasar dan Cakupan Neraca Arus Dana

3.1 Kerangka NAD Indonesia

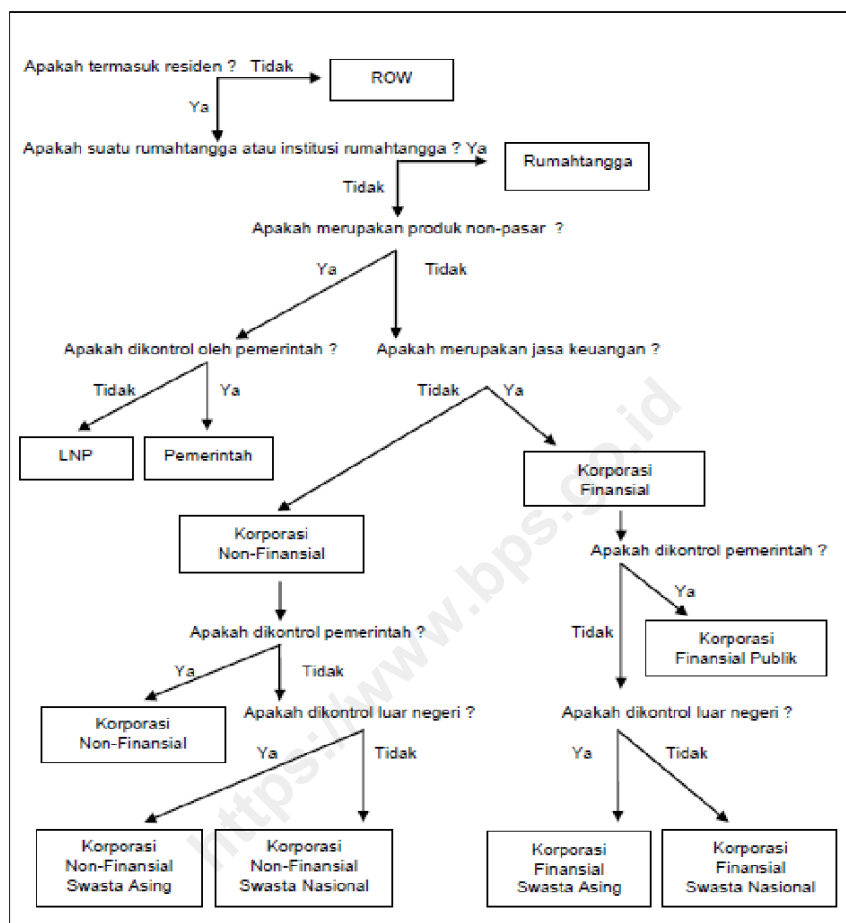
Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, NAD adalah suatu sistem pencatatan statistik finansial yang menggambarkan transaksi pinjam-meminjam dana antar berbagai sektor di dalam suatu perekonomian. Terdapat dua informasi yang akan terjabarkan dalam NAD, yaitu informasi jenis instrumen finansial yang menjadi media pinjam-meminjam serta sektor-sektor yang terlibat dalam transaksi pinjam-meminjam tersebut. Untuk menggambarkan arus finansial antar sektor melalui instrumen finansial tertentu, lazimnya digunakan matriks dengan baris menggambarkan jenis instrumen finansial dan kolom menggambarkan sektor/pelaku ekonomi. Dalam bagian ini akan dijelaskan lebih lanjut pembagian sektor dan instrumen finansial yang tercakup dalam NAD.

3.1.1 Pembagian Sektor

Salah satu tujuan penyusunan NAD adalah untuk mengetahui perilaku penyediaan dan penggunaan dana berbagai pelaku ekonomi melalui penggunaan instrumen-instrumen finansial. Untuk menunjang tujuan tersebut, perekonomian harus dibagi menjadi sektor-sektor tertentu sehingga memudahkan analisis. Unit-unit ekonomi yang mempunyai motivasi serupa terhadap keputusan finansial dikelompokkan ke dalam satu sektor. Dengan demikian, paling sedikit perekonomian harus dibagi ke dalam enam sektor, yaitu Korporasi Nonfinansial, Korporasi Finansial, Pemerintah, Rumah Tangga, LNPRT, dan Luar Negeri; karena keenam sektor tersebut mempunyai perilaku yang sangat berbeda. Pemerintah misalnya, merupakan suatu lembaga yang mempunyai tanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat dan seringkali melakukan investasi dalam jumlah besar. Korporasi Finansial (khususnya Bank) berfungsi menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kepada investor. Sementara itu, motivasi Korporasi Nonfinansial adalah mencari keuntungan dari investasi yang ditanam. Dalam praktiknya, sektor-sektor tersebut (kecuali Luar Negeri) perlu dipecah lagi sesuai dengan kebutuhan. Pada Gambar 3.1 disajikan bagan pembagian sektor dalam NAD.

Sektor-sektor yang telah disebutkan sebelumnya dapat dilakukan pembagian lebih detail ke dalam subsektor jika diperlukan. Tidak ada cara tunggal yang digunakan dalam mengalokasikan ke dalam subsektor untuk semua tujuan atau semua negara, sehingga dalam membagi subsektor dapat digunakan cara yang berbeda. Sektor dan subsektor diperlukan dalam targeting atau monitoring kelompok tertentu dalam suatu rencana kebijakan. Contoh,

sektor Rumah Tangga dibagi ke dalam subsektor agar dapat mengamati kelompok masyarakat yang dipengaruhi atau mendapatkan manfaat dari proses pembangunan, kebijakan ekonomi pemerintah, atau langkah-langkah kebijakan sosial. Pembagian sektor ke dalam subsektor tergantung pada: jenis analisis yang akan dilakukan, kebutuhan pembuat kebijakan, ketersediaan data, serta kondisi ekonomi dan pengaturan institusi di dalam suatu negara.



Gambar 3.1 Bagan Pembagian Sektor dalam Neraca Arus Dana

1. Sektor Korporasi Nonfinansial

Korporasi Non Finansial adalah perusahaan yang aktivitas utamanya memproduksi barang atau jasa nonfinansial. Selain itu, Korporasi Nonfinansial juga mencakup Lembaga Non-Profit (LNP) yang menghasilkan barang/jasa dengan harga pasar seperti rumah sakit, sekolah, atau perguruan tinggi. Korporasi Nonfinansial juga termasuk asosiasi bisnis yang dibiayai korporasi nonfinansial atau *unincorporated* enterprises yang berperan mempromosikan dan melayani kepentingan *enterprise*.

Terdapat dua kriteria yang dapat digunakan untuk mengklasifikasi Korporasi Nonfinansial ke dalam subsektor. Kriteria pertama membagi antara Korporasi Nonfinansial yang

merupakan LNP atau LNP bisnis nonfinansial (FPIs) dan Korporasi Nonfinansial bukan LNP. Kriteria kedua membagi berdasarkan unit pengendali yang dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Korporasi Nonfinansial publik,
- b. Korporasi Nonfinansial swasta nasional,
- c. Korporasi Nonfinansial yang dikendalikan pihak asing.

2. Sektor Korporasi Finansial

Sektor Korporasi Finansial mencakup seluruh perusahaan residen yang aktivitas utamanya menyediakan jasa keuangan, termasuk jasa perantara keuangan, asuransi, dan dana pensiun, serta unit yang memfasilitasi perantara keuangan. Selain itu, sektor Korporasi Finansial juga mencakup Lembaga Non-Profit (LNP) yang menghasilkan jasa keuangan.

Korporasi Finansial dapat dibagi menjadi tiga, yaitu perusahaan perantara keuangan, perusahaan penunjang jasa keuangan, dan keuangan lainnya. Perusahaan perantara keuangan adalah unit institusi yang memperoleh aset finansial dengan terlibat dalam transaksi finansial di pasar uang. Di dalamnya termasuk perusahaan asuransi dan dana pensiun. Perusahaan penunjang jasa keuangan adalah unit institusi yang terlibat dalam melayani pasar uang, tetapi tidak mengambil alih kepemilikan aset dan kewajiban finansial yang dilakukannya. Perusahaan finansial lainnya adalah unit institusi yang menyediakan jasa keuangan, di mana sebagian besar aset atau kewajibannya tidak ditransaksikan di pasar uang secara terbuka. Sektor Korporasi Finansial juga dapat dibagi menjadi sembilan subsektor sesuai dengan jenis aktivitas di pasar dan likuiditas dari kewajibannya. Sembilan subsektor tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bank Sentral

Bank sentral adalah institusi keuangan nasional yang bertugas mengendalikan seluruh aspek kunci dari sistem keuangan.

b. Korporasi Depositori selain Bank Sentral

Korporasi depository di luar bank sentral, melakukan kegiatan perantara keuangan sebagai aktivitas utamanya. Untuk tujuan ini, mereka memiliki kewajiban dalam bentuk deposito atau instrumen finansial lain (seperti sertifikasi deposito jangka pendek).

c. Institusi Pasar Uang (MMFs)

Institusi pasar uang (MMFs) adalah perusahaan yang menggunakan skema investasi kolektif untuk menghimpun dana dengan menerbitkan saham atau unit investasi pada publik. Hasilnya diinvestasikan dalam instrumen pasar uang, saham, unit MMFs, instrumen utang yang dapat diperjual belikan dengan sisa jatuh tempo tidak lebih dari satu tahun, deposito bank, dan instrumen yang menghasilkan tingkat pengembalian

mendekati suku bunga instrumen pasar uang. Saham MMFs dapat dipindahtangankan secara langsung pada pihak ketiga melalui cek atau sarana lain, karena sifat skema instrumen investasi, saham, atau units, MMFs dianggap sebagai *close substitutes* untuk deposito.

d. Institusi Investasi non-MMFs

Institusi investasi non-MMFs adalah perusahaan yang menggunakan skema investasi kolektif untuk menghimpun dana dengan cara menerbitkan saham atau units pada publik. Hasilnya diinvestasikan dalam bentuk aset finansial selain aset jangka pendek dan dalam aset nonfinansial (umumnya *real estate*).

e. Intermediasi Keuangan Lain, kecuali Asuransi dan Dana Pensiun (ICPFs)

Intermediasi keuangan lain kecuali asuransi dan dana pensiun terdiri dari Perusahaan Finansial yang kegiatan usahanya menyediakan jasa finansial dengan menerbitkan kewajiban dalam bentuk selain mata uang, deposito, atau *close substitutes* untuk deposito pada rekening mereka sendiri guna memperoleh aset finansial yang dapat ditransaksikan di pasar uang.

f. Penunjang Jasa Keuangan

Penunjang jasa keuangan terdiri dari perusahaan finansial yang utamanya terkait dalam aktivitas transaksi aset dan kewajiban finansial atau dengan menyediakan konteks regulasi untuk transaksi ini. Namun dalam kondisi perusahaan tersebut tidak mengambil kepemilikan atas aset dan kewajiban keuangan yang diperdagangkan.

g. Institusi *Captive Financial* dan *Money Lenders*

Institusi *captive financial* dan *money lenders* terdiri dari unit institusi yang memberi jasa keuangan di mana sebagian besar aset dan kewajibannya tidak ditransaksikan dalam pasar uang terbuka.

h. Perusahaan Asuransi

Perusahaan asuransi, terdiri dari usaha berbadan hukum, entitas mutual, dan entitas lain, yang fungsi utamanya adalah menyediakan jasa asuransi jiwa, kecelakaan, kesehatan, kebakaran, atau bentuk lain bagi individu maupun kelompok unit institusi, serta jasa reasuransi bagi perusahaan asuransi lain.

i. Dana Pensiun

Kewajiban pensiun akan muncul ketika pemberi kerja atau pemerintah mewajibkan atau menganjurkan kepada anggota rumah tangga untuk berpartisipasi dalam skema jaminan sosial yang akan memberikan pendapatan kepada para pensiunan. Skema jaminan sosial bisa diorganisir oleh pemberi kerja atau pemerintah ataupun

oleh perusahaan asuransi untuk kepentingan anggotanya. Skema jaminan sosial tersebut harus merupakan institusi yang terpisah dari institusi yang membawahnya

3. Sektor Pemerintah

Sektor Pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), serta pemerintah desa dan badan jaminan sosial (*social security funds*) yang dikendalikan oleh pemerintah. Termasuk juga LNP yang menghasilkan barang/jasa nonpasar yang dikendalikan unit pemerintah.

Pembagian subsektor pada sektor pemerintah memisahkan unit LNP pemerintah dan dana jaminan sosial dari subsektor pemerintah pusat, daerah dan pemerintah desa sehingga terdapat empat subsektor sebagai berikut:

- a. Pemerintah Pusat,
- b. Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota),
- c. Pemerintah Desa,
- d. Dana Jaminan Sosial.

4. Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga

Sektor LNPRT terdiri dari seluruh LNP residen (kecuali yang dikendalikan oleh pemerintah) yang menghasilkan barang atau jasa nonpasar untuk rumah tangga atau masyarakat luas. LNPRT jenis pertama terdiri dari LNP yang dibentuk oleh masyarakat untuk menghasilkan barang jasa untuk kepentingan anggota. Jasa disediakan secara gratis dan dibiayai oleh anggota secara reguler. LNP semacam ini termasuk ke dalam sektor LNPRT seperti organisasi profesi, partai politik, serikat dagang, tempat ibadah, organisasi agama, organisasi sosial, organisasi budaya, tempat rekreasi, atau klub olahraga amatir. Sedangkan LNPRT jenis kedua adalah yang terlibat dalam aktivitas bantuan (*charities*), relief, atau agen bantuan yang didirikan untuk tujuan *philantropis*, serta tidak melayani kepentingan anggota yang mengendalikan LNPRT. LNPRT jenis yang ketiga mencakup yang menyediakan jasa kolektif seperti unit penelitian yang hasilnya tersedia gratis, kelompok lingkungan, dll. Jenis LNPRT ini lebih tidak umum dari jenis LNPRT sebelumnya, dan mungkin tidak selalu tampil secara signifikan di suatu negara.

5. Sektor Rumah Tangga

Rumah Tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang menggunakan tempat tinggal bersama, menyatukan sebagian atau seluruh pendapatan dan kekayaannya serta mengonsumsi barang dan jasa tertentu secara kolektif, utamanya perumahan dan makanan. Masing-masing anggota rumah tangga punya klaim atas sumber daya kolektif rumah tangga, paling tidak, keputusan yang mempengaruhi

konsumsi atau flow ekonomi lain diambil untuk rumah tangga secara keseluruhan. Sektor Rumah Tangga terdiri dari seluruh rumah tangga residen, termasuk institusi rumah tangga yang terdiri dari kelompok individu yang tinggal di rumah sakit, panti jompo, biara, penjara, dan sejenisnya untuk periode yang cukup lama.

Suatu unit usaha (unincorporated enterprises) milik rumah tangga (usaha rumah tangga) diperlakukan sebagai bagian integral dari rumah tangga bukan merupakan bagian yang terpisah dari rumah tangga, kecuali jika pembukuan cukup detail dalam mencatat aktivitas yang dilakukan, yang akan diperlakukan sebagai kuasi korporasi. Terdapat berbagai cara untuk membagi sektor Rumah Tangga ke dalam beberapa subsektor. Salah satunya, Rumah Tangga dapat dikelompokkan ke dalam subsektor sesuai sumber pendapatan terbesar.

6. Sektor Luar Negeri

Selain unit institusional residen yang dialokasikan pada kelima sektor institusi tersebut, Terdapat unit institusional nonresiden yang bertransaksi dengan unit residen. Unit tersebut disebut sebagai sektor Luar Negeri. Tidak seperti unit residen yang dibagi menjadi beberapa sektor, unit nonresiden seluruhnya dikelompokkan dalam sektor Luar Negeri.

3.1.2 Pembagian Kategori Transaksi

Baris-baris NAD pada prinsipnya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian atas (above the line) dan bagian bawah (below the line). Bagian atas berisi Tabungan Bruto dan Perolehan Aset Nonfinansial atau investasi riil. Tabungan Bruto dibagi menjadi dua, yaitu Penyusutan Aset Tetap dan Tabungan Neto. Sementara itu, Perolehan Aset Nonfinansial terdiri dari aset yang dapat diproduksi (*produced assets*) dan aset yang tidak dapat diproduksi (*nonproduced assets*). Produced assets terdiri dari aset tetap (*fixed assets*), perubahan stok, dan perolehan barang berharga. Sementara itu, contoh dari *nonproduced assets* adalah tanah. Semua rincian tersebut berasal dari ssektor riil yang biasanya dituangkan dalam neraca modal nasional dan merupakan jembatan menuju ke bagian bawah NAD atau juga bagian finansial.

Untuk kepentingan pengecekan konsistensi, sebelum masuk pada bagian finansial (below the line) terdapat baris pinjaman netto. Pinjaman netto yang merupakan selisih antara tabungan bruto dan investasi bruto. Karena matriks NAD disajikan menurut sektor, maka selalu terjadi perbedaan antara tabungan dan investasi real. Jika angka baris ini positif berarti sektor yang bersangkutan mengalami kelebihan dana (sektor surplus). Sebaliknya, jika negatif disebut sektor yang kekurangan dana (sektor defisit). Matriks NAD dapat digunakan untuk

menelusuri aliran dana dari sektor surplus ke sektor defisit melalui berbagai instrumen finansial yang nantinya digambarkan pada bagian bawah.

Nilai pinjaman neto dapat pula dihitung berdasarkan selisih jumlah penggunaan finansial (aset) dengan sumber finansial (kewajiban). Apabila angka ini negatif berarti jumlah sumber finansial lebih besar dari jumlah penggunaannya. Sebaliknya, jika selisih tersebut positif menunjukkan jumlah penggunaan lebih besar dari sumber. Pinjaman neto yang diperoleh dari perhitungan pertama (selisih tabungan bruto dan investasi nonfinansial) dapat berbeda nilainya dengan pinjaman neto yang diperoleh dari perhitungan kedua (selisih penggunaan dan sumber aset finansial). Perbedaan kedua pendekatan ini dimunculkan pada baris selisih statistik. Dengan demikian, terdapat lima baris penunjang yaitu pinjaman neto, selisih statistik, investasi finansial neto, jumlah penggunaan finansial, dan jumlah sumber finansial. Di bawah baris penunjang ini selanjutnya merupakan bagian NAD yang berisi berbagai instrumen finansial..

NAD idealnya menampung seluruh jenis instrumen finansial yang dipakai oleh masing-masing sektor dalam perekonomian Indonesia. Jika pendekatan ini ditempuh maka daftar instrumen akan menjadi sangat panjang, sehingga sulit untuk memahami dan mengambil kesimpulan dari daftar ini. Untuk itu dilakukan penggolongan jenis instrumen yang sejenis atau mempunyai sifat hampir sama, dengan mempertimbangkan instrumen-instrumen khas yang dimiliki oleh sektor tertentu. Berikut pengelompokan jenis transaksi finansial/instrumen finansial dalam NAD:

1. Emas Moneter dan SDRs (Hak Tarik Khusus)

- a. Emas moneter

Emas moneter merupakan emas yang dipegang dalam penguasaan otoritas moneter (atau pihak lain yang tunduk pada kontrol efektif dari otoritas moneter). Emas moneter ini dipegang sebagai cadangan devisa. Emas moneter terdiri dari emas batangan (emas dalam bentuk secara fisik) dan dalam bentuk non fisik (hak claims pengiriman emas pada otoritas moneter nonresiden).

- b. SDRs (Hak Tarik Khusus)

Special Drawing Rights (SDRs) merupakan aset cadangan internasional yang diciptakan oleh IMF dan dialokasikan kepada anggotanya untuk melengkapi cadangan aset yang ada. *Department of Special Drawing Rights* IMF mengelola cadangan aset dengan mengalokasi SDRs di antara negara anggota IMF dan badan internasional (secara kolektif dikenal sebagai peserta).

2. Uang dan Simpanan

a. Uang

Uang terdiri dari uang kertas dan koin dengan nilai nominal yang tetap dan diterbitkan atau di bawah otoritas bank sentral atau pemerintah (koin *commemorative* yang tidak beredar harus dikeluarkan, sebagaimana yang belum diterbitkan, atau uang *demonetized*). Suatu perbedaan harus tergambar antara mata uang domestik (yaitu mata uang yang menjadi kewajiban unit residen, seperti bank sentral, bank lain, dan pemerintah pusat) dan mata uang asing yang merupakan kewajiban unit non-residen (seperti bank sentral, bank lain, dan pemerintah dari negara lain).

b. *Transferable Deposits*

Transferable Deposits (simpanan yang mudah dicairkan) terdiri dari seluruh simpanan yang dapat ditukarkan dengan uang kertas dan uang logam atas permintaan pada nilai nominal dan tanpa *penalty* atau pembatasan serta dapat langsung digunakan untuk melakukan pembayaran melalui cek, wesel, giro order, debit/kredit langsung, atau fasilitas pembayaran langsung lainnya. *Transferable Deposits* dibedakan menjadi 2 yaitu:

1) Simpanan antar bank

Simpanan antar bank umumnya dapat diidentifikasi dan berfungsi sebagai pencatatan instrumen keuangan secara terpisah. Ini merupakan salah satu alasan dalam memisahkan pinjaman dan simpanan antar bank dari pinjaman dan simpanan lainnya. Alasan lain lebih kepada penghitungan biaya jasa perantara keuangan yang diukur tidak langsung (FISIM).

2) *Other Transferable Deposits*

Other Transferable Deposits adalah salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam transaksi, atau baik kreditur/debitur atau keduanya bukan merupakan institusi perbankan.

c. Simpanan lainnya

Simpanan lainnya terdiri dari seluruh klaim, selain *transferable deposits* yang ditunjukkan dengan bukti simpanan. Bentuk simpanan tertentu yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah tabungan (yang tidak selalu mudah dicairkan), deposito berjangka, dan sertifikat deposito yang tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Kategori ini juga mencakup bukti simpanan semacam itu yang diterbitkan asosiasi tabungan dan pinjaman, pembangunan masyarakat, serikat kredit dll. Simpanan dengan kemampuan pemindahbukuan terbatas, yang tidak

termasuk dalam kategori *transferable deposits* masuk dalam kategori ini. Klaim terhadap IMF yang merupakan komponen cadangan devisa dan tidak dibuktikan melalui pinjaman, dicatat dalam bentuk simpanan lain. (Klaim pada IMF yang dibuktikan melalui pinjaman, harus masuk dalam pinjaman). Pembayaran margin yang dibayar tunai terkait kontrak finansial derivatif (seperti dalam penjelasan di bawah), termasuk dalam simpanan lain, seperti halnya *overnight* dan perjanjian membeli kembali jangka sangat pendek jika dianggap bagian dari definisi uang nasional yang diperluas. Perjanjian membeli kembali lainnya diklasifikasi sebagai pinjaman.

3. Surat Utang (*Debt Securities*)

Surat utang atau sekuritas utang merupakan negotiable instruments yang memberikan suatu bukti utang. Surat utang mencakup tagihan, obligasi, sertifikat simpanan yang *negotiable*, *commercial paper*, *debentures*, *aset backed securities*, dan instrumen sejenis yang umum diperdagangkan di pasar keuangan.

Surat utang yang jatuh tempo dalam jangka pendek dan jangka panjang didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Surat utang jangka pendek, mencakup sekuritas yang mempunyai jatuh tempo original satu tahun atau kurang. Sekuritas dengan jatuh tempo satu tahun atau kurang diklasifikasi sebagai jangka pendek.
- b. Surat utang jangka panjang mencakup sekuritas yang mempunyai jatuh tempo original lebih dari satu tahun. Klaim dengan tanggal jatuh tempo optional terakhirnya lebih dari satu tahun dan klaim dengan tanggal jatuh tempo tidak terbatas, diklasifikasikan sebagai jangka panjang.

4. Pinjaman

Pinjaman merupakan aset finansial yang dibuat saat kreditur meminjamkan dana secara langsung pada debitur dan dibuktikan dengan dokumen yang tidak dapat diperdagangkan. Pinjaman dapat dibagi lagi atas basis pinjaman jangka pendek dan jangka panjang yang didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Pinjaman jangka pendek terdiri dari pinjaman yang mempunyai original jatuh tempo satu tahun atau kurang. Pinjaman yang dibayar kembali atas permintaan kreditur diklasifikasi sebagai jangka pendek, bahkan ketika pinjaman itu diharapkan berumur lebih dari setahun.
- b. Pinjaman jangka panjang terdiri dari pinjaman yang mempunyai masa jatuh tempo lebih setahun.

5. Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif

a. Ekuitas

Ekuitas terdiri dari semua instrumen dan catatan pengakuan atas klaim pada suatu korporasi atau kuasi-korporasi setelah seluruh klaim dari seluruh kreditur dipenuhi. Ekuitas diperlakukan sebagai kewajiban dari unit institusi yang menerbitkannya. Ekuitas dibagi lagi menjadi:

1) Saham terdaftar

Saham terdaftar merupakan saham yang diperdagangkan di pasar bursa.

2) Saham tidak terdaftar

Saham tidak terdaftar merupakan saham yang tidak diperdagangkan di bursa saham.

3) Ekuitas lainnya

Ekuitas lainnya merupakan ekuitas selain saham.

b. Unit Penyertaan Investasi Kolektif Unit penyertaan investasi kolektif merupakan investasi kolektif yang berlangsung jika para investor mengumpulkan dana untuk diinvestasikan pada aset finansial atau aset nonfinansial.

1) Investasi bersama saham (Saham MMF)

MMF merupakan dana investasi yang utamanya diinvestasikan di dalam pasar uang sekuritas jangka pendek seperti *treasury bills*, *certificates of deposit*, dan *commercial paper*. MMF terkadang secara fungsional mirip dengan *transferable deposits*, seperti akun dengan hak mengeluarkan cek yang terbatas. Jika investasi bersama saham tersebut termasuk uang beredar dalam pelaporan ekonomi, mereka dicatat sebagai bagian yang terpisah dengan statistik moneter. Saham atau unit MMF merepresentasi suatu klaim yang proporsional atas nilai MMF yang dibentuk.

2) Dana investasi bersama selain saham

Dana investasi bersama selain saham atau unit menggambarkan klaim atas suatu proporsi nilai dana investasi yang dibentuk selain dari dana pasar uang.

6. Cadangan Teknis Asuransi dan Dana Pensiun

a. Cadangan teknis asuransi non-jiwa

Cadangan teknis asuransi non-jiwa terdiri dari pembayaran di muka atas premi asuransi non jiwa dan cadangan neto guna memenuhi klaim asuransi non-jiwa yang mungkin terjadi.

b. Hak asuransi jiwa dan jaminan hari tua

Hak asuransi jiwa dan jaminan hari tua memperlihatkan perluasan klaim finansial milik pemegang polis yang ditawarkan oleh suatu perusahaan asuransi jiwa atau

yang menyediakan jaminan hari tua. Hanya transaksi untuk asuransi jiwa dan jaminan hari tua yang dicatat pada neraca finansial, yakni selisih antara premi bersih yang diterima dan klaim yang dibayar.

c. Hak pensiun

Hak pensiun menunjukkan perluasan klaim finansial yang dipegang pensiunan di masa kini dan di masa mendatang terhadap pemberi kerja atau terhadap suatu pendanaan yang ditunjuk pemberi kerja untuk membayar pendapatan pensiun sebagai bagian dari perjanjian kompensasi antara pemberi kerja dan pekerja. Transaksi hak pensiun yang dicatat pada neraca finansial adalah selisih bersih antara kontribusi yang diterima dan manfaat yang dibayarkan.

7. *Financial Derivatives* dan Opsi Saham Pekerja

a. *Financial derivatives*

Financial derivatives merupakan instrumen finansial yang ter-*underlying* dalam instrumen finansial lain, indikator atau komoditas, dimana risiko finansialnya diperdagangkan secara terpisah.

b. Kontrak Opsi Saham (KOS)

KOS merupakan kontrak yang memberikan hak kepada pembeli, untuk membeli (*call option*) atau menjual (*put option*) atas instrumen finansial tertentu atau komoditas pada harga yang ditentukan sebelumnya ("*strike price*") dalam jangka waktu tertentu. Option dijual dalam berbagai jenis *underlying* aset seperti ekuitas, suku bunga, mata uang asing, komoditas, dan indeks tertentu.

c. Forward

Suatu kontrak forward merupakan kontrak finansial tanpa syarat yang merupakan kewajiban untuk diselesaikan pada tanggal yang ditentukan. Kontrak forward dan kontrak forward lain biasanya diselesaikan melalui pembayaran tunai atau penyediaan instrumen finansial lainnya dibandingkan dengan pengiriman aktual dari aset yang diperdagangkan. Oleh karena itu forward diperdagangkan secara terpisah dari aset yang menjadi *underlying*-nya.

d. Opsi saham pekerja (*employee stock options* atau ESOs) Opsi saham pekerja merupakan suatu perjanjian yang dibuat pada tanggal tertentu (*the "grant" date*) dimana seorang pekerja dapat membeli sejumlah saham pemberi kerja pada harga yang ditentukan (*the "strike price"*) baik pada saat tertentu (*the "vesting" date*) atau di dalam periode (*the exercise period*) segera setelah tanggal pemberian hak opsi.

8. Tagihan lainnya

a. Kredit dagang dan uang muka

Kategori ini terdiri dari kredit dagang barang dan jasa yang diberikan pada Korporasi, Pemerintah, LNPRT, Rumah Tangga, dan Luar Negeri, serta uang muka untuk pekerjaan yang sedang berlangsung (jika diklasifikasi sebagai inventori) atau hal ini telah dan sedang berlangsung. Kredit dagang dan uang muka tidak mencakup kredit untuk membiayai kredit dagang yang diklasifikasi sebagai pinjaman.

b. Lainnya

Kategori ini mencakup penerimaan dan pembayaran selain yang dijelaskan sebelumnya, yaitu jumlah yang tidak berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa. Kategori ini mencakup jumlah yang terkait dengan pajak, dividen, pembelian dan penjualan sekuritas, sewa, upah dan gaji, dan kontribusi sosial. Bunga yang diperoleh namun tidak dibayarkan termasuk dalam item ini, hanya jika bunga yang diperoleh tidak ditambahkan pada nilai aset yang mana bunga dibayar (seperti yang biasa terjadi).

3.2 Sumber Data dan Metode Penyusunan

Dalam penyusunan NAD Indonesia, untuk sektor-sektor domestik digunakan metode penghitungan menurut keseimbangan transaksi yang dikeluarkan dan diterima oleh sektor-sektor dalam ekonomi sedangkan transaksi antara residen dan non-residen yang tergabung dalam sektor Luar Negeri dihitung secara terpisah. Data ini diambil dari publikasi *Balance of Payment* (BoP) dan *International Investment Position* (IIP) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Penghitungan keseimbangan instrumen dihitung dengan metode yang berbeda-beda untuk setiap instrumen maupun sektor finansial yang ada. Untuk menjaga keseimbangan tersebut, dalam penyusunan Neraca Arus Dana juga mempertimbangkan hasil dari Neraca Institusi Terintegrasi masing-masing sektor ekonomi. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing metode penghitungannya:

3.2.1 Penyusunan Arus Transaksi Finansial

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, NAD menggambarkan arus finansial yang terjadi antar sektor ekonomi selama satu periode tertentu (triwulan/tahun). Arus finansial ini disusun dengan cara menghitung selisih nilai dari masing-masing kategori transaksi dari dua neraca (bagan transaksi) pada tahun yang berurutan. Oleh karena itu, arus finansial untuk suatu periode tertentu bisa negatif atau positif. Dalam NAD, arus finansial dikelompokkan menjadi

dua kolom yaitu sumber dan penggunaan. Arus finansial sebagai sumber (*sources*) berasal dari semua kategori transaksi yang ada di sisi pasiva bagan transaksi. Sebaliknya, arus finansial sebagai penggunaan (*uses*) berasal dari semua kategori transaksi di sisi aktiva. Untuk penyusunan masing-masing instrumen finansial akan dijelaskan pada keterangan dibawah ini:

3.2.1.1 Metodologi Penyusunan Emas Moneter

Sumber data yang digunakan berasal dari publikasi Neraca Pembayaran Indonesia/*Indonesia's Balance of Payments* yang diterbitkan Bank Indonesia setiap triwulan dan Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI). Data yang digunakan berasal dari sebagian nilai cadangan devisa dalam tiap triwulan. Tahapan penghitungan emas moneter dimulai dengan menggunakan proporsi dari kenaikan/penurunan cadangan devisa. Setelah itu, dilakukan konversi satuan ke IDR dengan menggunakan kurs transaksi karena angka transaksi tersebut masih dalam satuan USD. Kemudian pisahkan total penambahan emas moneter dari kenaikan harganya.

3.2.1.2 Metodologi Penyusunan Hak Tarik Khusus (SDRs)

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan hak tarik khusus berasal dari publikasi Neraca Pembayaran Indonesia/*Indonesia's Balance of Payments* yang diterbitkan Bank Indonesia setiap triwulan dan Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) sektor eksternal. Tahapan penghitungan Hak Tarik Khusus ini sama dengan metode penghitungan emas moneter hanya berbeda di instrumen finansialnya.

3.2.1.3 Metodologi Penyusunan Uang

Sumber data yang digunakan berasal dari publikasi Neraca Pembayaran Indonesia/*Indonesia's Balance of Payments* yang diterbitkan Bank Indonesia setiap triwulan dan Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI). Data yang digunakan mencakup uang kartal yang diedarkan. Penilaian yang digunakan adalah nilai transaksi.

Tahapan penghitungan uang diawali dengan menghitung nilai total *flow* secara triwulanan yang merupakan penambahan/penurunan data uang kartal yang diedarkan. Nilai total *flow* tersebut merupakan isian untuk sisi liabilitas pada sektor Korporasi Finansial. Selain itu, data dari BoP digunakan untuk mendapatkan nilai total *flow* uang asing yang beredar di Indonesia. Kemudian, isian sisi aset pada uang dialokasikan pada sektor Korporasi Nonfinansial, Korporasi Finansial, Pemerintah, Rumah Tangga, dan LNPRT.

3.2.1.4 Metodologi Penyusunan *Transferable Deposits*

Jenis *transferable deposits* yang dimaksud mencakup *interbank position* dan *other transferable deposits*. Untuk *interbank position*, sumber data yang digunakan berasal dari publikasi Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang diterbitkan OJK setiap bulannya, sedangkan untuk *other transferable deposits*, sumber data yang digunakan berasal dari publikasi SPI yang diterbitkan OJK, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia yang diterbitkan Bank Indonesia, dan *Government Finance Statistics* (GFS) yang bersumber dari Kementerian Keuangan.

Tahapan penghitungan *interbank position* diawali dengan menghitung nilai total *flow* secara triwulanan yang merupakan selisih dua periode data posisi antar bank. Nilai total *flow* tersebut merupakan isian untuk sisi liabilitas pada sektor Korporasi Finansial. Sementara itu, isian sisi aset pada *interbank position* juga dialokasikan hanya pada sektor Korporasi Finansial.

Tahapan penghitungan *other transferable deposits* diawali dengan menghitung nilai total *flow* secara triwulanan yang merupakan selisih dua periode data posisi giro. Untuk giro dalam bentuk rupiah, nilai transaksi sama dengan nilai total *flow*, sedangkan untuk giro dalam bentuk valas, akan dikeluarkan terlebih dahulu nilai *flow* akibat *exchange rate*. Sehingga formula yang digunakan untuk menghitung transaksi pada giro dalam bentuk valas adalah sebagai berikut:

$$\text{Transaksi}_n = \text{Outstanding}_n - \text{Outstanding}_{n-1} - \text{Exchange Rate}_n$$

Nilai transaksi tersebut baik giro dalam bentuk rupiah maupun dalam bentuk valas merupakan isian untuk sisi liabilitas pada sektor Korporasi Finansial. Sementara itu, isian sisi aset pada *other transferable deposits* dialokasikan pada semua sektor.

3.2.1.5 Metodologi Penyusunan Simpanan Lainnya

Sumber data yang digunakan berasal dari publikasi Neraca Pembayaran Indonesia/*Indonesia's Balance of Payments* yang diterbitkan Bank Indonesia setiap triwulan, Statistik Perbankan Indonesia yang diterbitkan OJK setiap bulannya, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan setiap tahunnya, Laporan Realisasi APBN yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan setiap bulannya, dan *Government Finance Statistics* (GFS) yang bersumber dari Kementerian Keuangan. Data yang digunakan mencakup data *other investment*, tabungan, deposito, pembiayaan dalam negeri, dan pembiayaan luar negeri. Penilaian yang digunakan adalah nilai transaksi.

Tahapan penghitungan simpanan lainnya diawali dengan menghitung nilai total *flow* secara triwulanan yang merupakan selisih dua periode data *other investment*, tabungan,

deposito, pembiayaan dalam negeri, dan pembiayaan luar negeri. Untuk tabungan dan deposito dalam bentuk rupiah, nilai transaksi sama dengan nilai total *flow*, sedangkan untuk tabungan dan deposito dalam bentuk valas, akan dikeluarkan terlebih dahulu nilai *flow* akibat *exchange rate*. Sehingga formula yang digunakan untuk menghitung transaksi pada tabungan dan deposito dalam bentuk valas adalah sebagai berikut:

$$\text{Transaksi}_n = \text{Outstanding}_n - \text{Outstanding}_{n-1} - \text{Price Change}_n$$

Nilai transaksi tersebut baik tabungan dan deposito dalam bentuk rupiah maupun dalam bentuk valas merupakan isian untuk sisi liabilitas pada sektor Korporasi Finansial. Sementara itu, isian sisi aset pada simpanan lainnya dialokasikan pada semua sektor.

3.2.1.6 Metodologi Penyusunan Surat Utang

Jenis surat utang yang dimaksud mencakup surat utang jangka pendek dan surat utang jangka panjang. Sumber data yang digunakan berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia/*Indonesia's Balance of Payments* yang diterbitkan Bank Indonesia setiap triwulan, posisi surat berharga negara yang diterbitkan DJPPR Kementerian Keuangan setiap bulannya, Statistik Utang Sektor Publik Indonesia (SUSPI) yang diterbitkan oleh DJPPR Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, Statistik Perbankan Indonesia yang diterbitkan OJK setiap bulannya, serta master file obligasi dan efek lain yang terdaftar di dalam KSEI.

Tahapan penghitungan surat utang jangka pendek diawali dengan menghitung nilai total *flow* secara triwulanan yang merupakan selisih dua periode data posisi untuk tiap-tiap sumber data. Nilai total *flow* tersebut merupakan isian untuk sisi liabilitas pada sektor Korporasi Nonfinansial, Korporasi Finansial, Pemerintah, dan Luar Negeri. Sementara itu, isian sisi aset pada surat utang jangka pendek dialokasikan pada semua sektor dengan proporsi tertentu.

Tahapan penghitungan surat utang jangka panjang sama seperti tahapan penghitungan surat utang jangka pendek. Perbedaannya hanya pada jangka waktu masing-masing yang dibagi menurut sumber data yang ada. Dimana surat utang yang memiliki waktu maturity kurang dari satu tahun akan dimasukkan ke dalam surat utang jangka pendek, sedangkan yang lebih dari satu tahun akan dimasukkan ke dalam surat utang jangka panjang.

3.2.1.7 Metodologi Penyusunan Pinjaman

Jenis pinjaman yang dimaksud mencakup pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang. Untuk pinjaman jangka pendek, sumber data yang digunakan berasal dari publikasi Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) dan Surat Utang Luar Negeri (SULNI) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, serta dari *Government Finance Statistics*

(GFS). Sedangkan untuk pinjaman jangka panjang, sumber data yang digunakan berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia/*Indonesia's Balance of Payments* yang diterbitkan Bank Indonesia setiap triwulan, Surat Utang Luar Negeri (SULNI), posisi utang pemerintah pusat yang diterbitkan DJPPR Kementerian Keuangan setiap bulannya, Government Finance Statistics (GFS), dan Statistik Perbankan Indonesia yang diterbitkan OJK setiap bulannya.

Tahapan penghitungan pinjaman jangka pendek dimulai dengan menghitung secara triwulanan terlebih dahulu nilai total *flow* yang merupakan selisih dua periode data posisi untuk masing-masing sumber data. Nilai total *flow* tersebut merupakan isian untuk sisi liabilitas pada semua sektor kecuali LNPRT dan Luar Negeri dengan proporsi tertentu. Sementara itu, isian sisi aset pada pinjaman jangka pendek dialokasikan hanya pada sektor Korporasi Finansial dan Luar Negeri.

Tahapan penghitungan pinjaman jangka panjang mirip seperti tahapan penghitungan pinjaman jangka pendek, yaitu diawali dengan menghitung nilai total *flow* secara triwulanan yang merupakan selisih dua periode data posisi untuk masing-masing sumber data. Nilai total *flow* tersebut merupakan isian untuk sisi liabilitas pada semua sektor dengan proporsi tertentu. Sementara itu, isian sisi aset pada pinjaman jangka panjang dialokasikan hanya pada sektor Korporasi Nonfinansial, Korporasi Finansial dan Luar Negeri.

3.2.1.8 Metodologi Penyusunan Ekuitas

Sumber data yang digunakan berasal dari data OJK. Data yang dikumpulkan berupa data issuer/penerbit ekuitas, data holder/pemegang ekuitas, data *amount outstanding* pada harga pasar, dan data aksi korporasi yang didapatkan dari IDX. Data issuer/penerbit ekuitas mencatat harga dan jumlah ekuitas yang dikeluarkan/diterbitkan oleh seluruh perusahaan. Kemudian, data holder/pemegang ekuitas mencatat harga dan jumlah ekuitas yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Sedangkan, data *amount outstanding* pada harga pasar juga didapatkan melalui OJK.

Jenis ekuitas yang dihitung ada 3, yaitu ekuitas terdaftar, ekuitas tidak terdaftar untuk perusahaan terdaftar, dan ekuitas tidak terdaftar untuk perusahaan tidak terdaftar. Penghitungan instrumen ekuitas menggunakan *framework from whom to whom*. Penilaian yang digunakan adalah nilai transaksi. Tahapan penghitungan ekuitas terdaftar dimulai dengan melakukan mapping/identifikasi jenis perusahaan baik dari sisi issuer maupun sisi holder ke dalam klasifikasi perusahaan finansial (FC) atau perusahaan nonfinansial (NFC). Setelah itu, dilakukan penghitungan nilai *amount outstanding* untuk setiap jenis perusahaan baik dari sisi *issuer* maupun sisi *holder*. Setelah nilai *amount outstanding* untuk setiap jenis perusahaan didapat, maka nilai tersebut akan dialokasikan untuk tiap sektor institusi di KSEI.

Untuk mendapat nilai transaksi, maka perlu dipisahkan nilai *flow* akibat perubahan harga. Setelah semua nilai transaksi untuk setiap sektor institusi di OJK diperoleh, maka dilakukan *mapping* sektor institusi di OJK ke sektor institusi di NAD.

3.2.1.9 Metodologi Penyusunan *Money Market Fund shares/units* (MMF) & *Non-MMF Investment Fund shares/units*

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan instrumen ini berasal dari publikasi Statistik Pasar Modal yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap minggu terakhir pada akhir periode triwulanan seperti akhir Maret, akhir Juni, akhir September, dan akhir Desember. Data yang digunakan mencakup Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana per Jenis, Komposisi Kepemilikan Efek Asing/Lokal yang Tercatat di KSEI, dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Penilaian yang digunakan adalah *transaction value*. Tahapan penghitungan dimulai dengan memperoleh angka triwulanan dari selisih antara dua periode data kemudian angka tahunan merupakan jumlah dari 4 triwulan.

Pada penghitungan MMF, Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana Jenis Pasar Uang dan Syariah Pasar Uang pada masing-masing periode dijumlahkan kemudian dihitung selisih antara dua periode data sehingga diperoleh angka triwulanan untuk sisi Liabilitas pada sektor Korporasi Finansial. Sementara itu, pada sisi Aset jumlah NAB Jenis Pasar Uang dan Syariah Pasar Uang pada masing-masing periode didistribusikan menurut sektor berdasarkan proporsi Komposisi Kepemilikan Efek Asing/Lokal yang Tercatat di KSEI. Kemudian hasil proporsi tersebut dihitung selisih antara dua periode data sehingga diperoleh angka triwulanan untuk sisi Aset pada sektor Rumah Tangga, Korporasi Nonfinansial, Korporasi Finansial, LNPRT, dan Luar Negeri. Selanjutnya, angka tahunan baik untuk sisi Liabilitas maupun sisi Aset diperoleh dari penjumlahan empat triwulan.

Penghitungan Non-MMF *investment fund shares/units* sedikit berbeda dengan MMF *shares/units*, NAB Reksa Dana yang dijumlahkan pada masing-masing periode adalah jenis selain Pasar Uang dan Syariah Pasar Uang kemudian dihitung selisih antara dua periode data sehingga diperoleh angka triwulanan. Selanjutnya angka triwulanan tersebut dikalikan dengan pergerakan IHSG triwulanan untuk mendapatkan nilai Non-MMF sisi liabilitas pada sektor Korporasi Finansial yang telah berdasarkan *transaction value*. Sementara itu, pada sisi aset jumlah NAB Jenis selain Pasar Uang dan Syariah Pasar Uang pada masing-masing periode didistribusikan menurut sektor berdasarkan proporsi Komposisi Kepemilikan Efek Asing/Lokal yang tercatat di KSEI. Kemudian hasil proporsi tersebut dihitung selisih antara dua periode data sehingga diperoleh angka triwulanan. Sama halnya dengan penghitungan pada sisi

liabilitas, untuk mendapatkan nilai Non-MMF untuk sisi Aset pada *transaction value* maka angka triwulanan menurut sektor tersebut dikalikan dengan pergerakan IHSG triwulanan. Selanjutnya, angka tahunan baik untuk sisi Liabilitas maupun sisi Aset diperoleh dari jumlah empat triwulan.

3.2.1.10 Metodologi Penyusunan Asuransi Jiwa & Asuransi Non Jiwa

Sumber data yang digunakan berasal dari publikasi Statistik Perasuransian yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara tahunan. Data yang digunakan adalah jumlah cadangan teknis menurut jenis asuransi. Cadangan teknis asuransi jiwa terdiri dari asuransi jiwa; program asuransi untuk PNS/TNI/POLRI; dan asuransi jiwa syariah. Sementara itu, cadangan teknis asuransi non jiwa terdiri dari usaha asuransi kerugian dan reasuransi; dan program asuransi sosial yang bersifat mandiri; serta usaha asuransi dan reasuransi syariah.

Penghitungan asuransi jiwa maupun asuransi non jiwa dilakukan secara tahunan diperoleh dari selisih dua periode data cadangan teknis. Nilai *flow transaction* tersebut merupakan isian untuk sisi liabilitas pada Korporasi Finansial. Sementara itu, isian sisi aset pada asuransi jiwa dialokasikan hanya pada sektor rumah tangga, sedangkan sisi aset untuk asuransi non jiwa dialokasikan pada sektor rumah tangga, Korporasi Nonfinansial, dan Korporasi Finansial dengan proporsi tertentu.

3.2.1.11 Metodologi Penyusunan Dana Pensiun

Data yang digunakan bersumber dari Laporan Ikhtisar Data Keuangan Dana Pensiun dan Statistik dana Pensiun yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu nilai Aktiva/Aset Bersih. Penghitungan dana pensiun dilakukan secara tahunan yang diperoleh dari selisih dua periode data nilai aktiva/aset bersih. Nilai *flow transaction* tersebut merupakan isian untuk sisi liabilitas pada Korporasi Finansial. Sementara itu, isian sisi aset pada asuransi jiwa dialokasikan hanya pada sektor rumah tangga.

3.2.1.12 Metodologi Penyusunan Financial Derivatives

Data transaksi finansial derivatives sangat terbatas sehingga saat ini NAD Indonesia hanya mencatat transaksi yang terdapat dalam BoP dan data *warrant* yang didapatkan dari KSEI.

3.2.1.13 Metodologi Penyusunan Utang/Piutang Lainnya

Utang/piutang lainnya mencakup semua transaksi yang tidak termasuk dalam kategori yang tersebut diatas.

3.2.2 Rekonsiliasi NAD

NAD Indonesia disusun berdasarkan neraca finansial yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Oleh karena itu, konsistensi data dari berbagai sumber tersebut harus dijaga melalui suatu tahap yang disebut rekonsiliasi. Pada dasarnya, rekonsiliasi NAD bertujuan untuk menciptakan kelayakan dan konsistensi isian NAD baik ditinjau dari sektor maupun dari jenis instrumen finansial yang digunakan. Apabila dilihat menurut sektor, selisih antara jumlah penggunaan finansial dan sumber finansial harus sama dengan pinjaman neto. Sedangkan dari segi kategori transaksi, jumlah sumber harus sama dengan jumlah penggunaan. Dalam perkembangannya, seiring dengan kompilasi dan penyusunan neraca terintegrasi *Sequence Accounts and Balance Sheets* (SAB) oleh BPS, Rekonsiliasi NAD dilakukan dengan melihat keterkaitan pada sektor riil secara rinci (current account) serta mendapat dukungan secara langsung oleh berbagai stakeholder terkait diantaranya adalah Bank Indonesia serta dengan Kementerian Keuangan. Diharapkan melalui konsolidasi yang melibatkan lebih banyak unsur pemegang instrumen baik intern BPS maupun Kementerian/Lembaga terkait dapat meningkatkan kualitas NAD yang dipublikasikan.

3.2.3 Masalah dalam Proses Penyusunan

Seperti telah dijelaskan, data yang digunakan untuk penyusunan NAD diperoleh dari sumber yang sangat beragam. Umumnya, data tersebut diperoleh dalam bentuk laporan/publikasi institusi luar yang mempunyai konsep dan neraca akhir tahun baik yang sudah dikonsolidasikan maupun yang masih berbentuk neraca individu perusahaan. Masalah utama yang dihadapi dalam proses klasifikasi yang seringkali berbeda dengan konsep neraca nasional serta kurangnya cakupan data yang dibutuhkan terutama yang berkaitan dengan kepemilikan instrumen-instrumen tersebut.

Masalah kedua adalah pada saat mengidentifikasi pos-pos neraca ke dalam kode transaksi NAD. Untuk itu diperlukan pemahaman yang mendalam tentang kandungan dan makna dari setiap pos neraca tersebut. Begitu pula penggunaan istilah dan kekhususan dari setiap pos neraca yang dapat berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Proses untuk mempelajari dan memahami setiap neraca individu ini cukup memakan waktu.

Masalah ketiga adalah seringkali terjadi pos-pos dalam neraca ini kurang didukung oleh keterangan yang memadai. Bahkan, itu disajikan dalam bentuk kelompok besarnya saja

(tidak rinci). Kondisi ini sangat menyulitkan proses transformasi dari pos-pos neraca ke kode transaksi NAD serta dapat menyebabkan kekeliruan pemberian kode. Masalah lainnya adalah belum dibangunnya sistem pengadaan data NAD yang baku dan konsisten pada instansi instansi terkait, sehingga sering dibutuhkan pengolahan ulang yang bersifat khusus untuk kepentingan penyusunan NAD. Jika sistem ini dapat berjalan, maka proses penyusunan dan penyajian NAD dapat lebih dipercepat.

<https://www.bps.go.id>



BAB IV

KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA

<http://www.bps.go.id>

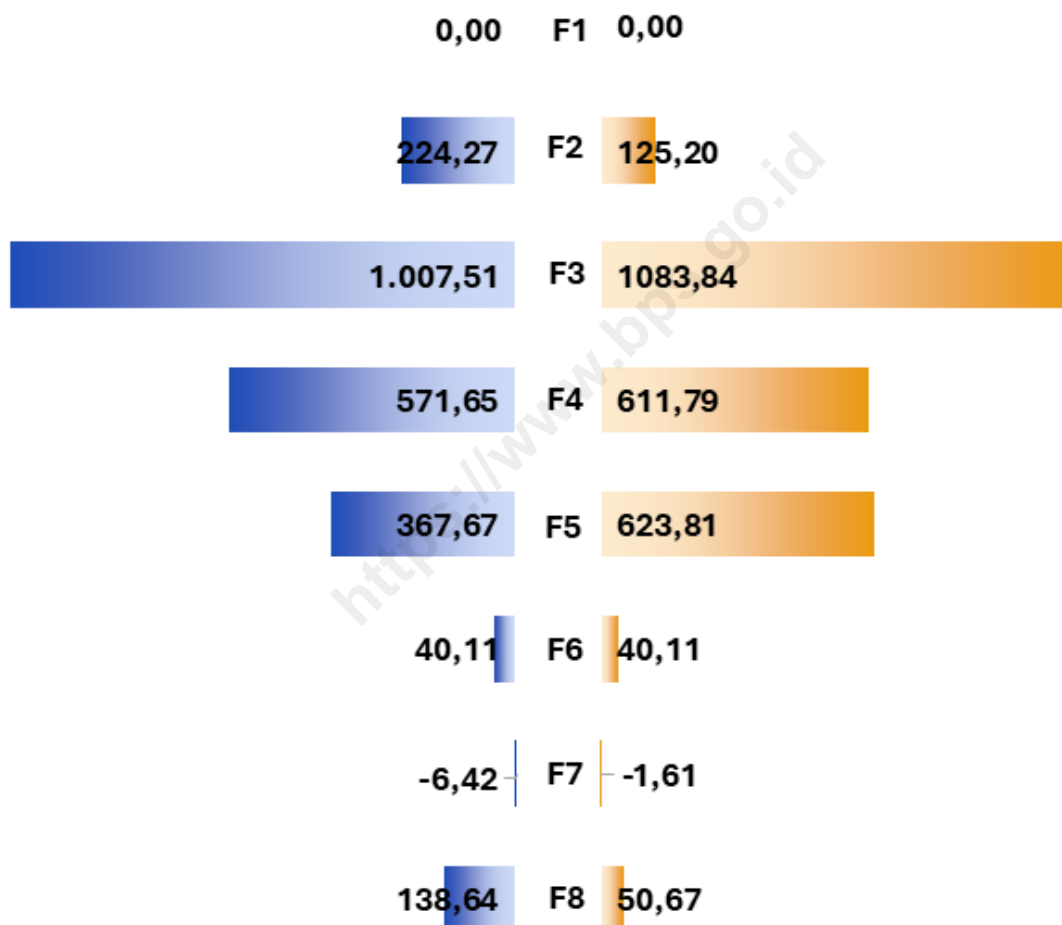
<https://www.bps.go.id>

NERACA ARUS DANA

INDONESIA 2024

Transaksi **Aset** Finansial Sektor Domestik,
Tahun 2024 (triliun rupiah)

Transaksi **Liabilitas** Finansial Sektor Domestik,
Tahun 2024 (triliun rupiah)



F1 Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus

F2 Uang dan Simpanan

F3 Surat Utang

F4 Pinjaman

F5 Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif

F6 Asuransi, Dana Pensiun dan Jaminan

F7 Transaksi Derivatif

F8 Uang/Piutang Lainnya

<https://www.bps.go.id>

BAB IV

KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA BERDASARKAN NAD INDONESIA, 2020–2024

4.1 Gambaran Umum Perekonomian Indonesia

Perekonomian global tahun 2024 berada dalam fase pemulihan moderat, meskipun tetap dibayangi oleh tekanan struktural dan geopolitik. Ekonomi global tumbuh sebesar 3,3 persen pada tahun 2024 (IMF, 2025). Selain faktor ekonomi, tahun 2024 juga menjadi momentum politik penting secara global, dengan lebih dari separuh populasi dunia sekitar 3,7 miliar orang mengikuti pemilihan umum di 72 negara termasuk negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Indonesia (UNDP, nd). Ketidakpastian arah kebijakan ekonomi pascapergantian kepemimpinan di negara-negara tersebut memengaruhi arus investasi global, nilai tukar, dan sentimen pasar keuangan, termasuk negara berkembang seperti Indonesia.

Indonesia mencatat kinerja ekonomi yang relatif solid di tengah tekanan eksternal. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 mencapai 5,03 persen (*c-to-c*), sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2023 sebesar 5,05 persen. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama pertumbuhan, tumbuh sebesar 4,94 persen, didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat. Selain itu, konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh signifikan sebesar 12,48 persen (*y-on-y*), meningkat dari 10,03 persen pada tahun 2023. Kenaikan konsumsi LNPRT ini didorong oleh peningkatan aktivitas berbagai lembaga non-profit, termasuk kegiatan partai politik dalam rangka Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, penyelenggaraan berbagai event olahraga, serta pelaksanaan PON XXI di Aceh dan Sumatera Utara. Dari sisi lapangan usaha, sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian, serta konstruksi menjadi kontributor utama terhadap PDB berdasarkan lapangan usaha.

Pada awal tahun 2024, Bank Indonesia menetapkan suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 6,00 persen. Kebijakan ini kemudian disesuaikan menjadi 6,25 persen pada April 2024, sebelum kembali diturunkan ke level 6,00 persen mulai September hingga akhir tahun. Penyesuaian suku bunga ini dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas harga dan nilai tukar di tengah dinamika global. Inflasi tahunan tercatat sebesar 1,57 persen (*y-on-y*), tetap terkendali dan berada dalam kisaran target Bank Indonesia, yaitu 2,5 persen ± 1 persen. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga relatif stabil, dengan rata-rata kurs Jisdor sepanjang tahun berada di kisaran Rp15.850 per dolar AS. Meskipun sempat mengalami

volatilitas akibat tekanan eksternal, kondisi pasar berangsur membaik setelah memasuki semester kedua tahun 2024.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada tahun 2024 mencatat surplus sebesar US\$7.210 juta, meningkat dibanding surplus tahun 2023 sebesar US\$6.301 juta. Kenaikan ini terutama ditopang oleh kinerja transaksi modal dan finansial. Aliran masuk modal asing, baik melalui investasi langsung maupun investasi portofolio, menjadi pendorong utama di tengah ketidakpastian pasar keuangan global. Surplus transaksi finansial pada tahun 2024 tercatat sebesar US\$17.629 juta, hampir dua kali lipat dari US\$9.846 juta pada tahun 2023. Di sisi lain, transaksi berjalan mencatat defisit US\$8.681 juta, atau setara dengan 0,62 persen terhadap PDB, lebih dalam dibandingkan defisit US\$2.042 juta pada tahun 2023. Sementara itu, posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2024 mencapai US\$155,72 miliar. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,47 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan. Perkembangan NPI ini mencerminkan ketahanan sektor eksternal Indonesia yang tetap terjaga.

Sepanjang tahun 2024, sektor perbankan Indonesia mencatat kinerja yang stabil, tercermin dari pertumbuhan kredit yang solid dan indikator keuangan yang positif. Kredit yang disalurkan oleh bank umum kepada pihak ketiga mencapai Rp7.831,56 triliun pada Desember 2024, tumbuh sebesar 10,46 persen dibandingkan tahun 2023 (Rp7.090,24 triliun), dengan porsi terbesar disalurkan untuk modal kerja (44,77 persen). Kinerja perbankan ini didukung oleh peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 4,48 persen menjadi Rp8.837,24 triliun pada Desember 2024, mengindikasikan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Suku bunga simpanan berjangka lebih dari 12 bulan pada Desember 2024 menurun menjadi 5,14 persen dari 5,66 persen pada tahun sebelumnya.

Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) menjadi 26,69 persen. Kinerja profitabilitas juga tetap kuat dengan *Return on Assets* (ROA) sebesar 2,69 persen dan *Net Interest Margin* (NIM) sebesar 4,62 persen. Risiko kredit juga terjaga ditunjukkan oleh rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*) yang menurun menjadi 2,08 persen pada Desember 2024 dari 2,26 persen pada tahun sebelumnya. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebesar 88,62 persen mencerminkan efektivitas penyaluran dana yang cukup baik, meskipun tetap perlu memperhatikan likuiditas, mengingat rasio aset likuid (*Liquid Assets Ratio*) berada pada level 11,27 persen. Secara keseluruhan, sektor perbankan Indonesia pada akhir 2024 berada dalam kondisi solid dengan sistem intermediasi yang efektif, risiko yang terkendali, dan permodalan yang sangat kuat.

Digitalisasi sektor keuangan terus mengalami perkembangan di Indonesia. Transaksi uang elektronik, baik dari sisi volume maupun nilai, terus meningkat. Volume transaksi uang

elektronik pada tahun 2024 mencapai 21,67 miliar, naik 6,19 persen dibandingkan tahun 2023. Dari sisi nilai, transaksi mencapai Rp2.503,96 triliun, meningkat 34,62 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, tahun 2024 menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia tetap resilien dan tumbuh stabil di tengah tekanan global yang kompleks. Ketahanan sektor eksternal, stabilitas sistem keuangan, serta peran konsumsi domestik sebagai motor pertumbuhan menjadi fondasi penting dalam menjaga kesinambungan pemulihan ekonomi nasional. Dengan penguatan koordinasi kebijakan dan percepatan transformasi digital, Indonesia memiliki landasan yang kuat untuk menghadapi tantangan ekonomi global ke depan serta mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

4.2 Perkembangan Tabungan Bruto, Investasi Nonfinansial, Gap Tabungan dan Investasi (S-I Gap)

4.2.1 Perkembangan Tabungan Bruto

Selama periode 2020–2024, tabungan bruto nasional menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2024, total tabungan bruto tercatat mencapai Rp6.950,83 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp6.339,27 triliun. Peningkatan ini mencerminkan adanya penguatan kemampuan sektor-sektor ekonomi dalam menghimpun dana internal sebagai sumber pembiayaan investasi. Semakin tinggi tabungan bruto, semakin besar ruang bagi peningkatan investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang.

Sektor korporasi nonfinansial memberikan kontribusi dominan terhadap total tabungan bruto nasional, dengan rata-rata 72,74 persen selama periode 2020–2024. Kontribusi tertinggi tercatat pada tahun 2020 sebesar 83,32 persen, sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2023 sebesar 65,53 persen. Dominasi sektor ini menunjukkan bahwa aktivitas korporasi nonfinansial masih menjadi sumber utama dalam menghimpun tabungan nasional. Tabungan yang dihasilkan umumnya diarahkan untuk mendanai investasi, baik dalam bentuk investasi fisik (seperti pembangunan pabrik, infrastruktur, dan peralatan produksi) maupun investasi finansial.

Sektor rumah tangga menempati posisi kedua dengan rata-rata kontribusi sebesar 16,08 persen per tahun selama 2020–2024. Walaupun nilainya lebih kecil dibandingkan korporasi nonfinansial, sektor ini tetap memberikan kontribusi yang signifikan karena mencerminkan kemampuan masyarakat dalam menyisihkan pendapatan untuk ditabung.

Tabungan rumah tangga juga berperan penting dalam mendukung pembiayaan melalui sistem perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

Selanjutnya, korporasi finansial berkontribusi secara rata-rata sebesar 10,00 persen per tahun. Meskipun kontribusinya tidak sebesar kedua sektor sebelumnya, sektor ini memiliki peran strategis karena menjadi perantara dalam menyalurkan tabungan ke berbagai bentuk investasi produktif. Sementara itu, sektor LNPRT, pemerintah umum, dan luar negeri menyumbang rata-rata 0,71 persen per tahun. Meskipun memberikan kontribusi yang relatif kecil, sektor-sektor tersebut tetap relevan dalam menjaga diversifikasi sumber tabungan nasional.

Tabel 4.1 Nilai (Triliun Rupiah) dan Struktur (Persen) Tabungan Bruto Menurut Sektor Tahun 2020–2024

SEKTOR	2020	2021	2022*	2023**	2024***
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Korporasi Nonfinansial	4.161,60	4.084,53	4.098,41	4.027,64	4.865,95
	83,32%	76,50%	70,34%	63,53%	70,01%
2. Korporasi Finansial	349,54	378,81	821,56	885,05	545,65
	7,00%	7,10%	14,10%	13,96%	7,85%
3. Pemerintah Umum	-438,79	-140,59	-6,41	370,47	189,98
	-8,78%	-2,63%	-0,11%	5,84%	2,73%
4. Rumah Tangga	782,52	995,63	1.008,73	954,57	1.117,41
	15,67%	18,65%	17,31%	15,06%	16,08%
5. LNPRT	75,31	71,12	101,88	70,82	97,23
	1,51%	1,33%	1,75%	1,12%	1,40%
6. Luar Negeri	64,71	-50,51	-197,52	30,72	134,61
	1,30%	-0,95%	-3,39%	0,48%	1,94%
JUMLAH	4.994,90	5.339,00	5.826,65	6.339,27	6.950,83
	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: BPS (diolah)

Catatan: * angka sementara, **angka sangat sementara, ***angka sangat sangat sementara

Tabel 4.2 memperlihatkan struktur tabungan bruto terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari masing-masing sektor yang secara umum bervariasi. Selama periode 2020–2024, struktur tabungan bruto terhadap produk domestik bruto (PDB) dari seluruh sektor berkisar 30,34 hingga 32,34 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata, sepertiga dari total output nasional berhasil dihimpun dalam bentuk tabungan bruto, yang berfungsi sebagai sumber utama pembentukan modal dalam negeri.

Pada tahun 2024, kontribusi terbesar terhadap PDB berasal dari sektor korporasi nonfinansial, yakni sebesar 21,98 persen. Selanjutnya, diikuti oleh sektor rumah tangga dan korporasi finansial, dengan kontribusi masing-masing sebesar 5,05 persen dan 2,46 persen terhadap PDB. Sementara itu, tabungan bruto yang bersumber dari sektor Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT), Pemerintah Umum, serta Luar Negeri secara keseluruhan berkontribusi sebesar 1,91 persen terhadap total PDB. Walaupun nilainya relatif kecil, keberadaan sektor-sektor tersebut tetap memberikan peranan penting dalam melengkapi struktur tabungan bruto nasional.

**Tabel 4.2 Struktur Tabungan Bruto Menurut Sektor
Terhadap PDB Tahun 2020–2024 (Persen)**

SEKTOR	2020	2021	2022*	2023**	2024***
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Korporasi Nonfinansial	26,95	24,06	20,92	19,28	21,98
2. Korporasi Finansial	2,26	2,23	4,19	4,24	2,46
3. Pemerintah Umum	-2,84	-0,83	-0,03	1,77	0,86
4. Rumah Tangga	5,07	5,86	5,15	4,57	5,05
5. LNPRT	0,49	0,42	0,52	0,34	0,44
6. Luar Negeri	0,42	-0,30	-1,01	0,15	0,61
JUMLAH	32,34	31,45	29,75	30,34	31,40

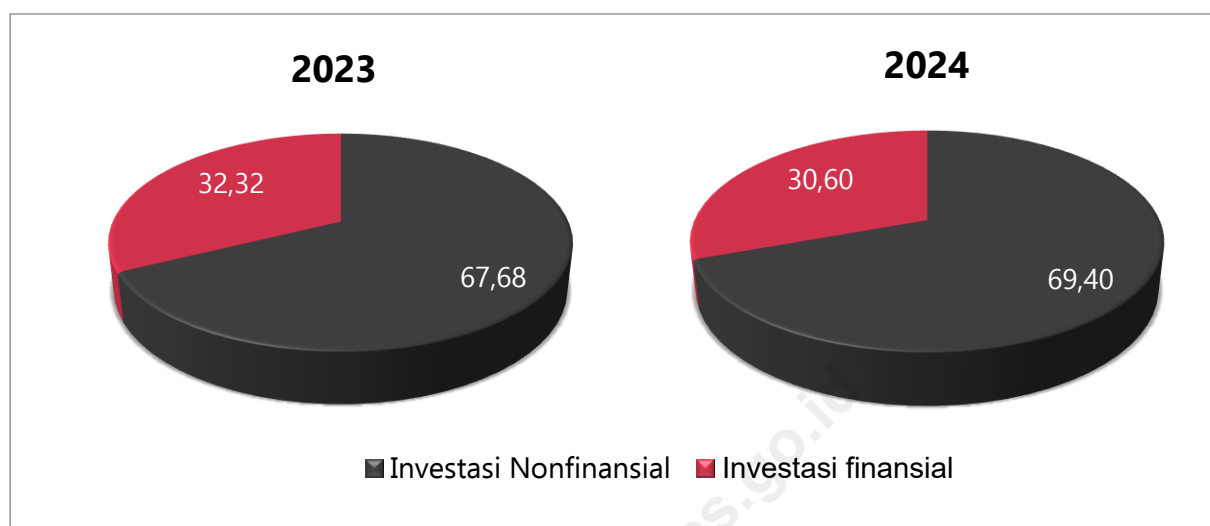
Sumber: BPS (diolah)

Catatan: * angka sementara, **angka sangat sementara, ***angka sangat sangat sementara

4.2.2 Perkembangan Investasi Nonfinansial

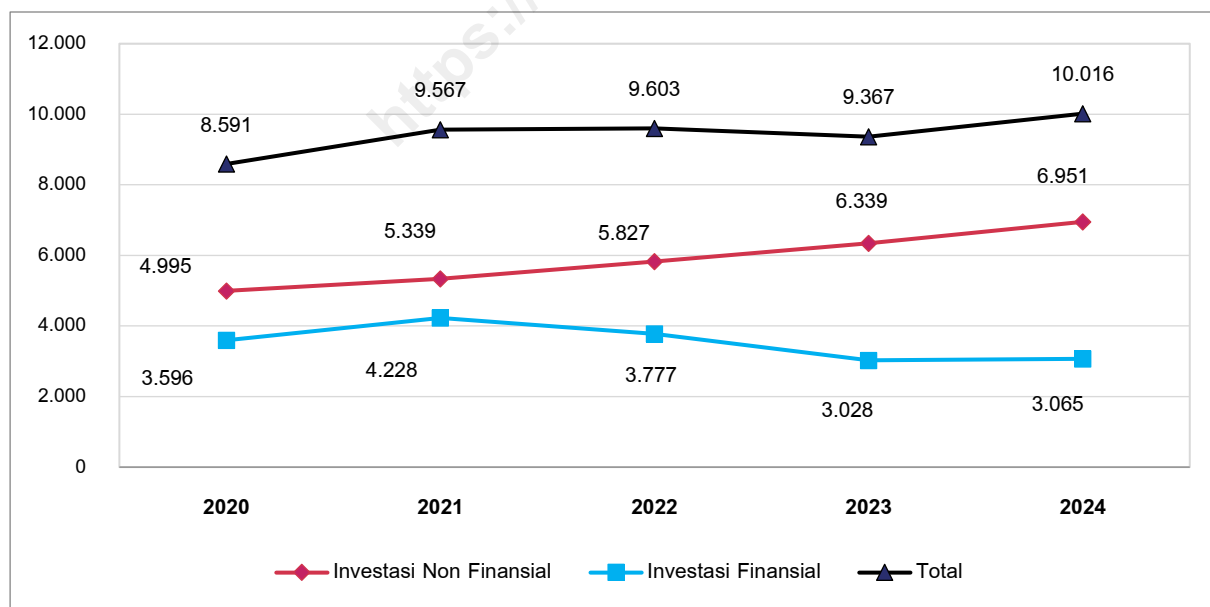
Terdapat dua jenis investasi yang tercakup dalam NAD yaitu investasi fisik atau investasi nonfinansial dan investasi finansial. Investasi nonfinansial menggambarkan nilai perubahan (penambahan dan pengurangan) aset tetap atau PMTB dan persediaan atau inventori. Sementara itu, investasi finansial menggambarkan nilai penempatan dana oleh pelaku ekonomi pada instrumen-instrumen finansial seperti saham, obligasi, pinjaman, valas,

dan sebagainya. Proporsi investasi di Indonesia, didominasi oleh investasi nonfinansial sebesar 69,40 persen pada tahun 2024. Proporsi ini relatif meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 67,68 persen. Sementara itu, proporsi investasi finansial sebesar 30,60 persen pada tahun 2024.



Sumber: BPS (diolah)

Gambar 4.1 Proporsi Investasi Indonesia (persen), 2023 dan 2024



Sumber: BPS (diolah)

Gambar 4.2 Perkembangan Investasi Indonesia (triliun rupiah), 2020–2024

Perkembangan investasi di Indonesia selama periode 2020–2024 mengalami peningkatan secara konsisten, meskipun terdapat sedikit penurunan pada periode 2022–2023. Total investasi pada tahun 2023 sebesar Rp9.367 triliun, meningkat menjadi Rp10.016 triliun pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya penguatan aktivitas investasi nasional. Jika dilihat menurut jenisnya, investasi nonfinansial menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, nilai investasi nonfinansial mencapai Rp6.951 triliun. Sementara itu, investasi finansial mengalami penurunan sejak tahun 2021. Pada tahun 2024, nilai investasi finansial sebesar Rp3.065 triliun.

Tabel 4.3 Nilai (Triliun Rupiah) dan Struktur (Persen) Investasi Nonfinansial Menurut Sektor Tahun 2020–2024

SEKTOR	2020	2021	2022*	2023**	2024***
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Korporasi Nonfinansial	3.696,02	3.904,13	4.111,58	4.664,14	4.920,20
	74,00%	73,12%	70,57%	73,58%	70,79 %
2. Korporasi Finansial	115,42	78,26	107,11	82,76	119,88
	2,31%	1,47%	1,84%	1,31%	1,72 %
3. Pemerintah Umum	427,77	538,45	524,95	610,23	736,52
	8,56%	10,09%	9,01%	9,63%	10,60 %
4. Rumah Tangga	681,74	752,26	1.008,21	900,52	1.086,01
	13,65%	14,09%	17,30%	14,21%	15,62 %
5. LNPRT	73,95	65,89	74,79	81,62	88,21
	1,48%	1,23%	1,28%	1,29%	1,27%
JUMLAH	4.994,90	5.339,00	5.826,65	6.339,27	6.950,83
	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: BPS (diolah)

Catatan: * angka sementara, **angka sangat sementara, ***angka sangat sangat sementara

Investasi nonfinansial di Indonesia pada tahun 2024 masih didominasi oleh sektor korporasi nonfinansial, dengan kontribusi sebesar 70,79 persen terhadap total investasi nonfinansial. Angka ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2023 yang mencapai

73,58 persen. Nilai investasi nonfinansial yang dilakukan oleh sektor korporasi nonfinansial pada tahun 2024 sebesar Rp4.920,20 triliun, menurun dibanding tahun 2023 yang mencapai Rp4.664,14 triliun. Sektor rumah tangga menyumbang kontribusi sebesar 15,62 persen, diikuti oleh sektor pemerintah umum dengan kontribusi sebesar 10,60 persen. Sektor korporasi finansial dan LNPRT berkontribusi sebesar 2,99 persen terhadap total investasi nonfinansial.

Selama periode 2020–2024, kontribusi investasi nonfinansial terhadap produk domestik bruto (PDB) berada pada kisaran 29,75 persen hingga 32,34 persen. Sebagian besar berasal dari aktivitas investasi fisik yang dilakukan oleh korporasi nonfinansial, yaitu sebesar 20,99 persen terhadap total PDB pada tahun 2024. Selanjutnya, sektor pemerintah umum dan rumah tangga juga berperan dalam pembentukan investasi nonfinansial, masing-masing dengan kontribusi sebesar 5,25 persen dan 4,33 persen terhadap PDB. Sementara itu, sektor korporasi finansial dan LNPRT secara bersama-sama menyumbang kontribusi sebesar 0,83 persen terhadap PDB.

**Tabel 4.4 Struktur Investasi Nonfinansial Menurut Sektor Terhadap PDB
Tahun 2020–2024 (persen)**

SEKTOR	2020	2021	2022*	2023**	2024***
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Korporasi Nonfinansial	23,93	23,00	20,99	22,32	22,22
2. Korporasi Finansial	0,75	0,46	0,55	0,40	0,54
3. Pemerintah Umum	2,77	3,17	2,68	2,92	3,33
4. Rumah Tangga	4,41	4,43	5,15	4,31	4,91
5. LNPRT	0,48	0,39	0,38	0,39	0,40
6. Luar Negeri	–	–	–	–	–
JUMLAH	32,34	31,45	29,75	30,34	31,40
PDB (Triliun Rp)	15.443,35	16.976,75	19.588,46	20.892,35	22.138,96

Sumber: BPS (diolah)

Catatan: * angka sementara, **angka sangat sementara, ***angka sangat sangat sementara

4.2.3 Perkembangan Gap Tabungan dan Investasi (*S-I Gap*) Tahun 2020–2024

Saving and Investment (S-I Gap) menggambarkan kesenjangan antara total tabungan bruto yang dihimpun oleh sektor-sektor institusi dalam perekonomian, seperti perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga, dengan jumlah investasi nonfinansial yang dibutuhkan oleh sektor-sektor tersebut. *S-I Gap* dapat bernilai positif maupun negatif, bergantung pada kondisi tabungan relatif terhadap kebutuhan investasi. *S-I Gap* positif menunjukkan bahwa jumlah tabungan suatu sektor melebihi kebutuhan investasinya, sehingga sektor tersebut memiliki surplus dana yang dapat dipinjamkan atau dialihkan kepada sektor lain. Sebaliknya, *S-I Gap*

negatif mencerminkan kekurangan dana, sehingga sektor yang bersangkutan harus meminjam atau memperoleh aliran dana dari sektor lain guna membiayai kebutuhan investasi nonfinansial.

Tabel 4.5 S-I Gap Menurut Sektor Tahun 2020–2024 (Triliun Rupiah)

SEKTOR	2020	2021	2022*	2023**	2024***
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Korporasi Nonfinansial	465,58	180,40	-13,17	-636,50	-54,25
2. Korporasi Finansial	234,12	300,54	714,45	802,29	425,76
3. Pemerintah Umum	-866,56	-679,04	-531,36	-239,76	-546,54
4. Rumah Tangga	100,78	243,37	0,52	54,05	31,40
5. LNPRT	1,36	5,23	27,09	-10,80	9,02
6. Luar Negeri	64,71	-50,51	-197,52	30,72	134,61
JUMLAH	–	–	–	–	–

Sumber: BPS (diolah)

Catatan: * angka sementara, **angka sangat sementara, ***angka sangat sangat sementara

Secara umum, Saving and Investment (*S-I Gap*) di Indonesia menunjukkan variasi yang berbeda di setiap sektor institusi sepanjang periode 2020–2024. Dalam kondisi normal, sektor Korporasi Nonfinansial dan Pemerintah Umum cenderung mengalami defisit, yang mencerminkan tingginya kebutuhan pembiayaan investasi dibandingkan kemampuan untuk menghimpun tabungan domestik. Pada tahun 2024, sektor Korporasi Nonfinansial mengalami defisit sebesar Rp54,25 triliun, hal yang sama juga terjadi pada dua tahun sebelumnya tercatat defisit sebesar Rp636,50 triliun pada tahun 2023 dan defisit Rp13,17 triliun pada tahun 2022.

Sementara itu, Korporasi Finansial dan Rumah Tangga secara konsisten mengalami surplus selama periode 2020–2024. Pada tahun 2024, Korporasi Finansial mencatat surplus Rp425,76 triliun, sedangkan Rumah Tangga mengalami surplus sebesar Rp31,40 triliun. Surplus tersebut menggambarkan peran kedua sektor ini sebagai pemberi pinjaman neto (*net lenders*) dalam perekonomian, yaitu menyediakan dana yang dapat digunakan untuk menutup defisit sektor lain.

Sebaliknya, Pemerintah Umum terus mengalami defisit sepanjang 2020–2024. Pada tahun 2024, defisit mencapai Rp546,54 triliun, yang menggambarkan besarnya kebutuhan pembiayaan fiskal. Kondisi ini menunjukkan peran pemerintah sebagai sektor yang seringkali menjalankan kebijakan ekspansif melalui peningkatan belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meskipun harus ditopang oleh pembiayaan dari sektor-sektor surplus.

Pada tahun 2024, sektor LNPRT dan Luar Negeri mengalami surplus, masing-masing sebesar Rp9,02 triliun dan Rp134,61 triliun. Surplus sektor luar negeri mengindikasikan adanya arus modal masuk yang dapat mendukung kebutuhan pembiayaan domestik, namun juga mencerminkan ketergantungan perekonomian nasional terhadap pembiayaan eksternal, yang pada jangka panjang perlu dikelola secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerentanan eksternal.

4.3 Investasi Finansial

4.3.1 Perkembangan Investasi Finansial Indonesia 2020–2024

Investasi finansial di Indonesia pada tahun 2024 kembali mengalami peningkatan setelah tiga tahun berturut-turut mengalami penurunan, meskipun tetap menurun secara proporsi dibanding investasi nonfinansial. Nilai investasi finansial tertinggi selama lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar Rp4.227,64 triliun, kemudian menurun hingga Rp3.027,52 triliun rupiah pada tahun 2023. Nilai investasi finansial pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp3.065,30 triliun dengan besaran kontribusi sebesar 30,60 persen terhadap total investasi.

4.3.2 Struktur Investasi Finansial Indonesia 2020–2024

Selama lima tahun terakhir, terjadi pergeseran struktur investasi finansial yang cukup signifikan. Investasi pada instrumen uang dan simpanan (F2) mengalami penurunan sejak tahun 2021. Nilai investasi pada tahun 2024 sebesar Rp268,43 triliun. Pada instrumen surat utang (F3), terjadi peningkatan investasi pada tahun 2024 dan menjadikan instrumen tersebut sebagai instrumen dominan, melebihi ekuitas dan unit penyertaan investasi kolektif (F5). Hal yang sama terjadi pada tahun 2020. Investasi pada instrumen lainnya berada pada level yang moderat.

Sektor institusi dengan penambahan aset terbesar pada tahun 2024 adalah Korporasi Finansial. Korporasi Finansial kembali mengalami peningkatan penambahan aset finansial setelah mengalami penurunan pada tahun 2023. Sektor Rumah Tangga dan Pemerintah Umum masih mengalami penurunan penambahan aset finansial sejak tahun 2020, meskipun sempat mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2022 untuk Pemerintah Umum dan pada tahun 2023 untuk Rumah Tangga. Di sisi lain, sektor luar negeri menunjukkan tren penambahan investasi aset finansial yang positif sejak tahun 2020, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2022. Peningkatan penambahan aset finansial sektor luar

negeri pada tahun 2024 cukup signifikan hingga melebihi angka penambahan aset finansial pada sektor Rumah Tangga.

Tabel 4.6 Nilai Investasi Finansial Menurut Jenis Instrumen Finansial
Tahun 2020–2024 (Triliun Rupiah)

JENIS INSTRUMEN	2020	2021	2022*	2023**	2024***
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
F1 Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus	–	181,53	–	–	–
F2 Uang dan Simpanan	1.021,46	1.246,31	923,95	539,68	268,43
F3 Surat Utang	1.286,49	1.078,52	742,72	408,49	1.218,01
F4 Pinjaman	292,91	84,55	780,19	805,85	696,58
F5 Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif	724,05	1.366,03	1.100,69	1.164,57	708,09
F6 Asuransi, Dana Pensiun dan Jaminan	-4,25	110,18	-23,38	18,05	40,10
F7 Finansial Derivatif	-32,39	-47,90	-27,20	-35,94	-21,46
F8 Utang/Piutang lainnya	307,83	208,41	279,83	126,82	155,55
JUMLAH	3.596,10	4.227,64	3.776,80	3.027,52	3.065,30

Sumber: BPS (diolah)

Tabel 4.7 Penambahan/Pengurangan Aset Finansial Menurut Sektor
Tahun 2020–2024 (Triliun Rupiah)

SEKTOR	2020	2021	2022*	2023**	2024***
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Korporasi Nonfinansial	683,19	1.201,14	1.312,53	1.123,32	812,30
2. Korporasi Finansial	1.444,89	1.762,91	1.509,97	841,86	1.067,28
3. Pemerintah Umum	291,77	166,55	168,39	37,54	27,02
4. Rumah Tangga	804,95	712,25	530,79	556,53	424,86
5. LNPRT	7,33	9,23	14,30	3,32	11,96
6. Luar Negeri	363,98	375,56	240,81	464,95	721,88
JUMLAH	3.596,10	4.227,64	3.776,80	3.027,52	3.065,30

Sumber: BPS (diolah)

Sektor Korporasi Nonfinansial mengalami penurunan liabilitas finansial yang cukup signifikan pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, penambahan liabilitas sektor Korporasi Nonfinansial mencapai Rp908,68 triliun, sementara

pada tahun 2023 mencapai Rp1.407,89 triliun. Penurunan liabilitas juga terjadi pada sektor rumah tangga dengan nilai sebesar Rp242,07 triliun pada tahun 2024, sedangkan pada tahun 2023 mencapai Rp365,54 triliun. Pada tahun 2024, Korporasi Finansial menerbitkan liabilitas baru sebesar Rp846,70 triliun, terjadi kenaikan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp468,04 triliun. Ketiga sektor lainnya (pemerintah umum, LNPRT, dan luar negeri) juga mengalami peningkatan liabilitas pada tahun 2024 dibanding nilai pada tahun 2023.

Tabel 4.8 Penambahan/Pengurangan Liabilitas Finansial Menurut Sektor
Tahun 2020–2024 (Triliun Rupiah)

SEKTOR	2020	2021	2022*	2023**	2024***
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Korporasi Nonfinansial	581,36	1.020,05	1.383,62	1.407,89	908,69
2. Korporasi Finansial	1.281,14	1.590,50	861,98	468,04	846,70
3. Pemerintah Umum	1.237,51	881,86	698,73	386,27	532,30
4. Rumah Tangga	207,79	351,68	396,10	365,54	242,07
5. LNPRT	0,20	-6,09	-0,53	3,81	4,06
6. Luar Negeri	288,11	389,64	436,90	395,96	531,50
JUMLAH	3.596,10	4.227,64	3.776,80	3.027,52	3.065,30

Sumber: BPS (diolah)

4.4 Kecepatan Uang Beredar (*Velocity of Money*) dan Pendalaman Sektor Keuangan (*Financial Deepening*)

4.4.1 Kecepatan Uang Beredar (*Velocity of Money*) Indonesia Tahun 2020–2024

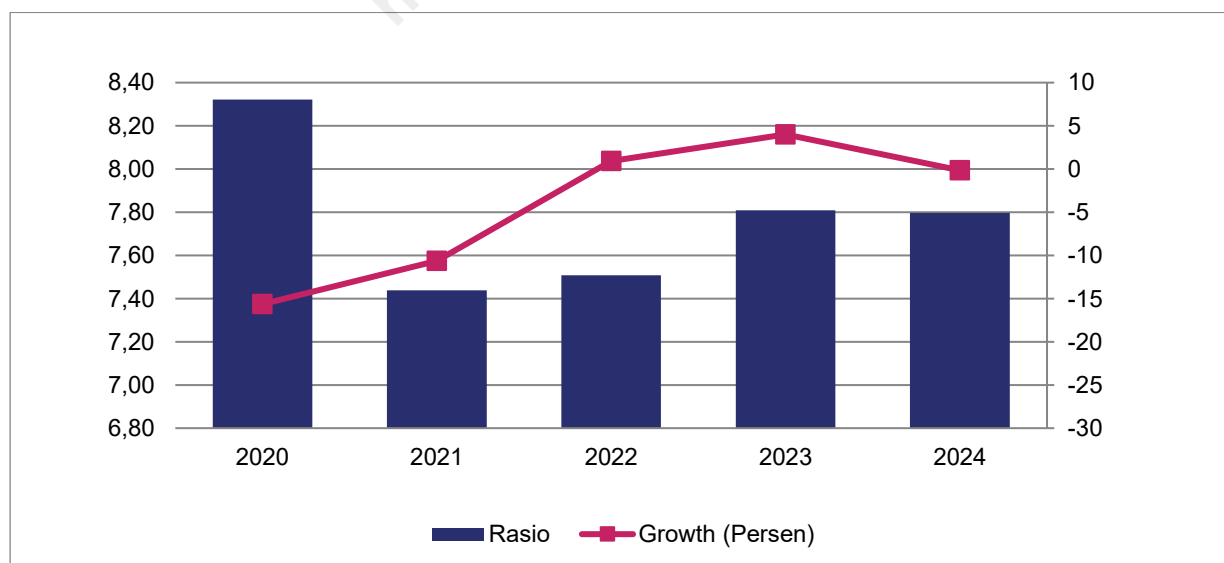
Velocity of money (*V*) merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa cepat rata-rata perputaran uang yang terjadi di masyarakat pada periode berjalan. Semakin rendah tingkat kecepatan uang menunjukkan perputaran uang yang lambat atau masyarakat cenderung menahan uang mereka daripada menggunakannya untuk transaksi. Sebaliknya, tingkat kecepatan peredaran uang yang tinggi menunjukkan masyarakat cenderung segera menggunakan uangnya untuk bertransaksi. *Velocity of Money* juga menjadi salah satu ukuran untuk menentukan pergerakan harga. Fluktuasi *velocity of money* seringkali diikuti dengan fluktuasi suku bunga. Nilai *velocity of money* dapat dihitung dengan membagi angka Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap angka Uang Beredar Sempit (M1).

Tabel 4.9 Uang Beredar dan Produk Domestik Bruto Tahun 2020–2024

Tahun	PDB (Triliun Rupiah)	M1 (Triliun Rupiah)	V	Growth (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2020	15.443	1.856	8,32	-17,72
2021	16.977	2.282	7,44	-10,61
2022	19.588	2.609	7,51	0,94
2023	20.892	2.675	7,81	4,00
2024	22.139	2.840	7,80	-0,16

Sumber: BPS dan BI (diolah)

Sepanjang periode 2020–2024, PDB dan M1 secara umum memiliki tren meningkat, namun tingkat kecepatan peredaran uang berfluktuasi. Perlambatan peredaran uang signifikan terjadi pada tahun 2020–2021. Perlambatan kecepatan uang beredar menunjukkan adanya penurunan aktivitas ekonomi yang sejalan dengan diterapkannya berbagai regulasi pada masa pandemi. Pada tahun 2023, kecepatan uang beredar mulai berangsur meningkat, namun pada tahun berikutnya mengalami perlambatan.



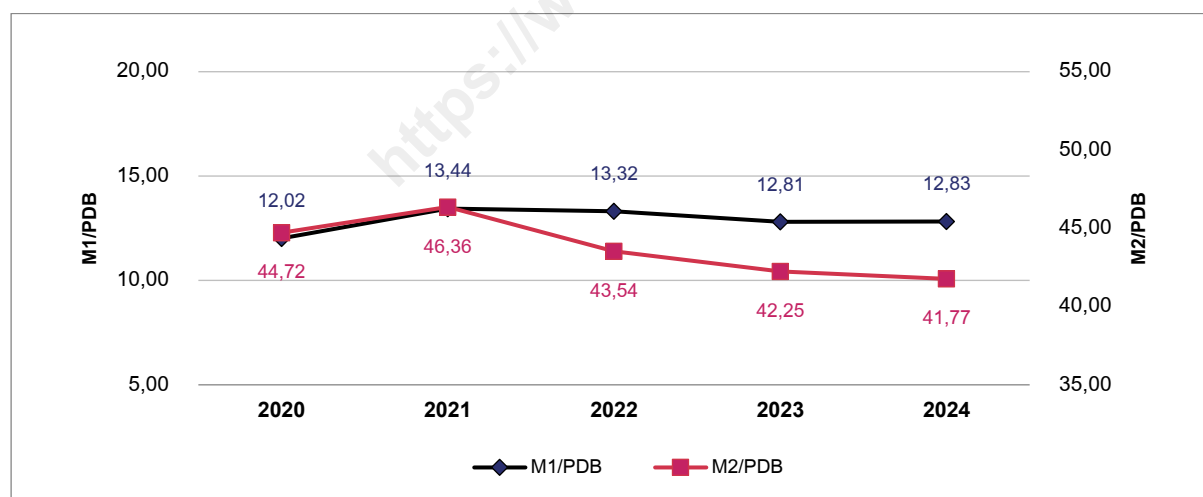
Sumber: BPS dan BI (diolah)

Gambar 4.3 Velocity of Money, 2020–2024

4.4.2 Financial Deepening Indonesia 2020–2024

Pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*) merupakan salah satu langkah penting dalam upaya mengembangkan pasar keuangan suatu negara. Penguatan pasar keuangan dilakukan sebagai upaya untuk menarik akses likuiditas di perekonomian dan memperkecil risiko gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan yang berasal dari gejolak nilai tukar maupun fluktuasi di pasar saham atau obligasi.

Upaya yang perlu dilakukan untuk memperkuat pasar keuangan adalah dengan memperkaya instrumen investasi, seperti instrumen berjangka panjang maupun instrumen *structured product* dan *derivative product* yang dapat digunakan sebagai instrumen *hedging* atau sebagai asuransi transaksi keuangan. Hal ini perlu diupayakan karena keterbatasan instrumen investasi akan mengakibatkan investor menjadi kurang aktif dalam melakukan transaksi sehingga pasar keuangan menjadi tidak likuid. Indikator yang lazim digunakan untuk melihat kedalaman sektor keuangan adalah rasio kewajiban likuid dari sistem keuangan terhadap Produk Domestik Bruto, dalam hal ini M2/PDB. M2 merupakan ukuran uang beredar dalam arti luas yang mencakup uang beredar sempit (M1) serta uang kuasi dan surat berharga selain saham.



Sumber: BI dan BPS (diolah)

Gambar 4.4 Rasio M1 dan M2 terhadap PDB (persen), 2020–2024

Rasio M1 dan M2 terhadap PDB periode 2020–2024 mengalami fluktuasi. Rasio M1 terhadap PDB meningkat dari 12,12 persen pada tahun 2020 ke titik tertinggi mencapai 13,44 persen pada tahun 2021, namun kemudian menurun menjadi 12,81 persen pada tahun 2023

dan sebesar 12,83 persen pada tahun 2024. Sementara itu, rasio M2 terhadap PDB berkisar antara 41 sampai 46 persen. Rasio M2 terhadap PDB pada tahun 2020 sebesar 44,72 persen, mengalami peningkatan pada tahun 2021 hingga mencapai 46,36 persen, tetapi kemudian secara bertahap menurun hingga menjadi 41,77 persen pada tahun 2024.

Selama periode 2020–2024, rasio M1 dan M2 terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berfluktuasi, yang mencerminkan dinamika likuiditas dalam perekonomian Indonesia. Rasio M1 terhadap PDB meningkat dari 12,12 persen pada tahun 2020 mencapai posisi tertinggi pada tahun 2021, sebesar 13,44 persen, namun kemudian mengalami penurunan menjadi 12,81 persen pada tahun 2023 dan sedikit terkoreksi ke level 12,83 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa peredaran uang kartal dan giral cenderung meningkat pada masa awal pemulihan ekonomi pasca pandemi, namun kemudian relatif menurun seiring dengan normalisasi aktivitas ekonomi dan preferensi masyarakat terhadap instrumen keuangan jangka panjang.

Rasio M2 terhadap PDB selama periode 2020–2024 berkisar 41-46 persen. Pada tahun 2020, rasio ini sebesar 44,72 persen, kemudian naik menjadi 46,36 persen pada tahun 2021, namun secara bertahap menurun hingga mencapai 41,77 persen pada tahun 2024. Pola tersebut menggambarkan adanya penyesuaian struktur likuiditas dalam perekonomian, dimana pertumbuhan tabungan dan simpanan berjangka melambat dibandingkan dengan ekspansi PDB nominal.

Dinamika rasio M1 dan M2 terhadap PDB memiliki implikasi penting terhadap transmisi kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, serta daya dorong konsumsi dan investasi. Penurunan rasio M2, misalnya, dapat mengindikasikan pergeseran preferensi masyarakat dari simpanan beralih pada aset produktif atau investasi lainnya, yang berpotensi meningkatkan aktivitas sektor riil. Sebaliknya, tingginya rasio M1 dapat menunjukkan meningkatnya likuiditas jangka pendek di masyarakat, yang jika tidak diimbangi oleh pertumbuhan output, berpotensi memicu tekanan inflasi.

<https://www.bps.go.id>



DAFTAR PUSTAKA

<https://www.bl.go.id>

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, W.I. *National Income and Economic Accounting*, Prentice Hall Inc., Englewood, New Jersey, 1969.
- Australian Bureau of Statistic, *Australian System of National Accounts Concepts, Sources and Methods*, Canberra, 2014.
- Badan Pusat Statistik, *Studi Neraca Arus Indonesia 1980*, Jakarta, 1987.
- _____, *Neraca Arus Dana Indonesia Tahunan*, berbagai seri, Jakarta.
- _____, *Berita Resmi Statistik: Perkembangan Indeks Harga Konsumen Desember 2024*, Jakarta, 2025.
- Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Indonesia 2024*, Jakarta, 2025.
- Board of Governors of the Federal Reserve System, *Guide to the Flow of Funds Accounts*, Washington, D.C, 2000.
- Central Bank of the Philippines, *The Flow of Funds of the Philippines 1980 - 1983*, Manila, 1985.
- _____, *Flow of Funds Manual of Accounts*, Manila, 1983.
- Commission of the European Communities, International Monetary Fund, Organization for Economic Co-operation and Development, United Nations, and World Bank, *System of National Accounts*, Brussels/Luxembourg, New York, Paris, Washington, D.C, 1993.
- Copeland, M.A., *A study of Money of Flows in the United States*, New York, 1952.
- Dawson, J.C., *Furthering the Development of Flow of Funds Analysis for Indonesia*, Final Report of a Mission Funded By USAID, Jakarta, 1991.
- Geehan, Randy, *An Analysis of the Indonesia Flow of Funds*, Occational Paper for the Seminar, Jakarta, Mei, 1990.
- Geehan, Saldua, and Balances, *The Indonesian Flow of Funds*, Manual of Operation, Consultant Report, Jakarta, 1990.
- International Monetary Fund (IMF), *World Economic Outlook Update: the Global Economy in a Sticky Spot*, 2024.
- _____, *Financial Development Index Database*, 2023.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *APBN Kita Kinerja dan Fakta Kaleidoskop 2024*, 2025.
- OJK Republik Indonesia, *Statistik Perbankan Indonesia Desember 2024*, Jakarta, 2025.
- _____, *Laporan Surveillance Perbankan Indonesia (LSPI) Triwulan IV-2024*, Jakarta, 2025.
- Powelson, J.P., *National Income and Flow of Funds Analysis*, Mc.Graw Hillbook Company Inc., New York, 1960.
- Ritter, Lawrence S. & Silber, William L., *Principles of money Banking and Financial Markets*, Harper Collins Publishers, 1991.

Samuelson, Paul A. & William D., *Ekonomi (Terjemahan)*, Edisi Kedua belas, Penerbit Erlangga, 1986.

United Nation, *Provisional International Guidelines on the National and Sectoral Balance Sheet and Reconciliation Accounts of the System of National Accounts*, Statistical Paper, Series M No. 60, New York, 1977.

_____, *Handbook of National Accounting, Public Sector, Studies Methods*, Series F No. 50, New York, 1988.

_____, *Financial Production, Flows and Stock in the System of National Accounts*, New York, 2014

<https://www.bps.go.id>



LAMPIRAN I

DEFINISI SEKTOR NERACA ARUS DANA (NAD)

<https://www.bps.go.id>

<https://www.bps.go.id>

DEFINISI SEKTOR NERACA ARUS DANA (NAD) INDONESIA

Sektor Korporasi Nonfinansial

Korporasi nonfinansial adalah korporasi yang aktivitas utamanya memproduksi barang atau jasa nonfinansial. Seluruh Korporasi Nonfinansial residen termasuk dalam sektor Korporasi Nonfinansial, dan di dalam praktek mencakup sebagian besar korporasi. Selain itu, mencakup lembaga nonprofit (LNP) yang terlibat produksi pasar nonfinansial seperti rumah sakit, sekolah, atau perguruan tinggi yang memungkinkan mereka menutup biaya produksi, atau asosiasi bisnis yang dibiayai korporasi nonfinansial, atau *un-incorporated enterprises* yang berperan mempromosikan dan melayani kepentingan enterprise. Cakupan dari Korporasi Nonfinansial diantaranya:

1.1 Badan Usaha Milik Negara (*State Enterprises*)

Mencakup badan usaha milik pemerintah pusat yang bentuk badan hukumnya ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Dasar Pembentukan BUMN. Sementara itu, tatacara pembinaan dan pengawasan BUMN diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983. Berdasarkan UU No. 9 tahun 1969, bentuk badan hukum perusahaan milik negara dibedakan menjadi: Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), Perusahaan Perseroan (PESERO), dan Perusahaan Perseroan Terbuka (Tbk).

Pertamina dan BULOG termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Negara BUMN. Badan hukum Pertamina dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1971, sedangkan BULOG dibentuk berdasarkan Keppres RI No. 11 Tahun 1969. Selain itu, masih ada BUMN yang disebut, PN atau PT (murni) yang berdiri sebelum lahirnya UU No. 9 tersebut, dan bentuk badan hukumnya diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

BUMN yang dicakup di sini hanya yang bergerak di bidang nonfinansial, dan jenis usahanya lebih berorientasi pada usaha-usaha yang menyangkut kebutuhan masyarakat luas, seperti: usaha pengangkutan, pos dan telekomunikasi, listrik dan sebagainya. BUMN yang

bergerak di bidang finansial seperti perbankan, sudah dikategorikan sebagai sektor tersendiri yaitu sektor Bank.

1.2 Badan Usaha Milik Daerah (*Local Government Enterprises*)

Sektor ini mencakup semua badan usaha milik pemerintah daerah, yang pengelolaan dan pembinaannya berada di bawah pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 5 tahun 1962. Jenis kegiatannya antara lain meliputi penyediaan air minum, pengelolaan pasar, penyediaan objek wisata/taman hiburan dan sebagainya. Pada umumnya, perusahaan ini berbentuk perusahaan daerah (PD) yang diatur berdasarkan peraturan daerah.

1.3 Bisnis (*Business Enterprises*)

Sektor ini mencakup Koperasi dan Perusahaan Swasta Nonfinansial.

1.3.1 Koperasi (*Cooperative*)

Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1967 jo.UU No.25 Tahun 1992, yang dimaksud dengan Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melakukan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam sektor ini, koperasi dibagi menjadi dua, yaitu Koperasi Perkotaan (nonKUD) dan Koperasi Pedesaan (KUD). Pembagian ini umumnya didasarkan pada wilayah kerjanya.

Koperasi yang berbentuk bank (seperti BUKOPIN) dan asuransi (Koperasi Asuransi Indonesia) berturut-turut masuk ke sektor bank umum dan asuransi. Untuk meningkatkan efisiensi, maka koperasi primer dapat membentuk berbagai jenis koperasi sekunder. Jenis koperasi sekunder dapat berupa pusat (daerah tingkat II), gabungan (provinsi), dan induk (nasional).

1.3.1.1 Koperasi Perkotaan (*Nonrural Cooperative*)

Koperasi non-KUD umumnya adalah koperasi yang menghimpun anggota dan warga masyarakat nonpedesaan berdasarkan fungsi atau peran tertentu serta pembagian kerja atau profesi dalam masyarakat. Koperasi tersebut dapat digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu:

- (i) Koperasi fungsional seperti pegawai negeri, ABRI, karyawan, dan lainnya.
- (ii) Golongan menurut bidang usaha seperti jasa, produksi, industri kecil dan kerajinan rakyat.

(iii) Koperasi serba usaha dan simpan-pinjam.

1.3.1.2 Koperasi Pedesaan (*Rural Cooperative*)

Koperasi Pedesaan (KUD) adalah jenis koperasi yang berkedudukan di desa dan yang menghimpun warga desa untuk menjalankan berbagai fungsi usaha, terutama di sektor pertanian, seperti koperasi pertanian, koperasi kopra, koperasi perikanan/ nelayan, koperasi peternak, koperasi pengrajin dan simpan-pinjam.

1.3.2 Perusahaan Swasta Nonfinansial (*Private Nonfinancial Enterprises*)

Mencakup semua perusahaan nonfinansial yang berbadan hukum milik masyarakat. Kegiatan utamanya adalah memproduksi barang dan jasa dengan tujuan mencari untung. Usaha ini bisa dimiliki oleh perorangan, kelompok, gabungan perusahaan, usaha keluarga, dan sebagainya dengan maksud untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Bentuk badan hukumnya bisa berupa Perseroan Terbatas (PT), Firma (Fa), CV dan NV. Dalam kelompok ini tidak termasuk usaha rumah tangga, karena usaha rumah tangga dimasukkan sebagai bagian dari sektor rumah tangga.

Sektor Korporasi Finansial

Sektor Korporasi Finansial mencakup seluruh korporasi residen yang aktivitas utamanya menyediakan jasa keuangan, termasuk jasa perantara keuangan, asuransi, dan dana pensiun, serta unit yang memfasilitasi perantara keuangan. Selain itu, sektor (termasuk LNP) lain yang terlibat dalam produksi pasar keuangan, seperti yang dibiayai oleh pelanggan *enterprise* finansial yang berperan mempromosi dan melayani kepentingan *enterprise*.

2.1 Bank Sentral (*Central Bank*)

Bank Sentral adalah lembaga yang melaksanakan fungsi-fungsi sbb: (1) mengeluarkan dan mengedarkan uang kartal sebagai alat pembayaran yang sah, (2) memelihara dan menjaga posisi cadangan devisa, (3) melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga-lembaga keuangan, dan (4) sebagai pemegang kas pemerintah.

Di Indonesia, fungsi Bank Sentral dilaksanakan oleh Bank Indonesia (BI). Selain memiliki sejumlah fungsi, BI juga memiliki sejumlah kewajiban antara lain kewajiban atas uang kartal (uang logam dan uang kertas) yang berada di luar BI dan Kas Negara, serta simpanan giro BPUG dan sektor swasta pada BI. Kewajiban-kewajiban tersebut seringkali disebut sebagai uang primer.

Oleh karena kewenangan Bank Sentral di Indonesia dipegang oleh Bank Indonesia (BI), maka dalam Neraca Arus Dana (NAD) Indonesia, neraca Bank Sentral hanya terdiri dari neraca BI.

2.2 Perbankan (*Banks*)

Sektor ini mencakup Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional, dan BPR Syariah, baik perusahaan milik pemerintah maupun swasta.

2.2.1 Bank Umum Konvensional (*Deposit Money Banks*)

Bank Umum Konvensional adalah bank umum yang mempunyai kedudukan khusus dalam sistem keuangan karena dapat menciptakan uang giral dan uang kuasi. Bank Umum Konvensional terdiri dari Bank Pesero, Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) devisa, BUSN nondevisa, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Campuran, dan Bank Asing. Secara umum, kegiatan utama bank-bank tersebut (kecuali bank nondevisa) adalah menghimpun dana masyarakat baik dalam bentuk giro, deposito berjangka maupun tabungan. Selain itu, bank tersebut juga memberikan atau menyalurkan kredit baik untuk modal kerja maupun untuk investasi, dan melakukan transaksi perdagangan luar negeri.

2.2.2 Bank Perkreditan Rakyat (*Rural Banks*)

Kegiatan utama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah menerima simpanan dan memberikan kredit untuk skala kecil dalam jangka pendek kepada pedagang kecil terutama yang berada di wilayah pedesaan. Sehingga wilayah kerja BPR umumnya lebih bersifat lokal tingkat desa. Dilihat dari jenisnya, BPR terdiri dari BPR-BKD dan BPR- NonBKD.

2.2.3 Perbankan Syariah (*Sharia Banks*)

Konsep perbankan syariah sesuai dengan amanat dan semangat UU No.7 tahun 1992 yang telah meletakkan dasar bagi terwujudnya perbankan sistem ganda yaitu sistem perbankan yang memungkinkan beroperasinya bank dengan sistem bagi hasil (syariah) dan bank yang beroperasi secara konvensional. Kemudian di dalam UU perbankan yang baru yaitu UU. No.10 tahun 1998 kembali menindaklanjuti dan secara transparan telah menyebutkan tentang latar belakang diperkenalkannya sistem perbankan syariah dalam struktur perbankan di Indonesia. Menurut UU tersebut kegiatan perbankan syariah terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga dan mengembangkan pembiayaan berdasarkan prinsip kemitraan.

UU No. 10 tahun 1998 tersebut juga menjelaskan tiga cara dalam mengembangkan perbankan syariah yaitu (a) pendirian bank baru, (b) konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah, dan (c) pembukaan kantor cabang syariah (*full branch*) pada bank umum konvensional.

2.3 Lembaga Keuangan Lainnya (*Other Financial Institutions*)

Sektor ini mencakup semua lembaga keuangan selain bank yang terdiri dari Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura, Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, Perusahaan Penunjang Asuransi, Perusahaan Dana Pensiun, Perusahaan Pegadaian, dan Pasar Modal.

2.3.1 Perusahaan Pembiayaan (*Finance Companies*)

Perusahaan Pembiayaan adalah jenis perusahaan finansial yang kegiatan utamanya memberikan pembiayaan kepada nasabahnya. Cakupan kegiatan Perusahaan Pembiayaan adalah Perusahaan Pembiayaan Sewa Guna Usaha (*Leasing*), Pembiayaan Anjak Piutang (*Factoring*), Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) dan Kartu Kredit (*Credit Card*). Perusahaan Pembiayaan secara umum dimaksudkan untuk memberikan penyaluran dana kepada para nasabah dalam bentuk pembiayaan, dan tidak dibenarkan menarik dana secara langsung dari pihak ketiga (*nondepositories institution*) sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, sebagian besar sumber dana Perusahaan Pembiayaan berasal dari kredit perbankan baik bank dalam negeri maupun bank asing.

2.3.1.1 Pembiayaan Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Kegiatan Perusahaan Pembiayaan jenis sewa guna usaha ini adalah memberikan pembiayaan (lessor) kepada para penyewa guna usaha (*lease*) untuk penyediaan barang-barang modal baik secara "*finance lease*" maupun "*operating lease*" dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

2.3.1.2 Pembiayaan Anjak Piutang (*Factoring*)

Anjak Piutang adalah jenis kegiatan usaha pembiayaan yang bisa dilakukan baik secara individu maupun dalam bentuk badan usaha. Kegiatan usaha Anjak Piutang adalah membeli piutang baik dalam bentuk *account receivable* maupun *promissory notes* atas dasar tingkat diskonto tertentu dari si penjual baik *with recourse* maupun *without recourse*. Anjak Piutang jenis *with recourse* berarti tanggung jawab penagihan piutang selanjutnya akan beralih kepada pihak yang melakukan anjak piutang.

2.3.1.3 Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance*)

Pembiayaan Konsumen adalah jenis kegiatan usaha yang memberikan pembiayaan kepada para nasabah terutama untuk pengadaan barang-barang konsumsi dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala.

2.3.1.4 Pembiayaan Kartu Kredit (*Credit Card*)

Pembiayaan Kartu Kredit adalah jenis kegiatan usaha yang memberikan pembiayaan kepada para nasabah untuk kepentingan pembelian barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit. Kartu kredit merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak penerbit kartu kredit. Biasanya pihak bank disebut sebagai *issuer*, sedangkan pihak yang menerima pembiayaan atau pemegang kartu kreditnya disebut sebagai *card holder*. Pemegang kartu kredit dapat menggunakan untuk berbelanja di tempat-tempat yang sudah terdaftar sebagai penerima kartu kredit (*merchant*).

2.3.2 Modal Ventura (*Venture Capital*)

Modal Ventura adalah kegiatan usaha yang kegiatan utamanya melakukan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) dalam jangka waktu tertentu umumnya selama sepuluh tahun, dan dapat diperpanjang kembali. Selain memberikan bantuan modal kepada PPU, perusahaan modal ventura juga seringkali memberikan bimbingan manajemen kepada PPU. Bentuk usaha modal ventura ini umumnya dikembangkan oleh pihak swasta besar dalam rangka mewujudkan kemitraan usaha dengan perusahaan-perusahaan kecil.

2.3.3 Usaha Perasuransian (*Insurance Business*)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.2 tahun 1992 pasal 3, Usaha Perasuransian dibedakan menjadi dua yaitu (a) Usaha Asuransi, dan (b) Usaha Penunjang Usaha Asuransi.

2.3.3.1 Usaha Asuransi (*Insurance Business*)

Usaha Asuransi terdiri dari Asuransi Umum, Asuransi Jiwa dan Reasuransi.

2.3.3.1.1 Usaha Asuransi Kerugian (*General Insurance Business*)

Usaha Asuransi Umum adalah usaha yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat risiko atas kerugian, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

2.3.3.1.2 Usaha Asuransi Jiwa (*Life Insurance Business*)

Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.

2.3.3.1.3 Usaha Reasuransi (*Reinsurance Business*)

Usaha Reasuransi adalah usaha yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa.

2.3.3.2 Usaha Jasa Penunjang Usaha Asuransi (*Insurance Supporting Business*)

Usaha Jasa Penunjang Asuransi terdiri dari (i) Usaha Pialang Asuransi, (ii) Usaha Pialang Reasuransi, (iii) Usaha Penilai Kerugian Asuransi, (iv) Usaha Konsultan Aktuaria, dan (v) Usaha Agen Asuransi.

2.3.3.2.1 Usaha Pialang Asuransi (*Insurance Brokerage Business*)

Usaha Pialang Asuransi adalah usaha yang memberikan jasa perantara dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.

2.3.3.2.2 Usaha Pialang Reasuransi (*Reinsurance Brokerage Business*)

Usaha Pialang Reasuransi adalah usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan Perusahaan Asuransi.

2.3.3.3 Program Asuransi Sosial (*Social Insurance Program*)

Sesuai dengan Undang-undang No.2 tahun 1992 tidak dikenal lagi perusahaan Asuransi Sosial seperti sebelumnya. Undang-undang itu mengatur program asuransi sosial yaitu sebagai suatu program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya pada pasal 14 ayat (1) dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa program asuransi sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Beberapa program asuransi sosial yang ada diantaranya adalah :

Program asuransi sosial bidang asuransi kerugian, yaitu asuransi wajib kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh BUMN PT (Pesero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Program asuransi sosial bidang asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh PT (Pesero) ASKES

Program asuransi sosial yang mengelola Tabungan Hari Tua (THT) dan asuransi kesehatan bagi anggota ABRI dan para karyawan sipil ABRI diselenggarakan oleh PT (Pesero) ASABRI. Program asuransi sosial yang mengelola THT dan asuransi kematian bagi pegawai negeri sipil, diselenggarakan oleh PT (pesero) TASPEN.

Program asuransi sosial yang mengelola THT, asuransi kematian, asuransi kecelakaan kerja dan pelayanan kesehatan bagi tenaga kerja, diselenggarakan oleh PT (Pesero). Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT. JAMSOSTEK).

Mulai tahun 2013 perusahaan asuransi kerugian melebur menjadi satu menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan masuk ke dalam sektor pemerintah.

2.3.4 Pegadaian (*Pawnshops*)

Mencakup usaha lembaga perkreditan pemerintah yang tugasnya membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai. Besarnya pinjaman disesuaikan dengan nilai barang jaminan yang diserahkan oleh pihak peminjam tanpa syarat apapun mengenai penggunaan dananya.

2.3.5 Dana Pensiun (*Pension Fund*)

Sesuai dengan UU No.11 tahun 1992 tentang perusahaan Dana Pensiun, perusahaan ini adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun bertujuan untuk memelihara kesejahteraan sosial karyawan perusahaan, melalui pemberian santunan hari tua/ uang pensiun. Umumnya dana yang terkumpul dari iuran peserta dan pemberi kerja selain digunakan untuk membayar tunjangan hari tua/pensiun karyawan, juga diinvestasikan dalam bentuk aset tetap, saham, maupun disimpan dalam bentuk tabungan atau deposito.

Terdapat tiga pilihan bentuk program pensiun yaitu (i) Program Pensiun Berdasarkan Keuntungan (PPBK), (ii) Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) dan (iii) Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP). Sedangkan berdasarkan bentuk badan hukumnya, Dana Pensiun dibedakan menjadi dua yaitu (i) Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan (ii) Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

2.3.5.1. Program Pensiun Berdasarkan Keuntungan (PPBK)

Pada program pensiun jenis ini, karyawan biasanya tidak perlu ikut membayar iuran, sedangkan perusahaan sebagai pemberi kerja membayar iuran dalam batas persentase tertentu dari keuntungannya dalam tahun tertentu. Dalam hal risiko, kegagalan pengelolaan berada pada pihak peserta.

2.3.5.2. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

Pada program pensiun jenis ini, kewajiban membayar iuran ditanggung oleh pihak pemberi kerja dan peserta yang telah ditetapkan lebih dahulu berdasarkan kemampuan masing-masing pihak. Berdasarkan kesepakatan ini, dalam keadaan bagaimanapun pihak perusahaan sebagai pihak pemberi kerja harus tetap membayar iuran kepada pihak dana pensiun sesuai yang telah disepakati. Dalam hal risiko kegagalan pengolahan risiko berada pada pihak peserta.

2.3.5.3. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

Pada jenis program ini manfaat pasti telah ditetapkan sebelumnya. Dalam program ini besarnya iuran yang harus dibayarkan oleh pihak pemberi kerja dapat mengalami perubahan sesuai dengan hasil perhitungan aktuarial dan hasil pengelolaan dananya. Sedangkan bagi peserta, besarnya iuran yang harus dibayarkan oleh peserta besarnya tetap. Dalam hal risiko kegagalan pengelolaan berada pada pihak pemberi kerja. Sebaliknya jika pengelolaan dana pensiun berhasil maka akan mengurangi beban iuran pihak pemberi kerjanya.

2.4 Pasar Modal (*Capital Market*)

Pasar Modal adalah sarana yang dapat mempertemukan kepentingan pihak investor dengan pihak emiten. Dalam hal ini, pasar modal menjadi sarana alternatif bagi pihak perusahaan yang menginginkan sumber dana di luar kredit perbankan. Pihak perusahaan yang melakukan penawaran saham (emiten) dapat memperoleh sumber dana melalui penawaran perdana di pasar primer atau *Initial Public Offering* (IPO). Selain terjadi transaksi jual beli saham, di pasar modal juga dilakukan transaksi jual beli obligasi. Sarana untuk melangsungkan transaksi pasar modal di Indonesia dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Seperti halnya pada kegiatan perasuransian, pada kegiatan di pasar modal juga memunculkan kegiatan usaha derivatif seperti Broker Pasar Modal, *Underwriter*, *Adjuster* dan Penjamin Emisi.

3. Pemerintah (*Government*)

Pengertian sektor Pemerintah adalah sektor yang semata-mata melakukan kegiatan administrasi pemerintah dan melakukan kegiatan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengharap balas jasa. Termasuk dalam kegiatan pemerintah juga meliputi kegiatan lembaga-lembaga pemerintah baik pada tingkat pusat maupun daerah, tetapi tidak termasuk badan usaha milik pemerintah (BUMN dan BUMD). Dalam penyusunan NAD Indonesia,

kedua sektor tersebut (BUMN dan BUMD) dikategorikan sebagai sektor tersendiri yaitu sektor Perusahaan Pemerintah. Sektor Pemerintah sendiri dibedakan menjadi dua yaitu (i) Pemerintah Pusat dan (ii) Pemerintah Daerah.

3.1. Pemerintah Pusat (*Central Government*)

Mencakup semua unit pemerintah baik yang berada di pusat seperti: Kementerian, Lembaga Nonkementerian, Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Pemerintah lain, serta semua unit vertikalnya yang berada di daerah. Lembaga ini umumnya melakukan jasa pelayanan umum, seperti administrasi, pertahanan dan keamanan, membuat peraturan-peraturan pemerintah, merencanakan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemakmuran masyarakat, menyelenggarakan jasa pendidikan, kesehatan, kebudayaan, rekreasi dan jasa pelayanan sosial lainnya secara cuma- cuma (di bawah tingkat harga normalnya).

3.2 Pemerintah Daerah (*Local Government*)

Mencakup semua unit kegiatan pemerintah yang berada di tingkat provinsi, kabupaten dan desa, kecuali unit vertikal pemerintah pusat di daerah. Lembaga ini mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (hak otonom).

Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga

LNPRT terdiri dari seluruh LNPRT residen yang menyediakan barang atau jasa nonpasar untuk rumah tangga atau masyarakat luas.

5. Rumah Tangga (*Households*)

Mencakup kegiatan rumah tangga biasa dan usaha rumah tangga. Rumah Tangga biasa adalah seorang atau sekelompok orang yang tinggal di suatu bangunan dan biasanya mengurus kebutuhan sehari-hari secara bersama. Usaha rumah tangga adalah kegiatan ekonomi tidak berbentuk badan hukum yang dilakukan oleh rumah tangga, dan risiko usahanya ditanggung seorang atau lebih anggota rumah tangga dengan tujuan menghasilkan barang dan/atau jasa untuk dijual atau ditukar dengan barang lain, misalnya, usaha pertanian, industri/ kerajinan dan sebagainya.

6. Luar Negeri (*Rest of the World*)

Mencakup kegiatan antara penduduk Indonesia (residen) baik individu maupun institusi dan bukan penduduk (nonresiden/ luar negeri). Transaksi yang terjadi antara residen dengan nonresiden ini dicatat di dalam Neraca Pembayaran (*Balance of Payments*).

<https://www.bps.go.id>

<https://www.bps.go.id>



LAMPIRAN II

DEFINISI KATEGORI TRANSAKSI FINANSIAL NAERACA ARUS DANA (NAD)

<https://www.bps.go.id>

DEFINISI KATEGORI TRANSAKSI NERACA ARUS DANA INDONESIA

B8g Tabungan Bruto

Tabungan Bruto merupakan jumlah dari penyusutan aset tetap dan tabungan neto. Penyusutan Aset tetap (PBM) merupakan biaya penyusutan aset tetap (pabrik, mesin dan peralatan) karena aus/ rusak dalam proses produksi yang dibebankan pada biaya operasi perusahaan. Biaya penyusutan sesungguhnya bukan merupakan pengeluaran dana. Selain itu, penyusutan aset tetap juga meliputi perkiraan penyusutan rumah yang dimiliki perorangan dan aset tetap milik perusahaan. Sementara itu, tabungan neto merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran dari kegiatan ekonomi suatu sektor setelah dikurangi penyusutan aset tetap. Penerimaan disini meliputi pendapatan dari penjualan barang dan jasa, balas jasa faktor tenaga kerja seperti upah dan gaji, serta pendapatan kepemilikan seperti bunga dan sewa. Penerimaan juga mencakup pendapatan dari transfer (bukan transfer modal), seperti subsidi dari pemerintah yang diterima oleh sektor usaha, bantuan luar negeri yang diterima pemerintah, pensiun yang diterima oleh sektor rumah tangga, dan pajak yang diterima oleh pemerintah. Sementara itu, pengeluaran mencakup baik pengeluaran barang dan jasa yang dibayarkan kepada sektor lain, maupun pembayaran transfer (seperti pembayaran pajak) dan dividen. Pengeluaran untuk aset tetap dan persediaan dikategorikan sebagai pengeluaran modal.

P5g Investasi Nonfinansial

Merupakan penjumlahan dari Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori. Yang dimaksud dengan PMTB adalah pengeluaran untuk aset tetap yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan bukan merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan, dan bandara, mesin dan perlengkapan, peralatan, *software*, produk kekayaan intelektual, dan jenis aset tetap lainnya. Sementara itu, perubahan inventori adalah perubahan nilai persediaan pada akhir tahun dikurangi dengan persediaan pada awal tahun. Persediaan meliputi bahan baku, pekerjaan yang masih dalam proses dan barang jadi yang belum terjual. Ini termasuk juga persediaan di bidang pertanian seperti ternak dan hasil pertanian.

B9c Pinjaman Neto = B8g – P5g

Pinjaman Neto atau yang lebih sering dikenal dengan *Net Lending/Net Borrowing* merupakan selisih antara Tabungan Bruto dengan Perolehan Harta Nonfinansial atau Investasi Nonfinansial. Istilah ini disebut juga Celah Tabungan dan Investasi atau *Saving Investment Gap (S-I Gap)*.

Selisih Statistik = B9c – B9f

Selisih Statistik adalah selisih antara Pinjaman Neto (sisi transaksi riil, bagian atas NAD) dan Investasi Finansial Neto (sisi finansial NAD). Penyebab utama adanya selisih statistik di beberapa sektor adalah adanya perbedaan sumber data antara bagian atas NAD dan sisi finansialnya. Jika dalam persamaan akuntansi total aset sama dengan kewajiban plus kekayaan neto, maka Pinjaman Neto harus sama dengan Investasi Finansial Neto, tetapi karena data yang diperoleh berasal dari berbagai sumber yang berbeda cakupannya, maka terjadi ketidakkonsistenan yang menimbulkan selisih tersebut.

B9f Perubahan Neto Investasi Finansial = A-L

Investasi Finansial Neto merupakan selisih antara jumlah penggunaan finansial (perolehan neto aset finansial) dengan jumlah sumber finansial (perolehan neto kewajiban finansial).

Jumlah Penggunaan Finansial

Jumlah Penggunaan Finansial (perolehan neto aset finansial) merupakan jumlah seluruh perubahan instrumen finansial dari neraca keuangan sisi aktiva. Kenaikkan dari penggunaan finansial berarti positif dan penurunannya berarti negatif.

Jumlah Sumber Finansial

Jumlah Sumber Finansial (perolehan neto kewajiban finansial) merupakan jumlah seluruh perubahan instrumen finansial dari neraca keuangan sisi pasiva. Kenaikkan dari sumber finansial berarti positif dan penurunannya berarti negatif.

F1 Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus

Emas moneter dan Hak Tarik Khusus (SDRs) yang diterbitkan *Internasional Monetary Fund* (IMF) merupakan aset yang umumnya hanya dimiliki oleh otoritas moneter.

F11 Emas moneter

Emas moneter adalah emas yang dimiliki oleh otoritas moneter, atau oleh pihak lain yang berada di bawah kendali efektif otoritas moneter, dan digunakan sebagai aset cadangan. Emas moneter mencakup emas Batangan, termasuk emas yang dicatat dalam neraca alokasi emas, serta emas yang tidak dialokasikan kepada nonresiden, tetapi memberikan hak untuk mengklaim pengiriman emas secara fisik.

F12 Hak Tarik Khusus

Hak Tarik Khusus (*Special Drawing Rights/SDR*) merupakan aset cadangan internasional yang diciptakan oleh *International Monetary Fund* (IMF) dan dialokasikan kepada negara-negara anggotanya sebagai pelengkap cadangan devisa yang telah tersedia. *Department of Special Drawing Rights* IMF bertanggung jawab dalam pengelolaan aset tersebut, termasuk alokasi SDR di antara negara-negara anggota dan lembaga-lembaga internasional, yang secara kolektif disebut sebagai peserta.

F2 Uang dan Simpanan

Transaksi finansial dalam uang dan simpanan terdiri atas penambahan atau pelepasan uang tunai, serta peningkatan atau penambahan simpanan atau penarikannya.

F21 Uang

Uang terdiri atas uang kertas dan koin dengan nilai nominal tetap yang diterbitkan oleh, atau berada di bawah otoritas, bank sentral maupun pemerintah. Koin kenangan (*commemorative coins*) yang tidak beredar harus dikeluarkan dari perhitungan, sebagaimana halnya uang yang belum diterbitkan atau uang tunai yang telah didemonetisasi. Penting untuk membedakan antara mata uang domestik, yaitu mata uang yang merupakan kewajiban unit residen seperti bank sentral, bank umum, dan pemerintah pusat, dengan mata uang asing yang merupakan kewajiban unit nonresiden, seperti bank sentral, bank umum, dan pemerintah dari negara lain.

F22 *Transferable Deposits*

Transferable Deposits (simpanan yang mudah dicairkan) terdiri dari seluruh simpanan yang:

Dapat ditukarkan dengan uang kertas dan uang logam atas permintaan pada nilai nominal dan tanpa penalty atau pembatasan; dan

Dapat langsung digunakan untuk melakukan pembayaran melalui cek, wesel, giro order, debet/kredit langsung, atau fasilitas pembayaran langsung lainnya.

F29 *Simpanan lainnya*

Simpanan lainnya mencakup seluruh klaim selain simpanan yang dapat dipindahtangankan (*transferable deposits*) dan dinyatakan dalam bentuk bukti simpanan. Jenis-jenis simpanan yang termasuk dalam kategori ini antara lain tabungan (yang pada umumnya tidak dapat dipindahtangankan), deposito berjangka, serta sertifikat deposito yang tidak dapat dinegosiasikan. Kategori ini juga mencakup saham atau bukti simpanan sejenis yang diterbitkan oleh asosiasi tabungan dan pinjaman, lembaga pembangunan masyarakat, serikat kredit, dan sejenisnya. Simpanan dengan kemampuan transfer yang terbatas, yang dikecualikan dari kategori simpanan yang dapat dipindahtangankan, juga termasuk dalam kelompok ini.

Klaim terhadap IMF yang merupakan bagian dari cadangan devisa dan tidak berbentuk pinjaman dicatat sebagai simpanan lainnya. Sementara itu, klaim terhadap IMF yang berbentuk pinjaman diklasifikasikan sebagai pinjaman. Pembayaran margin yang dibayarkan secara tunai dalam kaitannya dengan kontrak derivatif keuangan (yang dijelaskan kemudian) dimasukkan ke dalam kategori simpanan lainnya. Hal yang sama berlaku untuk perjanjian pembelian kembali (*repurchase agreements*) jangka sangat pendek, seperti transaksi *overnight*, apabila transaksi tersebut dianggap sebagai bagian dari definisi uang nasional yang diperluas. Sementara itu, perjanjian pembelian kembali lainnya diklasifikasikan sebagai pinjaman.

F3 *Surat Utang*

Surat utang atau sekuritas utang merupakan instrumen yang dapat dipindahtangankan (*negotiable instruments*) dan berfungsi sebagai bukti kepemilikan atas suatu kewajiban utang. Instrumen ini mencakup berbagai bentuk seperti wesel tagih (*bills*), obligasi (*bonds*), sertifikat simpanan yang dapat diperdagangkan (*negotiable certificates of deposit*), surat berharga

komersial (*commercial paper*), debentur (*debentures*), sekuritas berbasis aset (*asset-backed securities*), serta instrumen sejenis lainnya yang lazim diperdagangkan di pasar keuangan.

F31 Surat Utang Jangka Pendek

Surat utang atau sekuritas utang jangka pendek mencakup instrumen keuangan yang memiliki jangka waktu jatuh tempo asli satu tahun atau kurang. Sekuritas dengan jangka waktu jatuh tempo satu tahun atau kurang tetap diklasifikasikan sebagai sekuritas jangka pendek, meskipun diterbitkan melalui fasilitas pembiayaan jangka panjang, seperti dalam hal penerbitan *note issuance facility*.

F32 Surat Utang Jangka Panjang

Surat utang atau sekuritas utang jangka panjang mencakup instrumen keuangan yang memiliki jangka waktu jatuh tempo asli lebih dari satu tahun. Klaim yang memiliki tanggal jatuh tempo opsional terakhir lebih dari satu tahun, serta klaim yang tidak memiliki batas waktu jatuh tempo, diklasifikasikan sebagai sekuritas jangka panjang.

F4 Pinjaman

Pinjaman merupakan aset finansial yang:

Dibuat saat kreditur meminjamkan dana secara langsung pada debitur, dan
Dibuktikan dengan dokumen yang tidak dapat diperdagangkan (*negotiable*).

F41 Pinjaman Jangka Pendek

Pinjaman jangka pendek mencakup pinjaman yang memiliki jangka waktu jatuh tempo asli satu tahun atau kurang. Pinjaman yang dapat ditagih kembali sewaktu-waktu oleh kreditur diklasifikasikan sebagai pinjaman jangka pendek, meskipun dalam praktiknya pinjaman tersebut diperkirakan akan berlangsung lebih dari satu tahun.

F42 Pinjaman Jangka Panjang

Pinjaman jangka panjang terdiri dari pinjaman yang mempunyai masa jatuh tempo lebih setahun.

F5 Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif

Ekuitas dan unit penyertaan investasi kolektif memiliki karakteristik yang berbeda, di mana pemegangnya memegang klaim residual atas aset unit institusi yang menerbitkan instrumen tersebut. Ekuitas merepresentasikan kepemilikan dana dalam unit institusi tersebut. Berbeda dengan utang, ekuitas umumnya tidak memberikan hak kepada pemiliknya atas jumlah tertentu atau jumlah yang dihitung berdasarkan rumusan yang tetap. Unit penyertaan investasi kolektif memiliki peran khusus dalam aktivitas intermediasi keuangan sebagai bentuk investasi kolektif atas aset-aset lain, sehingga diklasifikasikan secara terpisah.

F51 Ekuitas

Ekuitas terdiri dari semua instrumen dan catatan pengakuan klaim pada nilai sisa dari suatu korporasi atau kuasi-korporasi setelah klaim dari seluruh kreditur dipenuhi. Ekuitas diperlakukan sebagai tanggungan dari unit institusi yang menerbitkan.

Ekuitas terdiri dari saham terdaftar, saham tidak terdaftar, dan jenis ekuitas lainnya. Saham terdaftar merupakan sekuritas ekuitas yang tercatat di dalam bursa saham. Saham tidak terdaftar merupakan sekuritas ekuitas yang tidak terdaftar dalam bursa saham. Sementara itu, ekuitas lainnya merupakan ekuitas yang tidak berbentuk sekuritas.

F52 Unit Penyertaan Investasi Kolektif

Unit Penyertaan Investasi Kolektif merupakan bentuk investasi bersama di mana para investor mengumpulkan dana untuk menginvestasikan pada aset finansial maupun aset nonfinansial. Unit penyertaan ini dapat berupa Dana Pasar Uang (*Money Market Funds/ MMF*) maupun Dana Nonpasar Uang (*Nonmoney Market Funds/ nonMMF*).

Dana Pasar Uang (MMF) adalah dana investasi yang ditempatkan secara eksklusif atau utamanya pada sekuritas pasar uang jangka pendek, seperti surat berharga negara (*treasury bills*), sertifikat deposito (*certificates of deposit*), dan surat berharga komersial (*commercial paper*). MMF secara fungsional terkadang menyerupai simpanan yang dapat dipindahtangankan (*transferable deposits*), misalnya akun dengan hak penulisan cek terbatas. Apabila dana yang diinvestasikan dalam MMF termasuk dalam definisi uang beredar dalam pelaporan ekonomi, maka dana tersebut dicatat secara terpisah guna memungkinkan rekonsiliasi dengan statistik moneter. Saham atau unit MMF merepresentasikan klaim proporsional atas nilai dana MMF tersebut. Sementara itu, Dana Nonpasar Uang (nonMMF) menggambarkan klaim atas proporsi nilai dana investasi yang dibangun dari aset selain pasar uang.

F6 Asuransi, Dana Pensiun, dan Jaminan Terstandar

Asuransi, Dana Pensiun dan Jaminan Terstandar berfungsi sebagai bentuk redistribusi pendapatan atau kekayaan yang dimediasi oleh institusi finansial. Redistribusi terjadi antar unit individu institusi pada periode sama, atau antar unit institusi yang sama pada periode yang berbeda, atau kombinasi keduanya.

F61 Cadangan Teknis Asuransi Nonjiwa

Cadangan teknis asuransi nonjiwa terdiri dari pembayaran di muka atas premi asuransi nonjiwa dan cadangan neto guna memenuhi klaim asuransi nonjiwa yang mungkin terjadi.

F62 Hak Anuitas dan Asuransi Jiwa

Hak anuitas dan asuransi jiwa mencerminkan perluasan klaim finansial yang dimiliki oleh pemegang polis dan ditawarkan oleh perusahaan asuransi jiwa atau penyedia jaminan hari tua. Dalam neraca finansial, hanya transaksi yang berkaitan dengan asuransi jiwa dan jaminan hari tua yang dicatat, yaitu selisih antara premi bersih yang diterima dengan klaim yang dibayarkan.

F63 Hak Pensiunan

Hak pensiunan menunjukkan perluasan klaim finansial yang dimiliki oleh pensiunan, baik saat ini maupun di masa mendatang, terhadap pemberi kerja atau terhadap dana yang ditunjuk oleh pemberi kerja untuk membayar pendapatan pensiun sebagai bagian dari perjanjian kompensasi antara majikan dan pekerja. Transaksi hak pensiunan yang dicatat dalam neraca finansial adalah selisih bersih antara kontribusi yang diterima dan manfaat yang dibayarkan.

F7 Transaksi *Derivatives*

Transaksi derivatif terdiri atas derivatif keuangan dan opsi saham pekerja. Derivatif keuangan merupakan instrumen finansial yang nilainya bergantung pada instrumen finansial tertentu, indikator, atau komoditas, yang memungkinkan risiko finansial tertentu diperdagangkan di pasar finansial atas nama pemiliknya sendiri.

Financial derivatives dapat berupa opsi maupun kontrak *forward*. Opsi merupakan kontrak yang memberikan hak kepada pembeli opsi, namun bukan kewajiban, untuk membeli (*opsi call*) atau menjual (*opsi put*) instrumen finansial tertentu atau komoditas pada harga yang telah

ditentukan sebelumnya (harga *strike*) dalam rentang waktu tertentu (opsi Amerika) atau pada tanggal tertentu (opsi Eropa). Opsi dijual atau diterbitkan (*written*) dengan berbagai jenis underlying, seperti ekuitas, suku bunga, mata uang asing, komoditas, dan indeks tertentu.

Sementara itu, kontrak *forward* adalah kontrak finansial tanpa syarat yang mewajibkan penyelesaian pada tanggal yang telah ditentukan. Kontrak *forward* dan kontrak sejenisnya biasanya, namun tidak selalu, diselesaikan melalui pembayaran tunai atau penyediaan instrumen finansial lainnya, bukan melalui pengiriman fisik dari aset dasar. Oleh karena itu, kontrak *forward* dinilai dan diperdagangkan secara terpisah dari aset dasar tersebut.

Opsi saham pekerja adalah perjanjian yang dibuat pada tanggal pemberian hak (*grant date*), di mana pekerja diberikan hak untuk membeli sejumlah saham perusahaan pada harga tertentu (harga *strike*) pada tanggal tertentu (*vesting date*) atau dalam periode tertentu (*exercise period*) setelah tanggal pemberian hak opsi.

F8 Utang/Piutang Lainnya

F81 Kredit Dagang dan Pembayaran Dimuka

Kategori ini terdiri atas kredit dagang barang dan jasa yang diberikan kepada korporasi, pemerintah, lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPR), rumah tangga, dan pihak luar negeri, serta uang muka untuk pekerjaan yang sedang berlangsung, jika diklasifikasikan sebagai inventori, atau pekerjaan yang telah dan sedang berlangsung. Kredit dagang dan uang muka tersebut tidak termasuk kredit yang digunakan untuk membiayai kredit dagang yang diklasifikasikan sebagai pinjaman.

F89 Utang/ Piutang Lainnya

Kategori ini mencakup penerimaan dan pembayaran selain yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu jumlah yang tidak terkait dengan penyediaan barang dan jasa. Kategori ini meliputi jumlah yang berkaitan dengan pajak, dividen, pembelian dan penjualan sekuritas, sewa, upah dan gaji, serta kontribusi sosial. Bunga yang diperoleh namun tidak dibayarkan juga termasuk dalam kategori ini, dengan ketentuan bahwa bunga tersebut tidak ditambahkan pada nilai aset yang dibayarkan bunganya (seperti yang umumnya terjadi).



LAMPIRAN III

MATRIKS NERACA ARUS DANA MENURUT KATEGORI TRANSAKSI DAN SEKTOR

<https://www.bps.go.id>

<https://www.bps.go.id>

Lampiran 3.1 Neraca Arus Dana Indonesia, 2020 (Triliun Rp)

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	KORPORASI NON FINANSIAL		KORPORASI FINANSIAL		PEMERINTAH		RUMAH TANGGA	
		ΔAset	ΔKewajiban	ΔAset	ΔKewajiban	ΔAset	ΔKewajiban	ΔAset	ΔKewajiban
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
B8g	Tabungan Bruto		4.161,60		349,54		-438,79		782,52
P5g	Investasi Nonfinansial	3.696,02		115,42		427,77		681,74	
B9c	Pinjaman Neto (B8g-P5g)	465,58		234,12		-866,56		100,78	
	Selisih Statistik(B9c-B9f)	363,76		70,37		79,18		-496,38	
B9f	Perubahan neto investasi finansial (A-L)		101,82		163,75		-945,74		597,16
A	Perolehan neto aset finansial	683,19		1.444,89		291,77		804,95	
L	Perolehan neto kewajiban finansial		581,36		1.281,14		1.237,51		207,79
F1	Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus			-					
F11	Emas Moneter			-					
F12	Hak Tarik Khusus			-					
F2	Uang dan Simpanan	332,05		90,24	936,41	190,17		409,85	
F21	Uang	39,58		-1,84	105,14	4,84		59,24	
F22	Transferable deposits	213,86		102,72	466,98	129,12		161,37	
F29	Simpanan lainnya	78,60		-10,64	364,29	56,20		189,23	
F3	Surat Berharga	4,23	101,48	1.038,11	-64,12	-	1.177,00	107,23	
F31	Jangka pendek	-2,81	-4,16	-70,54	-68,73	-	-31,22	-0,08	
F32	Jangka panjang	7,04	105,64	1.108,65	4,61	-	1.208,22	107,31	
F4	Pinjaman	36,49	-95,93	188,41	271,35	8,68	60,51	1,06	21,75
F41	Jangka pendek	4,36	12,72	382,56	308,89	-2,62	7,31	0,28	11,13
F42	Jangka panjang	32,13	-108,65	-194,14	-37,54	11,29	53,20	0,79	10,62
F5	Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif	169,13	533,85	24,56	125,46	92,92	-	218,99	-
F51	Ekuitas	168,35	533,85	-3,12	94,11	92,92		218,86	
F52	Unit Penyertaan Investasi Kolektif	0,79	-	27,68	31,35	-		0,13	
F6	Asuransi, Dana Pensiun dan Jaminan Terstandar	-3,97	-	-0,08	-4,25	-	-	-0,17	
F61	Cadangan teknis asuransi nonjiwa	-3,97		-0,08	-4,73	-		-0,65	
F62	Hak anuitas dan asuransi jiwa				-22,06			-22,06	
F63	Hak pensiunan				22,55			22,55	
F7	Transaksi derivatives	0,23	3,22	-14,12	-16,30	-	-	0,33	-0,09
F8	Hutang/Piutang lainnya	145,02	38,75	117,77	32,58	-	-	67,66	186,12
F81	Kredit dagang dan pembayaran dimuka	135,26	-10,00	0,32	0,05	-	-	19,91	110,99
F89	Hutang/Piutang lainnya	9,76	48,75	117,45	32,53	-	-	47,75	75,13
	TOTAL	4.844,78	4.844,78	1.794,43	1.794,43	-147,02	-147,02	1.587,48	1.587,48

Lanjutan Lampiran 3.1

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	LNPRT		TOTAL EKONOMI DOMESTIK		LUAR NEGERI		TOTAL	
		ΔAset	ΔKewajiban	ΔAset	ΔKewajiban	ΔAset	ΔKewajiban	ΔAset	ΔKewajiban
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
B8g	Tabungan Bruto		75,31		4.930,18		64,71		4.994,90
P5g	Investasi Nonfinansial	73,95		4.994,90				4.994,90	
B9c	Pinjaman Neto (B8g-P5g)	1,36		-64,71		64,71		-	
	Selisih Statistik(B9c-B9f)	-5,77		11,16		-11,16		-	
B9f	Perubahan neto investasi finansial (A-L)		7,13		-75,87		75,87		-
A	Perolehan neto aset finansial	7,33		3.232,12		363,98		3.596,10	
L	Perolehan neto kewajiban finansial		0,20		3.307,99		288,11		3.596,10
F1	Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus			-		-		-	-
F11	Emas Moneter			-		-		-	-
F12	Hak Tarik Khusus			-		-		-	-
F2	Uang dan Simpanan	7,08		1.029,38	936,41	-7,91	85,05	1.021,46	1.021,46
F21	Uang	1,72		103,55	105,14	-	-1,59	103,55	103,55
F22	Transferable deposits	2,84		609,91	466,98	-12,90	130,03	597,01	597,01
F29	Simpanan lainnya	2,52		315,91	364,29	4,99	-43,39	320,90	320,90
F3	Surat Berharga	~0		1.149,57	1.214,36	136,92	72,14	1.286,49	1.286,49
F31	Jangka pendek	~0		-73,43	-104,11	-30,68	-	-104,11	-104,11
F32	Jangka panjang	-		1.223,00	1.318,47	167,60	72,14	1.390,61	1.390,61
F4	Pinjaman	-0,45	0,20	234,20	257,87	58,71	35,03	292,91	292,91
F41	Jangka pendek	-	-	384,58	340,04	-40,94	3,60	343,64	343,64
F42	Jangka panjang	-0,45	0,20	-150,38	-82,17	99,65	31,44	-50,73	-50,73
F5	Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif	0,66	-	506,27	659,31	217,78	64,74	724,05	724,05
F51	Ekuitas	0,78		477,79	627,96	214,91	64,74	692,70	692,70
F52	Unit Penyertaan Investasi Kolektif	-0,12		28,48	31,35	2,87	-	31,35	31,35
F6	Asuransi, Dana Pensiun dan Jaminan Terstandar	-0,03	-	-4,25	-4,25	-	-	-4,25	-4,25
F61	Cadangan teknis asuransi nonjiwa	-0,03		-4,73	-4,73	-	-	-4,73	-4,73
F62	Hak anuitas dan asuransi jiwa			-22,06	-22,06	-	-	-22,06	-22,06
F63	Hak pensiunan			22,55	22,55	-	-	22,55	22,55
F7	Transaksi derivatives	-	-	-13,56	-13,17	-18,83	-19,22	-32,39	-32,39
F8	Hutang/Piutang lainnya	0,06	-	330,51	257,45	-22,68	50,38	307,83	307,83
F81	Kredit dagang dan pembayaran dimuka	-	-	155,48	101,04	-27,64	26,80	127,84	127,84
F89	Hutang/Piutang lainnya	0,06	-	175,02	156,41	4,96	23,57	179,99	179,99
	TOTAL	82,64	82,64	8.162,30	8.162,30	428,70	428,70	8.591,00	8.591,00

Keterangan:

Δ Aset	= Perubahan Aset
Δ Kewajiban	= Perubahan Kewajiban
*	= Angka Sementara
**	= Angka Sangat Sementara
***	= Angka Sangat Sangat Sementara

Lampiran 3.2 Neraca Arus Dana Indonesia, 2021 (Triliun Rp)

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	KORPORASI NON FINANSIAL		KORPORASI FINANSIAL		PEMERINTAH		RUMAH TANGGA	
		ΔAset	ΔKewajiban	ΔAset	ΔKewajiban	ΔAset	ΔKewajiban	ΔAset	ΔKewajiban
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
B8g	Tabungan Bruto		4.084,53		378,81		-140,59		995,63
P5g	Investasi Nonfinansial	3.904,13		78,26		538,45		752,26	
B9c	Pinjaman Neto (B8g-P5g)	180,40		300,54		-679,04		243,37	
	Selisih Statistik(B9c-B9f)	-0,68		128,13		36,26		-117,20	
B9f	Perubahan neto investasi finansial (A-L)		181,08		172,42		-715,30		360,57
A	Perolehan neto aset finansial	1.201,14		1.762,91		166,55		712,25	
L	Perolehan neto kewajiban finansial		1.020,05		1.590,50		881,86		351,68
F1	Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus			90,77	90,77				
F11	Emas Moneter			-	-				
F12	Hak Tarik Khusus			90,77	90,77				
F2	Uang dan Simpanan	612,75		496,66	1.176,91	-42,49		161,54	
F21	Uang	81,41		-11,32	60,94	0,01		-10,31	
F22	Transferable deposits	475,94		402,87	839,42	-33,19		27,63	
F29	Simpanan lainnya	55,40		105,11	276,55	-9,32		144,22	
F3	Surat Berharga	6,33	54,95	835,51	36,11	-	875,99	183,55	
F31	Jangka pendek	0,78	-15,05	4,14	27,46	-	-13,59	-0,07	
F32	Jangka panjang	5,55	70,00	831,37	8,65	-	889,58	183,61	
F4	Pinjaman	32,92	-4,52	176,01	-137,00	12,54	5,87	0,14	191,72
F41	Jangka pendek	11,02	-177,37	-167,31	-98,46	0,10	26,98	0,11	-2,29
F42	Jangka panjang	21,90	172,85	343,32	-38,53	12,44	-21,11	0,03	194,00
F5	Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif	531,72	828,22	41,43	494,44	182,16	-	265,99	-
F51	Ekuitas	532,49	828,22	41,06	489,55	182,16		266,10	
F52	Unit Penyertaan Investasi Kolektif	-0,77	-	0,37	4,89	-		-0,11	
F6	Asuransi, Dana Pensiun dan Jaminan Terstandar	19,89	-	0,71	110,18	-	-	89,74	
F61	Cadangan teknis asuransi nonjiwa	19,89		0,71	22,59	-		2,15	
F62	Hak anuitas dan asuransi jiwa				75,19			75,19	
F63	Hak pensiunan				12,40			12,40	
F7	Transaksi derivatives	-0,12	-4,17	-31,27	-22,97	-	-	-0,19	0,31
F8	Hutang/Piutang lainnya	-2,36	145,56	153,09	-157,95	14,35	-	11,49	159,65
F81	Kredit dagang dan pembayaran dimuka	35,89	63,13	0,01	-27,15	-	-	14,31	9,94
F89	Hutang/Piutang lainnya	-38,24	82,44	153,08	-130,80	14,35	-	-2,81	149,71
	TOTAL	5.285,67	5.285,67	2.141,72	2.141,72	25,96	25,96	1.707,88	1.707,88

Lanjutan Lampiran 3.2

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	LNPR		TOTAL EKONOMI DOMESTIK		LUAR NEGERI		TOTAL	
		ΔAset	ΔKewajiban	ΔAset	ΔKewajiban	ΔAset	ΔKewajiban	ΔAset	ΔKewajiban
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
B8g	Tabungan Bruto		71,12		5.389,51		-50,51		5.339,00
P5g	Investasi Nonfinansial	65,89		5.339,00				5.339,00	
B9c	Pinjaman Neto (B8g-P5g)	5,23		50,51		-50,51		-	
	Selisih Statistik(B9c-B9f)	-10,08		36,43		-36,43		-	
B9f	Perubahan neto investasi finansial (A-L)		15,32		14,08		-14,08		-
A	Perolehan neto aset finansial	9,23		3.852,08		375,56		4.227,64	
L	Perolehan neto kewajiban finansial		-6,09		3.837,99		389,64		4.227,64
F1	Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus			90,77	90,77	90,77	90,77	181,53	181,53
F11	Emas Moneter			-	-	-	-	-	-
F12	Hak Tarik Khusus			90,77	90,77	90,77	90,77	181,53	181,53
F2	Uang dan Simpanan	3,71		1.232,16	1.176,91	14,15	69,41	1.246,31	1.246,31
F21	Uang	-0,12		59,67	60,94	-	-1,27	59,67	59,67
F22	Transferable deposits	0,98		874,23	839,42	14,26	49,07	888,49	888,49
F29	Simpanan lainnya	2,85		298,26	276,55	-0,11	21,60	298,15	298,15
F3	Surat Berharga	-		1.025,39	967,06	53,13	111,47	1.078,52	1.078,52
F31	Jangka pendek	-		4,85	-1,18	-6,03	-	-1,18	-1,18
F32	Jangka panjang	-		1.020,54	968,23	59,16	111,47	1.079,70	1.079,70
F4	Pinjaman	0,05	-6,09	221,66	49,98	-137,11	34,57	84,55	84,55
F41	Jangka pendek	-	-	-156,08	-251,14	-75,87	19,19	-231,95	-231,95
F42	Jangka panjang	0,05	-6,09	377,73	301,12	-61,24	15,38	316,50	316,50
F5	Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif	5,58	-	1.026,88	1.322,67	339,15	43,36	1.366,03	1.366,03
F51	Ekuitas	5,40		1.027,21	1.317,78	333,93	43,36	1.361,14	1.361,14
F52	Unit Penyertaan Investasi Kolektif	0,18		-0,33	4,89	5,22	-	4,89	4,89
F6	Asuransi, Dana Pensiun dan Jaminan Terstandar	-0,16	-	110,18	110,18	-	-	110,18	110,18
F61	Cadangan teknis asuransi nonjiwa	-0,16		22,59	22,59	-	-	22,59	22,59
F62	Hak anuitas dan asuransi jiwa			75,19	75,19	-	-	75,19	75,19
F63	Hak pensiunan			12,40	12,40	-	-	12,40	12,40
F7	Transaksi derivatives	-	-	-31,59	-26,83	-16,31	-21,08	-47,90	-47,90
F8	Hutang/Piutang lainnya	0,05	-	176,62	147,26	31,79	61,15	208,41	208,41
F81	Kredit dagang dan pembayaran dimuka	-	-	50,20	45,91	44,66	48,95	94,87	94,87
F89	Hutang/Piutang lainnya	0,05	-	126,42	101,35	-12,88	12,20	113,54	113,54
	TOTAL	80,35	80,35	9.241,59	9.241,59	325,05	325,05	9.566,63	9.566,63

Keterangan:

Δ Aset

= Perubahan Aset

Δ Kewajiban

= Perubahan Kewajiban

*

= Angka Sementara

**

= Angka Sangat Sementara

= Angka Sangat Sangat Sementara

Lampiran 3.3 Neraca Arus Dana Indonesia, 2022 (Triliun Rp)

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	KORPORASI NONFINANSIAL		KORPORASI FINANSIAL		PEMERINTAH		RUMAH TANGGA	
		ΔAset	ΔKewajiban	ΔAset	ΔKewajiban	ΔAset	ΔKewajiban	ΔAset	ΔKewajiban
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
B8g	Tabungan Bruto		4.098,41		821,56		-6,41		1.008,73
P5g	Investasi Nonfinansial	4.111,58		107,11		524,95		1.008,21	
B9c	Pinjaman Neto (B8g-P5g)	-13,17		714,45		-531,36		0,52	
	Selisih Statistik(B9c-B9f)	57,92		66,46		-1,02		-134,18	
B9f	Perubahan neto investasi finansial (A-L)		-71,09		647,99		-530,34		134,69
A	Perolehan neto aset finansial	1.312,53		1.509,97		168,39		530,79	
L	Perolehan neto kewajiban finansial		1.383,62		861,98		698,73		396,10
F1	Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus			-					
F11	Emas Moneter			-					
F12	Hak Tarik Khusus			-					
F2	Uang dan Simpanan	496,95		156,61	804,63	78,69		176,36	
F21	Uang	84,50		2,72	66,67	1,46		-24,43	
F22	Transferable deposits	297,37		155,02	513,73	6,79		138,30	
F29	Simpanan lainnya	115,08		-1,14	224,23	70,44		62,49	
F3	Surat Berharga	117,88	33,15	502,08	-61,49	-	658,63	229,66	
F31	Jangka pendek	-0,51	-4,75	-59,04	-70,00	-	10,57	0,69	
F32	Jangka panjang	118,38	37,90	561,12	8,50	-	648,06	228,97	
F4	Pinjaman	68,16	312,35	713,66	70,86	-13,56	40,10	-4,95	296,44
F41	Jangka pendek	38,08	110,46	211,01	16,19	4,19	32,89	-16,59	21,94
F42	Jangka panjang	30,08	201,89	502,66	54,67	-17,75	7,21	11,63	274,50
F5	Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif	498,61	994,24	106,26	48,63	74,46	-	72,98	-
F51	Ekuitas	500,74	994,24	162,39	122,21	74,46		72,63	
F52	Unit Penyertaan Investasi Kolektif	-2,13	-	-56,13	-73,58	-		0,35	
F6	Asuransi, Dana Pensiun dan Jaminan Terstandar	6,18	-	0,25	-23,38	-	-	-29,78	
F61	Cadangan teknis asuransi nonjiwa	6,18		0,25	6,82	-		0,43	
F62	Hak anuitas dan asuransi jiwa				-46,23			-46,23	
F63	Hak pensiunan				16,02			16,02	
F7	Transaksi derivatives	4,99	0,08	-12,95	-8,14	-	-	0,05	0,83
F8	Hutang/Piutang lainnya	119,78	43,81	44,06	30,89	28,79	-	86,47	98,83
F81	Kredit dagang dan pembayaran dimuka	30,50	-11,88	0,09	-1,18	-	-	38,26	30,10
F89	Hutang/Piutang lainnya	89,27	55,69	43,97	32,07	28,79	-	48,21	68,73
	TOTAL	5.410,95	5.410,95	2.331,53	2.331,53	161,97	161,97	1.539,52	1.539,52

Lanjutan Lampiran 3.3

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	LNPRT		TOTAL EKONOMI DOMESTIK		LUAR NEGERI		TOTAL	
		ΔAset	ΔKewajiban	ΔAset	ΔKewajiban	ΔAset	ΔKewajiban	ΔAset	ΔKewajiban
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
B8g	Tabungan Bruto		101,88		6.024,17		-197,52		5.826,65
P5g	Investasi Nonfinansial	74,79		5.826,65				5.826,65	
B9c	Pinjaman Neto (B8g-P5g)	27,09		197,52		-197,52		-	
	Selisih Statistik(B9c-B9f)	12,26		1,44		-1,44		-	
B9f	Perubahan neto investasi finansial (A-L)		14,83		196,08		-196,08		-
A	Perolehan neto aset finansial	14,30		3.535,98		240,81		3.776,80	
L	Perolehan neto kewajiban finansial		-0,53		3.339,90		436,90		3.776,80
F1	Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus			-		-		-	-
F11	Emas Moneter			-		-		-	-
F12	Hak Tarik Khusus			-		-		-	-
F2	Uang dan Simpanan	8,71		917,33	804,63	6,62	119,32	923,95	923,95
F21	Uang	4,46		68,72	66,67	-	2,05	68,72	68,72
F22	Transferable deposits	3,12		600,60	513,73	3,85	90,72	604,45	604,45
F29	Simpanan lainnya	1,13		248,02	224,23	2,77	26,55	250,79	250,79
F3	Surat Berharga	-		849,61	630,29	-106,89	112,44	742,72	742,72
F31	Jangka pendek	-		-58,86	-64,18	-5,32	-	-64,18	-64,18
F32	Jangka panjang	-		908,47	694,47	-101,56	112,44	806,90	806,90
F4	Pinjaman	5,18	-0,53	768,49	719,21	11,70	60,97	780,19	780,19
F41	Jangka pendek	-	-	236,69	181,48	-42,27	12,95	194,43	194,43
F42	Jangka panjang	5,18	-0,53	531,79	537,74	53,97	48,02	585,76	585,76
F5	Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif	0,29	-	752,60	1.042,87	348,09	57,82	1.100,69	1.100,69
F51	Ekuitas	0,16		810,39	1.116,45	363,88	57,82	1.174,27	1.174,27
F52	Unit Penyertaan Investasi Kolektif	0,13		-57,78	-73,58	-15,80	-	-73,58	-73,58
F6	Asuransi, Dana Pensiun dan Jaminan Terstandar	-0,04	-	-23,38	-23,38	-	-	-23,38	-23,38
F61	Cadangan teknis asuransi nonjiwa	-0,04		6,82	6,82	-	-	6,82	6,82
F62	Hak anuitas dan asuransi jiwa			-46,23	-46,23	-	-	-46,23	-46,23
F63	Hak pensiunan			16,02	16,02	-	-	16,02	16,02
F7	Transaksi derivatives	-	-	-7,91	-7,24	-19,29	-19,96	-27,20	-27,20
F8	Hutang/Piutang lainnya	0,16	-	279,25	173,53	0,58	106,31	279,83	279,83
F81	Kredit dagang dan pembayaran dimuka	-	-	68,85	17,04	2,13	53,95	70,99	70,99
F89	Hutang/Piutang lainnya	0,16	-	210,39	156,49	-1,55	52,36	208,85	208,85
	TOTAL	116,18	116,18	9.560,15	9.560,15	43,29	43,29	9.603,45	9.603,45

Keterangan:

Δ Aset

= Perubahan Aset

Δ Kewajiban

= Perubahan Kewajiban

*

= Angka Sementara

**

= Angka Sangat Sementara

= Angka Sangat Sangat Sementara

Lampiran 3.4 Neraca Arus Dana Indonesia, 2023** (Triliun Rp)

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	KORPORASI NON FINANSIAL		KORPORASI FINANSIAL		PEMERINTAH		RUMAH TANGGA	
		ΔAset	ΔKewajiban	ΔAset	ΔKewajiban	ΔAset	ΔKewajiban	ΔAset	ΔKewajiban
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
B8g	Tabungan Bruto	4.027,64		885,05		370,47		954,57	
P5g	Investasi Nonfinansial	4.664,14		82,76		610,23		900,52	
B9c	Pinjaman Neto (B8g-P5g)	-636,50		802,29		-239,76		54,05	
	Selisih Statistik(B9c-B9f)	-351,93		428,47		108,97		-136,94	
B9f	Perubahan neto investasi finansial (A-L)	-284,57		373,82		-348,73		190,99	
A	Perolehan neto aset finansial	1.123,32		841,86		37,54		556,53	
L	Perolehan neto kewajiban finansial	1.407,89		468,04		386,27		365,54	
F1	Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus			-					
F11	Emas Moneter			-					
F12	Hak Tarik Khusus			-					
F2	Uang dan Simpanan	225,31		82,31	203,20	-31,90		237,41	
F21	Uang	33,04		-2,71	75,26	4,32		35,10	
F22	Transferable deposits	262,79		-158,87	-76,77	-34,99		59,62	
F29	Simpanan lainnya	-70,53		243,90	204,70	-1,23		142,69	
F3	Surat Berharga	99,28	-46,49	22,21	258,13	-	311,45	211,32	
F31	Jangka pendek	3,99	-0,07	190,20	269,55	-	-21,40	-0,35	
F32	Jangka panjang	95,29	-46,42	-167,99	-11,42	-	332,85	211,67	
F4	Pinjaman	73,44	391,72	675,06	-64,70	-20,69	74,82	0,20	329,14
F41	Jangka pendek	59,12	-23,60	-18,96	-84,91	-	-9,60	0,09	36,22
F42	Jangka panjang	14,32	415,32	694,02	20,21	-20,69	84,42	0,11	292,92
F5	Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif	693,72	1.064,03	32,46	34,52	64,96	-	75,37	-
F51	Ekuitas	691,79	1.064,03	11,99	37,92	64,96		78,33	
F52	Unit Penyertaan Investasi Kolektif	1,93	-	20,47	-3,40	-		-2,96	
F6	Asuransi, Dana Pensiun dan Jaminan Terstandar	8,87	-	0,32	18,05	-	-	8,85	
F61	Cadangan teknis asuransi nonjiwa	8,87		0,32	10,05	-		0,85	
F62	Hak anuitas dan asuransi jiwa				-17,87			-17,87	
F63	Hak pensiunan				25,87			25,87	
F7	Transaksi derivatives	-2,25	-0,03	-20,54	-19,27	-0,09	-	0,05	-1,01
F8	Hutang/Piutang lainnya	24,95	-1,34	50,04	38,12	25,26	-	23,33	37,40
F81	Kredit dagang dan pembayaran dimuka	28,35	-12,99	4,17	1,17	-	-	1,34	-1,31
F89	Hutang/Piutang lainnya	-3,40	11,65	45,87	36,95	25,26	-	21,99	38,71
	TOTAL	5.150,96	5.150,96	1.726,91	1.726,91	408,01	408,01	1.511,11	1.511,11

Lanjutan Lampiran 3.4

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	LNPRT		TOTAL EKONOMI DOMESTIK		LUAR NEGERI		TOTAL	
		ΔAset	ΔKewajiban	ΔAset	ΔKewajiban	ΔAset	ΔKewajiban	ΔAset	ΔKewajiban
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
B8g	Tabungan Bruto		70,82	6.308,55		30,72		6.339,27	
P5g	Investasi Nonfinansial	81,62		6.339,27				6.339,27	
B9c	Pinjaman Neto (B8g-P5g)	-10,80		-30,72		30,72		-	
	Selisih Statistik(B9c-B9f)	-10,31		38,26		-38,26		-	
B9f	Perubahan neto investasi finansial (A-L)		-0,49		-68,98		68,98		-
A	Perolehan neto aset finansial	3,32		2.562,57		464,95		3.027,52	
L	Perolehan neto kewajiban finansial		3,81		2.631,55		395,96		3.027,52
F1	Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus			-		-		-	-
F11	Emas Moneter			-		-		-	-
F12	Hak Tarik Khusus			-		-		-	-
F2	Uang dan Simpanan	14,73		527,87	203,20	11,81	336,48	539,68	539,68
F21	Uang	5,61		75,36	75,26	-	0,10	75,36	75,36
F22	Transferable deposits	3,98		132,53	-76,77	3,63	212,93	136,16	136,16
F29	Simpanan lainnya	5,14		319,97	204,70	8,18	123,45	328,15	328,15
F3	Surat Berharga	-		332,81	523,08	75,68	-114,60	408,49	408,49
F31	Jangka pendek	-		193,84	248,08	54,24	-	248,08	248,08
F32	Jangka panjang	-		138,97	275,01	21,44	-114,60	160,41	160,41
F4	Pinjaman	0,01	3,81	728,02	734,79	77,82	71,05	805,85	805,85
F41	Jangka pendek	-	-	40,25	-81,89	-83,36	38,78	-43,11	-43,11
F42	Jangka panjang	0,01	3,81	687,77	816,68	161,19	32,28	848,95	848,95
F5	Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif	-11,47	-	855,04	1.098,55	309,53	66,02	1.164,57	1.164,57
F51	Ekuitas	-0,54		846,53	1.101,95	321,44	66,02	1.167,97	1.167,97
F52	Unit Penyertaan Investasi Kolektif	-10,93		8,51	-3,40	-11,91	-	-3,40	-3,40
F6	Asuransi, Dana Pensiun dan Jaminan Terstandar	0,01	-	18,05	18,05	-	-	18,05	18,05
F61	Cadangan teknis asuransi nonjiwa	0,01		10,05	10,05	-	-	10,05	10,05
F62	Hak anuitas dan asuransi jiwa			-17,87	-17,87	-	-	-17,87	-17,87
F63	Hak pensiunan			25,87	25,87	-	-	25,87	25,87
F7	Transaksi derivatives	-0,09	-	-22,92	-20,30	-13,02	-15,64	-35,94	-35,94
F8	Hutang/Piutang lainnya	0,12	-	123,70	74,18	3,12	52,64	126,82	126,82
F81	Kredit dagang dan pembayaran dimuka	-	-	33,86	-13,13	-28,66	18,33	5,20	5,20
F89	Hutang/Piutang lainnya	0,12	-	89,84	87,31	31,78	34,31	121,63	121,63
	TOTAL	74,13	74,13	8.871,12	8.871,12	495,67	495,67	9.366,79	9.366,79

Keterangan:

Δ Aset

= Perubahan Aset

Δ Kewajiban

= Perubahan Kewajiban

*

= Angka Sementara

**

= Angka Sangat Sementara

= Angka Sangat Sangat Sementara

Lampiran 3.5 Neraca Arus Dana Indonesia, 2024*** (Triliun Rp)

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	KORPORASI NON FINANSIAL		KORPORASI FINANSIAL		PEMERINTAH		RUMAH TANGGA	
		ΔAset	ΔKewajiban	ΔAset	ΔKewajiban	ΔAset	ΔKewajiban	ΔAset	ΔKewajiban
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
B8g	Tabungan Bruto Investasi		4.865,95		545,65		189,98		1.117,41
P5g	Nonfinansial Pinjaman Neto	4.920,20		119,88		736,52		1.086,01	
B9c	(B8g-P5g)	-54,25		425,76		-546,54		31,40	
	Selisih Statistik(B9c-B9f)	42,13		205,17		-41,25		-151,39	
B9f	Perubahan neto investasi finansial (A-L)		-96,38		220,59		-505,28		182,79
A	Perolehan neto aset finansial	812,30		1.067,28		27,02		424,86	
L	Perolehan neto kewajiban finansial		908,68		846,69		532,30		242,07
F1	Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus			-					
F11	Emas Moneter			-					
F12	Hak Tarik Khusus			-					
F2	Uang dan Simpanan	256,19		-12,11	125,20	-4,47		-26,21	
F21	Uang	19,37		15,32	102,79	-1,68		67,91	
F22	Transferable deposits	78,17		-880,47	-282,61	-11,08		-153,42	
F29	Simpanan lainnya	158,65		853,04	305,03	8,29		59,30	
F3	Surat Berharga	256,38	-16,54	531,37	654,75	-	445,63	219,76	
F31	Jangka pendek	1,91	-3,10	440,19	646,13	-	-42,39	8,39	
F32	Jangka panjang	254,47	-13,43	91,18	8,61	-	488,02	211,37	
F4	Pinjaman	85,40	355,14	510,30	-34,30	-26,31	86,67	2,19	200,22
F41	Jangka pendek	65,64	-35,36	-39,96	-55,80	-	22,36	0,73	10,33
F42	Jangka panjang	19,76	390,50	550,25	21,49	-26,31	64,30	1,47	189,89
F5	Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif	-67,11	552,75	221,91	71,06	50,32		161,73	
F51	Ekuitas	-68,96	552,75	240,74	74,49	50,32		159,52	
F52	Unit Penyertaan Investasi Kolektif	1,86	-	-18,83	-3,43	-		2,21	
F6	Asuransi, Dana Pensiun dan Jaminan Terstandar	28,08	-	1,06	40,11	-		10,88	
F61	Cadangan teknis asuransi nonjiwa	28,08		1,06	31,69	-		2,46	
F62	Hak anuitas dan asuransi jiwa				-5,15			-5,15	
F63	Hak pensiunan				13,57			13,57	
F7	Transaksi derivatives	3,21	5,71	-10,06	-7,04	-	-	0,43	-0,28
F8	Hutang/Piutang lainnya	250,16	11,62	-175,17	-3,08	7,48	-	56,09	42,13
F81	Kredit dagang dan pembayaran dimuka	20,84	-30,42	-4,12	1,09	-	-	8,68	7,90
F89	Hutang/Piutang lainnya	229,32	42,04	-171,05	-4,16	7,48	-	47,40	34,22
	TOTAL	5.678,25	5.678,25	1.612,93	1.612,93	217,00	4.1217,00	1.542,27	1.542,27

Lanjutan Lampiran 3.5

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	LNPR		TOTAL EKONOMI DOMESTIK		LUAR NEGERI		TOTAL	
		ΔAset	ΔKewajiban	ΔAset	ΔKewajiban	ΔAset	ΔKewajiban	ΔAset	ΔKewajiban
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
B8g	Tabungan Bruto		97,23		6.816,22		134,61		6.950,83
P5g	Investasi Nonfinansial	88,21		6.950,83				6.950,83	
B9c	Pinjaman Neto (B8g-P5g)	9,02		-134,61		134,61		-	
	Selisih Statistik(B9c-B9f)	1,12		55,77		-55,77		-	
B9f	Perubahan neto investasi finansial (A-L)		7,90		-190,38		190,38	-	-
A	Perolehan neto aset finansial	11,96		2.343,43		721,88		3.065,30	
L	Perolehan neto kewajiban finansial		4,06		2.533,81		531,50		3.065,30
F1	Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus			-		-		-	-
F11	Emas Moneter			-		-		-	-
F12	Hak Tarik Khusus-			-		-		-	-
F2	Uang dan Simpanan	10,88		224,27	125,20	44,17	143,23	268,43	268,43
F21	Uang	2,79		103,70	102,79	-	0,91	103,70	103,70
F22	Transferable deposits	5,01		-961,79	-282,61	43,63	-635,55	-918,16	-918,16
F29	Simpanan lainnya	3,08		1.082,36	305,03	0,54	777,87	1.082,89	1.082,89
F3	Surat Berharga	-0		1.007,51	1.083,84	210,50	134,17	1.218,01	1.218,01
F31	Jangka pendek	-0		450,50	600,64	150,14	-	600,64	600,64
F32	Jangka panjang	-		557,01	483,20	60,36	134,17	617,37	617,37
F4	Pinjaman	0,07	4,06	571,65	611,79	124,93	84,79	696,58	696,58
F41	Jangka pendek	-	-	26,41	-58,46	-34,76	50,11	-8,35	-8,35
F42	Jangka panjang	0,07	4,06	545,24	670,25	159,69	34,68	704,93	704,93
F5	Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif	0,83	-	367,67	623,81	340,42	84,29	708,09	708,09
F51	Ekuitas	0,10		381,71	627,24	329,82	84,29	711,52	711,52
F52	Unit Penyertaan Investasi Kolektif	0,73		-14,04	-3,43	10,61	-	-3,43	-3,43
F6	Asuransi, Dana Pensiun dan Jaminan Terstandar	0,09	-	40,11	40,11	-	-	40,11	40,11
F61	Cadangan teknis asuransi nonjiwa	0,09		31,69	31,69	-	-	31,69	31,69
F62	Hak anuitas dan asuransi jiwa			-5,15	-5,15	-	-	-5,15	-5,15
F63	Hak pensiunan			13,57	13,57	-	-	13,57	13,57
F7	Transaksi derivatives	-	-	-6,42	-1,61	-15,04	-19,86	-21,46	-21,46
F8	Hutang/Piutang lainnya	0,09		138,64	50,67	16,90	104,88	155,55	155,55
F81	Kredit dagang dan pembayaran dimuka	-	-	25,40	-21,43	17,77	64,60	43,16	43,16
F89	Hutang/Piutang lainnya	0,09	-	113,24	72,10	-0,86	40,28	112,38	112,38
	TOTAL	109,19	109,19	9.159,65	9.159,65	856,48	856,48	10.016,13	10.016,13

Keterangan:

Δ Aset

= Perubahan Aset

Δ Kewajiban

= Perubahan Kewajiban

*

= Angka Sementara

**

= Angka Sangat Sementara

= Angka Sangat Sangat Sementara



LAMPIRAN IV

MATRIKS NERACA ARUS DANA INDONESIA MENURUT SEKTOR

<https://www.bps.go.id>

<https://www.bps.go.id>

Lampiran 4.1 Neraca Arus Dana Korporasi Nonfinansial (Triliun Rp)

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	2020		2021		2022*	
		ΔAset	ΔKewajiban	ΔAset	ΔKewajiban	ΔAset	ΔKewajiban
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
B8g	Tabungan Bruto		4.161,60		4.084,53		4.098,41
P5g	Investasi NonFinansial	3.696,02		3.904,13		4.111,58	
B9c	Pinjaman Neto (B8g-P5g)	465,58		180,40		-13,17	
	Selisih Statistik(B9c-B9f)	363,76		-0,68		57,92	
B9f	Perubahan neto investasi finansial (A-L)		101,82		181,08		-71,09
A	Perolehan neto aset finansial	683,19		1.201,14		1.312,53	
L	Perolehan neto kewajiban finansial		581,36		1.020,05		1.383,62
F1	Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus						
F11	Emas Moneter						
F12	Hak Tarik Khusus						
F2	Uang dan Simpanan	332,05		612,75		496,95	
F21	Uang	39,58		81,41		84,50	
F22	Transferable deposits	213,86		475,94		297,37	
F29	Simpanan lainnya	78,60		55,40		115,08	
F3	Surat Berharga	4,23	101,48	6,33	54,95	117,88	33,15
F31	Jangka pendek	-2,81	-4,16	0,78	-15,05	-0,51	-4,75
F32	Jangka panjang	7,04	105,64	5,55	70,00	118,38	37,90
F4	Pinjaman	36,49	-95,93	32,92	-4,52	68,16	312,35
F41	Jangka pendek	4,36	12,72	11,02	-177,37	38,08	110,46
F42	Jangka panjang	32,13	-108,65	21,90	172,85	30,08	201,89
F5	Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif	169,13	533,85	531,72	828,22	498,61	994,24
F51	Ekuitas	168,35	533,85	532,49	828,22	500,74	994,24
F52	Unit Penyertaan Investasi Kolektif	0,79	-	-0,77	-	-2,13	-
F6	Asuransi, Dana Pensiun dan Jaminan Terstandar	-3,97	-	19,89	-	6,18	-
F61	Cadangan teknis asuransi non-jiwa	-3,97	-	19,89	-	6,18	-
F62	Hak anuitas dan asuransi jiwa						
F63	Hak pensiunan						
F7	Transaksi derivatives	0,23	3,22	-0,12	-4,17	4,99	0,08
F8	Hutang/Piutang lainnya	145,02	38,75	-2,36	145,56	119,78	43,81
F81	Kredit dagang dan pembayaran dimuka	135,26	-10,00	35,89	63,13	30,50	-11,88
F89	Hutang/Piutang lainnya	9,76	48,75	-38,24	82,44	89,27	55,69
	TOTAL	4.844,78	4.844,78	5.285,67	5.285,67	5.410,95	5.410,95

Lanjutan Lampiran 4.1

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	2023**		2024***	
		ΔAset	ΔKewajiban	ΔAset	ΔKewajiban
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
B8g	Tabungan Bruto		4.027,64		4.865,95
P5g	Investasi NonFinansial	4.664,14		4.920,20	
B9c	Pinjaman Neto (B8g-P5g)	-636,50		-54,25	
	<i>Selisih Statistik(B9c-B9f)</i>	-351,93		42,13	
B9f	Perubahan neto investasi finansial (A-L)		-284,57		-96,38
A	Perolehan neto aset finansial	1.123,32		812,30	
L	Perolehan neto kewajiban finansial		1.407,89		908,68
F1	Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus				
F11	Emas Moneter				
F12	Hak Tarik Khusus				
F2	Uang dan Simpanan	225,31		256,19	
F21	Uang	33,04		19,37	
F22	<i>Transferable deposits</i>	262,79		78,17	
F29	Simpanan lainnya	-70,53		158,65	
F3	Surat Berharga	99,28	-46,49	256,38	-16,54
F31	Jangka pendek	3,99	-0,07	1,91	-3,10
F32	Jangka panjang	95,29	-46,42	254,47	-13,43
F4	Pinjaman	73,44	391,72	85,40	355,14
F41	Jangka pendek	59,12	-23,60	65,64	-35,36
F42	Jangka panjang	14,32	415,32	19,76	390,50
F5	Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif	693,72	1.064,03	-67,11	552,75
F51	Ekuitas	691,79	1.064,03	-68,96	552,75
F52	Unit Penyertaan Investasi Kolektif	1,93	—	1,86	—
F6	Asuransi, Dana Pensiun dan Jaminan Terstandar	8,87	—	28,08	—
F61	Cadangan teknis asuransi non-jiwa	8,87	—	28,08	—
F62	Hak anuitas dan asuransi jiwa				
F63	Hak pensiunan				
F7	Transaksi <i>derivatives</i>	-2,25	-0,03	3,21	5,71
F8	Hutang/Piutang lainnya	24,95	-1,34	250,16	11,62
F81	Kredit dagang dan pembayaran dimuka	28,35	-12,99	20,84	-30,42
F82	Hutang/Piutang lainnya	-3,40	11,65	229,32	42,04
	TOTAL	5.150,96	5.150,96	5.678,25	5.678,25

Keterangan:

Δ Aset = Perubahan Aset

Δ Kewajiban = Perubahan Kewajiban

* = Angka Sementara

** = Angka Sangat Sementara

*** = Angka Sangat Sangat Sementara

Lampiran 4.2 Neraca Arus Dana Korporasi Finansial (Triliun Rp)

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	2020		2021		2022*	
		ΔAset	ΔKewajiban	ΔAset	ΔKewajiban	ΔAset	ΔKewajiban
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
B8g	Tabungan Bruto		349,54		378,81		821,56
P5g	Investasi NonFinansial	115,42		78,26		107,11	
B9c	Pinjaman Neto (B8g-P5g)	234,12		300,54		714,45	
	Selisih Statistik(B9c-B9f)	70,37		128,13		66,46	
B9f	Perubahan neto investasi finansial (A-L)		163,75		172,42		647,99
A	Perolehan neto aset finansial	1.444,89		1.762,91		1.509,97	
L	Perolehan neto kewajiban finansial		1.281,14		1.590,50		861,98
F1	Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus	—		90,77	90,77	—	
F11	Emas Moneter	—		—	—	—	
F12	Hak Tarik Khusus	—		90,77	90,77	—	
F2	Uang dan Simpanan	90,24	936,41	496,66	1.176,91	156,61	804,63
F21	Uang	-1,84	105,14	-11,32	60,94	2,72	66,67
F22	Transferable deposits	102,72	466,98	402,87	839,42	155,02	513,73
F29	Simpanan lainnya	-10,64	364,29	105,11	276,55	-1,14	224,23
F3	Surat Berharga	1.038,11	-64,12	835,51	36,11	502,08	-61,49
F31	Jangka pendek	-70,54	-68,73	4,14	27,46	-59,04	-70,00
F32	Jangka panjang	1.108,65	4,61	831,37	8,65	561,12	8,50
F4	Pinjaman	188,41	271,35	176,01	-137,00	713,66	70,86
F41	Jangka pendek	382,56	308,89	-167,31	-98,46	211,01	16,19
F42	Jangka panjang	-194,14	-37,54	343,32	-38,53	502,66	54,67
F5	Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif	24,56	125,46	41,43	494,44	106,26	48,63
F51	Ekuitas	-3,12	94,11	41,06	489,55	162,39	122,21
F52	Unit Penyertaan Investasi Kolektif	27,68	31,35	0,37	4,89	-56,13	-73,58
F6	Asuransi, Dana Pensiun dan Jaminan Terstandar	-0,08	-4,25	0,71	110,18	0,25	-23,38
F61	Cadangan teknis asuransi non-jiwa	-0,08	-4,73	0,71	22,59	0,25	6,82
F62	Hak anuitas dan asuransi jiwa		-22,06		75,19		-46,23
F63	Hak pensiunan		22,55		12,40		16,02
F7	Transaksi derivatives	-14,12	-16,30	-31,27	-22,97	-12,95	-8,14
F8	Hutang/Piutang lainnya	117,77	32,58	153,09	-157,95	44,06	30,89
F81	Kredit dagang dan pembayaran dimuka	0,32	0,05	0,01	-27,15	0,09	-1,18
F89	Hutang/Piutang lainnya	117,45	32,53	153,08	-130,80	43,97	32,07
	TOTAL	1.794,43	1.794,43	2.141,72	2.141,72	2.331,53	2.331,53

Lanjutan Lampiran 4.2

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	2023**		2024***	
		ΔAset	ΔKewajiban	ΔAset	ΔKewajiban
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
B8g	Tabungan Bruto		885,05		545,65
P5g	Investasi NonFinansial	82,76		119,88	
B9c	Pinjaman Neto (B8g-P5g)	802,29		425,76	
	<i>Selisih Statistik(B9c-B9f)</i>	428,47		205,17	
B9f	Perubahan neto investasi finansial (A-L)		373,82		220,59
A	Perolehan neto aset finansial	841,86		1.067,28	
L	Perolehan neto kewajiban finansial		468,04		846,69
F1	Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus	—		—	
F11	Emas Moneter	—		—	
F12	Hak Tarik Khusus	—		—	
F2	Uang dan Simpanan	82,31	203,20	-12,11	125,21
F21	Uang	-2,71	75,26	15,32	102,79
F22	<i>Transferable deposits</i>	-158,87	-76,77	-880,47	-282,61
F29	Simpanan lainnya	243,90	204,70	853,04	305,03
F3	Surat Berharga	22,21	258,13	531,37	654,74
F31	Jangka pendek	190,20	269,55	440,19	646,13
F32	Jangka panjang	-167,99	-11,42	91,18	8,61
F4	Pinjaman	675,06	-64,70	510,30	-34,30
F41	Jangka pendek	-18,96	-84,91	-39,96	-55,80
F42	Jangka panjang	694,02	20,21	550,25	21,49
F5	Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif	32,46	34,52	221,91	71,06
F51	Ekuitas	11,99	37,92	240,74	74,49
F52	Unit Penyertaan Investasi Kolektif	20,47	-3,40	-18,83	-3,43
F6	Asuransi, Dana Pensiun dan Jaminan Terstandar	0,32	18,05	1,06	40,11
F61	Cadangan teknis asuransi non-jiwa	0,32	10,05	1,06	31,69
F62	Hak anuitas dan asuransi jiwa		-17,87		-5,15
F63	Hak pensiunan		25,87		13,57
F7	Transaksi <i>derivatives</i>	-20,54	-19,27	-10,06	-7,04
F8	Hutang/Piutang lainnya	50,04	38,12	-175,17	-3,08
F81	Kredit dagang dan pembayaran dimuka	4,17	1,17	-4,12	1,09
F82	Hutang/Piutang lainnya	45,87	36,95	-171,05	-4,16
	TOTAL	1.726,91	1.726,91	1.612,93	1.612,93

Keterangan:

Δ Aset = Perubahan Aset

Δ Kewajiban = Perubahan Kewajiban

* = Angka Sementara

** = Angka Sangat Sementara

*** = Angka Sangat Sangat Sementara

Lampiran 4.3 Neraca Arus Dana Pemerintah (Triliun Rp)

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	2020		2021		2022*	
		ΔAset	ΔKewajiban	ΔAset	ΔKewajiban	ΔAset	ΔKewajiban
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
B8g	Tabungan Bruto		-438,79		-140,59		-6,41
P5g	Investasi NonFinansial	427,77		538,45		524,95	
B9c	Pinjaman Neto (B8g-P5g)	-866,56		-679,04		-531,36	
	Selisih Statistik(B9c-B9f)	79,18		36,26		-1,02	
B9f	Perubahan neto investasi finansial (A-L)		-945,74		-715,30		-530,34
A	Perolehan neto aset finansial	291,77		166,55		168,39	
L	Perolehan neto kewajiban finansial		1.237,51		881,86		698,73
F1	Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus						
F11	Emas Moneter						
F12	Hak Tarik Khusus						
F2	Uang dan Simpanan	190,17		-42,49		78,69	
F21	Uang	4,84		0,01		1,46	
F22	Transferable deposits	129,12		-33,19		6,79	
F29	Simpanan lainnya	56,20		-9,32		70,44	
F3	Surat Berharga	-	1.177,00	-	875,99	-	658,63
F31	Jangka pendek	-	-31,22	-	-13,59	-	10,57
F32	Jangka panjang	-	1.208,22	-	889,58	-	648,06
F4	Pinjaman	8,68	60,51	12,54	5,87	-13,56	40,10
F41	Jangka pendek	-2,62	7,31	0,10	26,98	4,19	32,89
F42	Jangka panjang	11,29	53,20	12,44	-21,11	-17,75	7,21
F5	Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif	92,92		182,16		74,46	
F51	Ekuitas	92,92		182,16		74,46	
F52	Unit Penyertaan Investasi Kolektif	-		-		-	
F6	Asuransi, Dana Pensiun dan Jaminan Terstandar	-		-		-	
F61	Cadangan teknis asuransi non-jiwa	-		-		-	
F62	Hak anuitas dan asuransi jiwa	-		-		-	
F63	Hak pensiunan	-		-		-	
F7	Transaksi derivatives	-	-	-	-	-	-
F8	Hutang/Piutang lainnya	-	-	-	-	-	-
F81	Kredit dagang dan pembayaran dimuka	-	-	-	-	-	-
F89	Hutang/Piutang lainnya	-	-	14,35	-	28,79	-
	TOTAL	-147,02	-147,02	25,96	25,96	161,97	161,97

Lanjutan Lampiran 4.3

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	2023**		2024***	
		ΔAset	ΔKewajiban	ΔAset	ΔKewajiban
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
B8g	Tabungan Bruto		370,47		189,98
P5g	Investasi NonFinansial	610,23		736,52	
B9c	Pinjaman Neto (B8g-P5g)	-239,76		-546,54	
	<i>Selisih Statistik(B9c-B9f)</i>	108,97		-41,25	
B9f	Perubahan neto investasi finansial (A-L)		-348,73		-505,28
A	Perolehan neto aset finansial	37,54		27,02	
L	Perolehan neto kewajiban finansial		386,27		532,30
F1	Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus				
F11	Emas Moneter				
F12	Hak Tarik Khusus				
F2	Uang dan Simpanan	-31,90		-4,47	
F21	Uang	4,32		-1,68	
F22	<i>Transferable deposits</i>	-34,99		-11,08	
F29	Simpanan lainnya	-1,23		8,29	
F3	Surat Berharga	-	311,45	-	445,63
F31	Jangka pendek	-	-21,40	-	-42,39
F32	Jangka panjang	-	332,85	-	488,02
F4	Pinjaman	-20,69	74,82	-26,31	86,67
F41	Jangka pendek	-	-9,60	-	22,36
F42	Jangka panjang	-20,69	84,42	-26,31	64,30
F5	Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif	64,96		50,32	
F51	Ekuitas	64,96		50,32	
F52	Unit Penyertaan Investasi Kolektif	-		-	
F6	Asuransi, Dana Pensiun dan Jaminan Terstandar	-		-	
F61	Cadangan teknis asuransi non-jiwa	-		-	
F62	Hak anuitas dan asuransi jiwa				
F63	Hak pensiunan				
F7	Transaksi <i>derivatives</i>	-0,09	-	-	-
F8	Hutang/Piutang lainnya	25,26	-	7,48	-
F81	Kredit dagang dan pembayaran dimuka	-	-	-	-
F82	Hutang/Piutang lainnya	25,26	-	7,48	-
	TOTAL	408,01	408,01	217,00	217,00

Keterangan:

Δ Aset = Perubahan Aset

Δ Kewajiban = Perubahan Kewajiban

* = Angka Sementara

** = Angka Sangat Sementara

*** = Angka Sangat Sangat Sementara

Lampiran 4.4 Neraca Arus Dana Rumah Tangga (Triliun Rp)

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	2020		2021		2022*	
		ΔAset	ΔKewajiban	ΔAset	ΔKewajiban	ΔAset	ΔKewajiban
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
B8g	Tabungan Bruto		782,52		995,63		1.008,73
P5g	Investasi NonFinansial	681,74		752,26		1.008,21	
B9c	Pinjaman Neto (B8g-P5g)	100,78		243,37		0,52	
	Selisih Statistik(B9c-B9f)	-496,38		-117,20		-134,18	
B9f	Perubahan neto investasi finansial (A-L)		597,16		360,57		134,69
A	Perolehan neto aset finansial	804,95		712,25		530,79	
L	Perolehan neto kewajiban finansial		207,79		351,68		396,10
F1	Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus						
F11	Emas Moneter						
F12	Hak Tarik Khusus						
F2	Uang dan Simpanan	409,85		161,54		176,36	
F21	Uang	59,24		-10,31		-24,43	
F22	Transferable deposits	161,37		27,63		138,30	
F29	Simpanan lainnya	189,23		144,22		62,49	
F3	Surat Berharga	107,23		183,55		229,66	
F31	Jangka pendek	-0,08		-0,07		0,69	
F32	Jangka panjang	107,31		183,61		228,97	
F4	Pinjaman	1,06	21,75	0,14	191,72	-4,95	296,44
F41	Jangka pendek	0,28	11,13	0,11	-2,29	-16,59	21,94
F42	Jangka panjang	0,79	10,62	0,03	194,00	11,63	274,50
F5	Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif	218,99		265,99		72,98	
F51	Ekuitas	218,86		266,10		72,63	
F52	Unit Penyertaan Investasi Kolektif	0,13		-0,11		0,35	
F6	Asuransi, Dana Pensiun dan Jaminan Terstandar	-0,17		89,74		-29,78	
F61	Cadangan teknis asuransi non-jiwa	-0,65		2,15		0,43	
F62	Hak anuitas dan asuransi jiwa	-22,06		75,19		-46,23	
F63	Hak pensiunan	22,55		12,40		16,02	
F7	Transaksi derivatives	0,33	-0,09	-0,19	0,31	0,05	0,83
F8	Hutang/Piutang lainnya	67,66	186,12	11,49	159,65	86,47	98,83
F81	Kredit dagang dan pembayaran dimuka	19,91	110,99	14,31	9,94	38,26	30,10
F89	Hutang/Piutang lainnya	47,75	75,13	-2,81	149,71	48,21	68,73
	TOTAL	1.587,48	1.587,48	1.707,88	1.707,88	1.539,52	1.539,52

Lanjutan Lampiran 4.4

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	2023**		2024***	
		ΔAset	ΔKewajiban	ΔAset	ΔKewajiban
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
B8g	Tabungan Bruto		954,57		1.117,41
P5g	Investasi NonFinansial	900,52		1.086,01	
B9c	Pinjaman Neto (B8g-P5g)	54,05		31,40	
	Selisih Statistik(B9c-B9f)	-136,94		-151,39	
B9f	Perubahan neto investasi finansial (A-L)		190,99		182,79
A	Perolehan neto aset finansial	556,53		424,86	
L	Perolehan neto kewajiban finansial		365,54		242,07
F1	Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus				
F11	Emas Moneter				
F12	Hak Tarik Khusus				
F2	Uang dan Simpanan	237,41		-26,21	
F21	Uang	35,10		67,91	
F22	Transferable deposits	59,62		-153,42	
F29	Simpanan lainnya	142,69		59,30	
F3	Surat Berharga	211,32		219,76	
F31	Jangka pendek	-0,35		8,39	
F32	Jangka panjang	211,67		211,37	
F4	Pinjaman	0,20	329,14	2,19	200,22
F41	Jangka pendek	0,09	36,22	0,73	10,33
F42	Jangka panjang	0,11	292,92	1,47	189,89
F5	Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif	75,37		161,73	
F51	Ekuitas	78,33		159,52	
F52	Unit Penyertaan Investasi Kolektif	-2,96		2,21	
F6	Asuransi, Dana Pensiun dan Jaminan Terstandar	8,85		10,88	
F61	Cadangan teknis asuransi non-jiwa	0,85		2,46	
F62	Hak anuitas dan asuransi jiwa	-17,87		-5,15	
F63	Hak pensiunan	25,87		13,57	
F7	Transaksi derivatives	0,05	-1,01	0,43	-0,28
F8	Hutang/Piutang lainnya	23,33	37,40	56,09	42,13
F81	Kredit dagang dan pembayaran dimuka	1,34	-1,31	8,68	7,90
F82	Hutang/Piutang lainnya	21,99	38,71	47,40	34,22
	TOTAL	1.511,11	1.511,11	1.542,27	1.542,27

Keterangan:

Δ Aset = Perubahan Aset

Δ Kewajiban = Perubahan Kewajiban

* = Angka Sementara

** = Angka Sangat Sementara

*** = Angka Sangat Sangat Sementara

Lampiran 4.5 Neraca Arus Dana LNPRT (Triliun Rp)

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	2020		2021		2022*	
		ΔAset	ΔKewajiban	ΔAset	ΔKewajiban	ΔAset	ΔKewajiban
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
B8g	Tabungan Bruto		75,31		71,12		101,88
P5g	Investasi NonFinansial	73,95		65,89		74,79	
B9c	Pinjaman Neto (B8g-P5g)	1,36		5,23		27,09	
	Selisih Statistik(B9c-B9f)	-5,77		-10,08		12,26	
B9f	Perubahan neto investasi finansial (A-L)		7,13		15,32		14,83
A	Perolehan neto aset finansial	7,33		9,23		14,30	
L	Perolehan neto kewajiban finansial		0,20		-6,09		-0,53
F1	Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus						
F11	Emas Moneter						
F12	Hak Tarik Khusus						
F2	Uang dan Simpanan	7,08		3,71		8,71	
F21	Uang	1,72		-0,12		4,46	
F22	Transferable deposits	2,84		0,98		3,12	
F29	Simpanan lainnya	2,52		2,85		1,13	
F3	Surat Berharga	0,00		-		-	
F31	Jangka pendek	0,00		-		-	
F32	Jangka panjang	-		-		-	
F4	Pinjaman	-0,45	0,20	0,05	-6,09	5,18	-0,53
F41	Jangka pendek	-	-	-	-	-	-
F42	Jangka panjang	-0,45	0,20	0,05	-6,09	5,18	-0,53
F5	Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif	0,66		5,58		0,29	
F51	Ekuitas	0,78		5,40		0,16	
F52	Unit Penyertaan Investasi Kolektif	-0,12		0,18		0,13	
F6	Asuransi, Dana Pensiun dan Jaminan Terstandar	-0,03		-0,16		-0,04	
F61	Cadangan teknis asuransi non-jiwa	-0,03		-0,16		-0,04	
F62	Hak anuitas dan asuransi jiwa						
F63	Hak pensiunan						
F7	Transaksi derivatives	-	-	-	-	-	-
F8	Hutang/Piutang lainnya	0,06	0,00	0,05	0,00	0,16	0,00
F81	Kredit dagang dan pembayaran dimuka	-	-	-	-	-	-
F89	Hutang/Piutang lainnya	0,06	-	0,05	-	0,16	-
	TOTAL	82,64	82,64	80,35	80,35	116,18	116,18

Lanjutan Lampiran 4.5

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	2023**		2024***	
		ΔAset	ΔKewajiban	ΔAset	ΔKewajiban
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
B8g	Tabungan Bruto		70,82		97,23
P5g	Investasi NonFinansial	81,62		88,21	
B9c	Pinjaman Neto (B8g-P5g)	-10,80		9,02	
	Selisih Statistik(B9c-B9f)	-10,31		1,12	
B9f	Perubahan neto investasi finansial (A-L)		-0,49		7,90
A	Perolehan neto aset finansial	3,32		11,96	
L	Perolehan neto kewajiban finansial		3,81		4,06
F1	Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus				
F11	Emas Moneter				
F12	Hak Tarik Khusus				
F2	Uang dan Simpanan	14,73		10,88	
F21	Uang	5,61		2,79	
F22	Transferable deposits	3,98		5,01	
F29	Simpanan lainnya	5,14		3,08	
F3	Surat Berharga	-		-	
F31	Jangka pendek	-		-	
F32	Jangka panjang	-		-	
F4	Pinjaman	0,01	3,81	0,07	4,06
F41	Jangka pendek	-	-	-	-
F42	Jangka panjang	0,01	3,81	0,07	4,06
F5	Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif	-11,47		0,83	
F51	Ekuitas	-0,54		0,10	
F52	Unit Penyertaan Investasi Kolektif	-10,93		0,73	
F6	Asuransi, Dana Pensiun dan Jaminan Terstandar	0,01		0,09	
F61	Cadangan teknis asuransi non-jiwa	0,01		0,09	
F62	Hak anuitas dan asuransi jiwa				
F63	Hak pensiunan				
F7	Transaksi derivatives	-0,09	-0	-	-
F8	Hutang/Piutang lainnya	0,12	0,00	0,09	-
F81	Kredit dagang dan pembayaran dimuka	-	-	-	-
F82	Hutang/Piutang lainnya	0,12	-	0,09	-
	TOTAL	74,13	74,13	109,19	109,19

Keterangan:

Δ Aset = Perubahan Aset

Δ Kewajiban = Perubahan Kewajiban

* = Angka Sementara

** = Angka Sangat Sementara

*** = Angka Sangat Sangat Sementara

Lampiran 4.6 Neraca Arus Dana Luar Negeri (triliun rupiah)

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	2020		2021		2022*	
		ΔAset	ΔKewajiban	ΔAset	ΔKewajiban	ΔAset	ΔKewajiban
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
B8g	Tabungan Bruto		64,71		-50,51		-197,52
P5g	Investasi NonFinansial						
B9c	Pinjaman Neto (B8g-P5g)	64,71		-50,51		-197,52	
	Selisih Statistik(B9c-B9f)	-11,16		-36,43		-1,44	
B9f	Perubahan neto investasi finansial (A-L)		75,87		-14,08		-196,08
A	Perolehan neto aset finansial	363,98		375,56		240,81	
L	Perolehan neto kewajiban finansial		288,11		389,64		436,90
F1	Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus	-		90,77	90,77	-	
F11	Emas Moneter	-		-	-	-	
F12	Hak Tarik Khusus	-		90,77	90,77	-	
F2	Uang dan Simpanan	-7,91	85,05	14,15	69,41	6,62	119,32
F21	Uang	-	-1,59	-	-1,27	-	2,05
F22	Transferable deposits	-12,90	130,03	14,26	49,07	3,85	90,72
F29	Simpanan lainnya	4,99	-43,39	-0,11	21,60	2,77	26,55
F3	Surat Berharga	136,92	72,14	53,13	111,47	-106,89	112,44
F31	Jangka pendek	-30,68	-	-6,03	-	-5,32	-
F32	Jangka panjang	167,60	72,14	59,16	111,47	-101,56	112,44
F4	Pinjaman	58,71	35,03	-137,11	34,57	11,70	60,97
F41	Jangka pendek	-40,94	3,60	-75,87	19,19	-42,27	12,95
F42	Jangka panjang	99,65	31,44	-61,24	15,38	53,97	48,02
F5	Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif	217,78	64,74	339,15	43,36	348,09	57,82
F51	Ekuitas	214,91	64,74	333,93	43,36	363,88	57,82
F52	Unit Penyertaan Investasi Kolektif	2,87	-	5,22	-	-15,80	-
F6	Asuransi, Dana Pensiun dan Jaminan Terstandar	-	-	-	-	-	-
F61	Cadangan teknis asuransi non-jiwa	-	-	-	-	-	-
F62	Hak anuitas dan asuransi jiwa	-	-	-	-	-	-
F63	Hak pensiunan	-	-	-	-	-	-
F7	Transaksi derivatives	-18,83	-19,22	-16,31	-21,08	-19,29	-19,96
F8	Hutang/Piutang lainnya	-22,68	50,38	31,79	61,15	0,58	106,31
F81	Kredit dagang dan pembayaran dimuka	-27,64	26,80	44,66	48,95	2,13	53,95
F89	Hutang/Piutang lainnya	4,96	23,57	-12,88	12,20	-1,55	52,36
	TOTAL	428,70	428,70	325,05	325,05	43,29	43,29

Lanjutan Lampiran 4.6

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	2023**		2024***	
		ΔAset	ΔKewajiban	ΔAset	ΔKewajiban
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
B8g	Tabungan Bruto		30,72		134,61
P5g	Investasi NonFinansial				
B9c	Pinjaman Neto (B8g-P5g)	30,72		134,61	
	<i>Selisih Statistik(B9c-B9f)</i>	-38,26		-55,77	
B9f	Perubahan neto investasi finansial (A-L)		68,98		190,38
A	Perolehan neto aset finansial	464,95		721,88	
L	Perolehan neto kewajiban finansial		395,96		531,50
F1	Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus	-		-	
F11	Emas Moneter	-		-	
F12	Hak Tarik Khusus	-		-	
F2	Uang dan Simpanan	11,81	336,48	44,17	143,23
F21	Uang	-	0,10	-	0,91
F22	<i>Transferable deposits</i>	3,63	212,93	43,63	-635,55
F29	Simpanan lainnya	8,18	123,45	0,54	777,87
F3	Surat Berharga	75,68	-114,60	210,50	134,17
F31	Jangka pendek	54,24	-	150,14	-
F32	Jangka panjang	21,44	-114,60	60,36	134,17
F4	Pinjaman	77,82	71,05	124,93	84,79
F41	Jangka pendek	-83,36	38,78	-34,76	50,11
F42	Jangka panjang	161,19	32,28	159,69	34,68
F5	Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif	309,53	66,02	340,42	84,29
F51	Ekuitas	321,44	66,02	329,82	84,29
F52	Unit Penyertaan Investasi Kolektif	-11,91	-	10,61	-
F6	Asuransi, Dana Pensiun dan Jaminan Terstandar	-	-	-	-
F61	Cadangan teknis asuransi non-jiwa	-	-	-	-
F62	Hak anuitas dan asuransi jiwa	-	-	-	-
F63	Hak pensiunan	-	-	-	-
F7	Transaksi <i>derivatives</i>	-13,02	-15,64	-15,04	-19,86
F8	Hutang/Piutang lainnya	3,12	52,64	16,90	104,88
F81	Kredit dagang dan pembayaran dimuka	-28,66	18,33	17,77	64,60
F82	Hutang/Piutang lainnya	31,78	34,31	-0,86	40,28
	TOTAL	495,67	495,67	856,48	856,48

Keterangan:

Δ Aset = Perubahan Aset

Δ Kewajiban = Perubahan Kewajiban

* = Angka Sementara

** = Angka Sangat Sementara

*** = Angka Sangat Sangat Sementara



SENSUS
EKONOMI
2026

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291, Faks (021) 3857046
Homepage: <http://www.bps.go.id>. E-mail : bpshq@bps.go.id

